

2021

LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

Memperkokoh Kinerja dan
Pelayanan Untuk
Keberlanjutan



TEMA

Memperkokoh Kinerja dan Pelayanan Untuk Keberlanjutan



PIDC memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan roda bisnis pelayanan terutama di era pandemi Covid 19 ini.

Sumber daya berkualitas, dan pengelolaan yang tertata menumbuhkan kepercayaan pelanggan bersama PIDC.

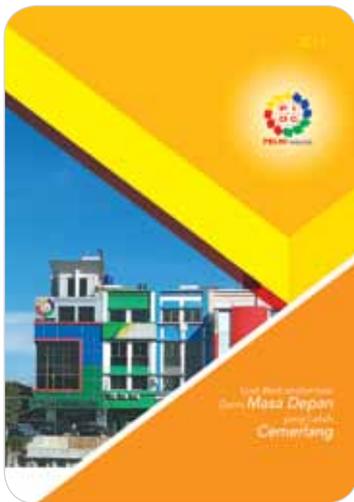
Persaingan terus muncul dalam perjalanan bisnis jasa, menambah kegigihan sumber daya manusia PIDC yang akan memperkokoh pengalaman perusahaan. Mempersiapkan amunisi kekuatan tidak lantas dianggap sebagai rutinitas tanpa peningkatan, tiap periode menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk terus beradaptasi memasuki kancah persaingan.

Di tengah keunggulan yang terus menjadi tujuan, upaya terarah dan sumber daya berkualitas adalah keharusan.

Kami terus berkomitmen melayani dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia yang berkelanjutan.

KESINAMBUNGAN TEMA

2017



GIAT BERTRANSFORMASI DEMI
MASA DEPAN YANG LEBIH
CEMERLANG

2018



PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN
UNTUK MENATAP MASA DEPAN
GEMILANG

2019



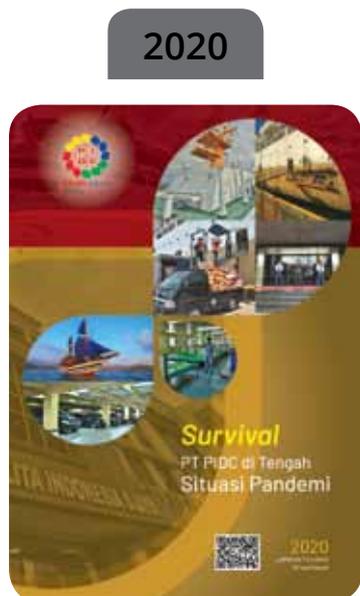
OPTIMALISASI SUMBERDAYA
UNTUK KEBERLANJUTAN

Tentang Laporan Tahunan 2021

Selamat Datang di Laporan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) tahun 2021, Laporan ini merupakan komitmen kami untuk terus berupaya menyajikan informasi kinerja Kami berharap Laporan Tahunan ini dapat memberikan kemudahan membaca informasi tentang Kinerja PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) tahun 2021 dan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Isi Laporan

Penyusunan Laporan Tahunan ini berdasarkan aspek-aspek yang materialitas dan penting sebagai isi laporan, yang mencakup Profil Perusahaan, Laporan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan Keuangan berstandarisasi PSAK, serta informasi lain yang dapat mempengaruhi Pengambilan keputusan pemangku kepentingan.



SURVIVAL PT PIDC DI TENGAH SITUASI PANDEMI

2021



MEMPERKOKOH KINERJA DAN PELAYANAN UNTUK KEBERLANJUTAN

Periode Laporan

Laporan Tahunan ini merupakan dokumentasi kinerja tahunan bagi para pemangku kepentingan pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021, yang telah disahkan dalam Akta Notaris Notaris Ida Adiningsih, S.H. No. 4 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya tanggal 27 Juni 2022.

DAFTAR ISI

8-47

BAB 1 PROFIL PERUSAHAAN

• Tema	1
• Kesenambungan Tema	2
• Daftar Isi	4
• Tentang Laporan Tahunan 2021	4
• Ikhtisar Kinerja Tahun 2021	6

48-61

BAB 2 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

• Peristiwa Penting	10	• Sekilas Perusahaan	30
• Kilas Kinerja	12	• Arti Logo	32
• Ikhtisar Kinerja Keuangan	13	• Visi dan Misi	33
• Sambutan Komisaris	15	• Budaya Perusahaan	34
• Sambutan Direksi	19	• Nilai Perusahaan	35
• Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	24	• Akhlak BUMN	36
• Profil Komisaris	25	• Kegiatan Perusahaan	37
• Profil Dewan Direksi	27	• Struktur Organisasi PT PIDC	45
• Identitas Perusahaan	28		
• Tinjauan Segmen Usaha	51	• Jumlah Aset	56
• Laporan Laba (Rugi) Perusahaan per 31 Desember 2021		• Kelangsungan Usaha	59
• Pendapatan Usaha	52	• Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/ atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)	61
• Biaya Usaha	53		
• Laba Usaha	54		

62-77

BAB 3 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

• Komitmen pada Tanggung Jawab Sosial	64	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Lingkungan Hidup	69
• Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR	65	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	70
• Anggaran dan Realisasi Biaya Tanggung Jawab Sosial	66	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen	74
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia	67	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembanagn Sosial Kemasyarakatan	74
• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi Yang Adil	68		

78-91

BAB 4 LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Tata Kelola Teknologi Informasi PT PIDC - *IT Governance* 82
- *Website Corporate* 84
- Aplikasi System Keuangan SAP 86
- Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (*E-Mail*) 88
- Inovasi Teknologi Informasi Selama 2021 90
- Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2021 90

92-101

BAB 5 LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Komposisi SDM 94
- *Roadmap* Pengembangan SDM 95
- Pengembangan SDM 97
- *Turn Over* 98
- Sistem Manajemen Kinerja 98
- Tujuan Pelatihan 99
- Kesempatan Keselamatan Kerja 99
- *Reward and Punishment* 99

102-121

BAB 6 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- Dasar dan Penerapan GCG 104
- Pelaksanaan GCG 104
- Rapat Umum Pemegang Saham 107
- Dewan Komisaris 108
- Direksi 109
- Sekretaris Dewan Komisaris 111
- Sekretaris Perusahaan 112
- Profil Sekretaris Perusahaan 112
- Sistem Pengendalian Internal (SPI) 116
- Profil SPI 116
- Manajemen Risiko 117
- Perkara Hukum 118
- Rencana Pengembanagn GCG Tahun 2021 120

122

BAB 7 LAPORAN KEUANGAN

IKHTISAR KINERJA TAHUN 2021

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

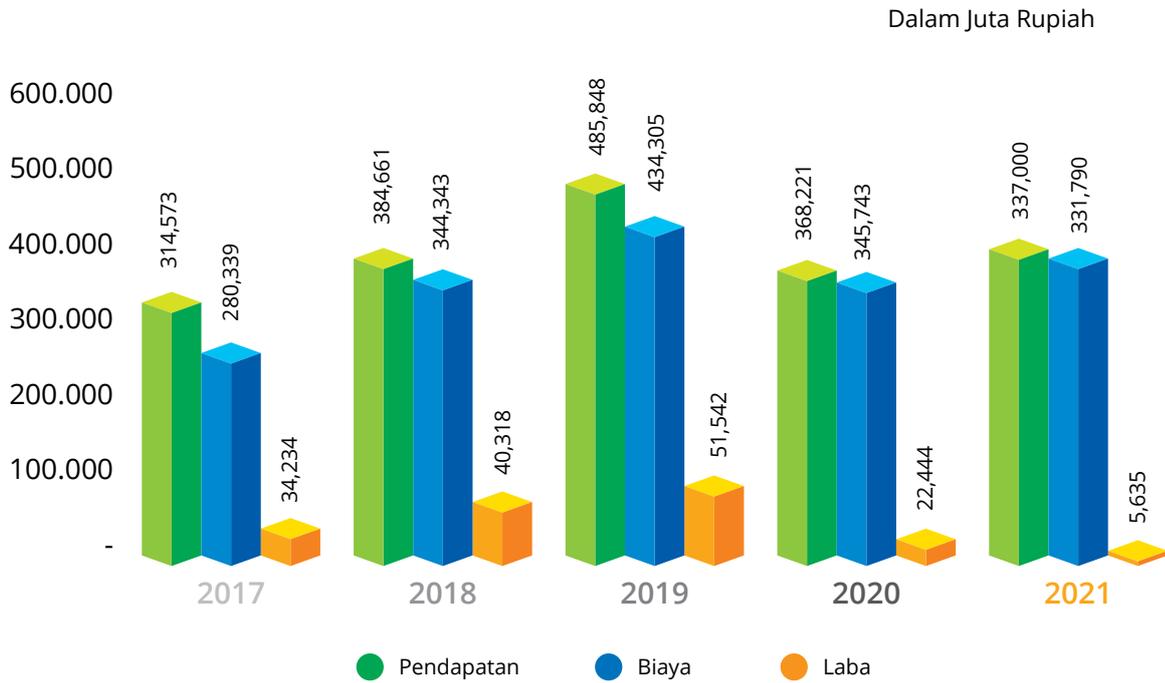
Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

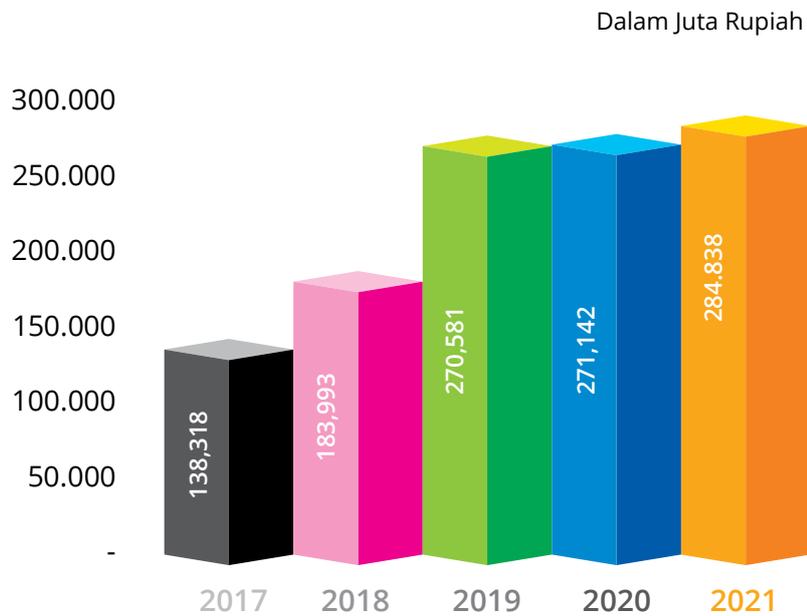
Laporan Keuangan

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	PERTUMBUHAN (TURUN)
LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN (dalam satuan Juta Rupiah)						
Pendapatan Usaha	314,573	384,661	485,848	368,211	337,000	(24.21)
Biaya Usaha	(251,679)	(304,504)	(368,406)	(295,857)	(302,610)	(19.69)
Laba Kotor	62,894	80,157	117,442	72,354	34,390	(38.39)
Beban Administrasi dan Umum	(17,566)	(26,437)	(43,979)	(41,527)	(45,759)	(5.58)
Laba Usaha	45,328	53,720	73,462	30,827	(11,370)	(58.04)
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	(3)	242	(1,686)	(733)	15,666	(57)
Laba Sebelum Pajak	45,326	53,962	71,777	30,093	4,297	(58.07)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Pajak Kini	(11,827)	(13,930)	(20,487)	(7,754)	(58)	(62.15)
Pajak Tangguhan	274	298	266	85	927	(68.25)
Laba Tahun Berjalan	33,773	40,329	51,556	22,424	5,166	(56.51)
Penghasilan Komprehensif Lain	475	(53)	769	(29)	470	(103.84)
Jumlah Laba Komprehensif	34,248	40,382	50,787		5,635	(74.87)
Hak Minoritas	(14)	(11)	(14)	44	6	(409.86)
Laba Rugi Konsolidasian	34,234	40,318	51,542	22,454	5,635	(56,41)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam satuan Juta Rupiah)						
Aset Lancar	125,140	150,991	229,825	217,384	220,344	(4.52)
Aset Tidak lancar	13,178	27,079	40,757		64,495	19.97
TOTAL ASET	138,318	178,069	270,581	271,142	284,838	0.21
Liabilitas Jangka Pendek	50,941	57,900	93,718	93,263	114,459	(5.76)
Liabilitas Jangka Panjang	9,353	7,932	37,008	24,554	11,519	(20.29)
Total Liabilitas	60,294	59,832	130,726	117,817	125,978	(9.88)
Modal Kerja	77,931	118,133	139,586	153,103	158,733	9.84
Kepentingan Non Pengendali	94	105	269	223	127	(17.33)
Total Ekuitas	78,024	118,238	139,855	153,326	158,859	9.79
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	138,318	178,069	270,581	271,142	284,838	0.21
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN						
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	11,233	24,396	35,428	(7,083)	31,009	2963.25
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(5,391)	(17,518)	(18,955)	(14,669)	(20,243)	(22.61)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1,332	(1,435)	(2,627)		8,542	282.87
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	7,175	5,442	13,846		19,307	173.07
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	14,604	21,779	27,221	41,066	14,642	50.65
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	21,779	27,221	41,066		33,950	131.87
RASIO KEUANGAN						
<i>Gross Profit Margin</i>	19.99%	20.84%	23.68%	19.62%	9.73%	(17.14)
<i>Operating Profit Margin</i>	14.43%	14.09%	16.40%	16.40%	16.40%	-
<i>Net Profit Margin</i>	10.73%	10.48%	12.17%	6.09%	1.53%	(49.94)
<i>EBITDA Margin</i>	14.47%	13.27%	16.83%	9.18%	9.64%	(45.58)
<i>Net Return On Investment</i>	24.41%	21.92%	31.90%	12.74%	11.41%	(60.07)
<i>Net Return On Equity</i>	32.82%	34.11%	67.16%	17.94%	4.12%	(73.29)
<i>Dept to Equity Ratio</i>	43.29%	55.61%	83.54%	76.84%	79.30%	(8.02)
<i>Dept to Total Asset</i>	43.59%	35.74%	45.52%	43.45%	44.23%	(4.54)
<i>Current Ratio</i>	245.66%	271.37%	266.77%	248.47%	192.51%	(6.86)
<i>Total Asset Turn Over</i>	227.43%	209.06%	179.99%	139.04%	124.07%	(22.75)

Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba Konsolidasi Perusahaan



Perkembangan Aset Perusahaan







1

PROFIL PERUSAHAAN

PT PIDC adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung perusahaan Induk yaitu PT PELNI (Persero) dengan *branding* nama PELNI Services untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa (PT PELNI dan lainnya) dalam pelaksanaannya berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu.

**PROFIL
PERUSAHAAN**

 Analisis dan
Pembahasan
Manajemen

 Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan

 Laporan
Teknologi
Informasi

 Laporan
Sumber Daya
Manusia

 Tata Kelola
Perusahaan
Yang Baik

 Laporan
Keuangan

PERISTIWA PENTING 2021

8 April 2021


Kunjungan Direksi dan Komisaris PT PELNI ke PIDC

7 Juli 2021


Kerja sama dengan *Food Station*



9 Juli 2021

Kunjungan Direktur Operasi
ke Wisma Bahtera Tretes



21 September 2021

Pelaksanaan audit GCG oleh BPKP



PROFIL
PERUSAHAANAnalisis dan
Pembahasan
ManajemenTanggung
Jawab Sosial
PerusahaanLaporan
Teknologi
InformasiLaporan
Sumber Daya
ManusiaTata Kelola
Perusahaan
Yang BaikLaporan
Keuangan

KILAS KINERJA

Keunggulan PT PIDC:

- Revitalisasi layanan jasa yang menaikkan *customer value* (kecepatan, ketepatan, keefisienan, keandalan);
- Percepatan akuisisi pasar melalui keunggulan kompetitif;
- Optimalisasi jaringan bisnis untuk meningkatkan *coverage area* pelayanan dan sekaligus mengimbangi ekspansi pesaing;
- *Equal treatment* dalam menyusun *service level* dengan para *vendor* bisnis;
- Membangun sistem operasi berbasis proses bisnis yang efisien;
- Penguatan tim pelayanan;
- *Brand building* dan *repositioning* ke layanan jasa pelayanan;
- Menguasai *captive market*;
- Memiliki *customer based* dilingkup industrinya.



PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan



SAMBUTAN KOMISARIS

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan atas pengelolaan perusahaan selama tahun 2021. Kami bangga atas pencapaian-pencapaian yang diraih PIDC selama tahun 2021. Seluruh pencapaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh tim manajemen, Direksi beserta jajaran karyawan PIDC.

Dengan demikian Dewan Komisaris PIDC menyadari bahwa semakin besar dan kompleks perusahaan, maka tugas pengawasan yang harus dilakukan Dewan Komisaris akan semakin berat. Namun demikian, berkat dukungan dari semua pihak, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab kami selaku Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik selama tahun 2021.

Penilaian atas kinerja Direksi Mengenai pengelolaan Perusahaan

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan seluruh jajaran perusahaan telah bekerja sesuai dengan arahan strategi Perusahaan. Dengan pencapaian kinerja tersebut Dewan komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang telah berusaha secara maksimal

dalam menjalankan strategi dan berbagai upaya yang dilakukan oleh direksi dan jajaran Perusahaan.

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim bisnis di tanah air sebagaimana telah diurai diatas. Sama seperti entitas bisnis lainnya, PIDC juga sangat terdampak dari kondisi memburuknya situasi ekonomi nasional dikarenakan pandemi Covid-19. Namun demikian, meski menghadapi situasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang sangat tidak kondusif tersebut, PIDC ternyata tetap mampu menghasilkan kinerja bisnis yang masih relatif cukup baik di sepanjang tahun 2021.

Portofolio bisnis Perseroan secara umum di tahun 2021 tetap mampu bertumbuh dengan cukup baik, meskipun untuk beberapa *segmen* tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan terjadi Kinerja Perusahaan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp5.165 juta atau 68,11% dari Anggarannya sebesar Rp24.424 Juta dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 78,85%.

Penurunan terjadi baik dari sisi produksi, pendapatan dan laba bersih konsolidasi. Hal ini dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 terutama di kuartal 1 di mana ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Larangan memasuki di beberapa Pelabuhan dan pengurangan kapasitas jumlah penumpang sampai 50%. Posisi keuangan Konsolidasian PIDC dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta dan

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

Laporan Arus Kas PIDC dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33,950 juta.

Pendapatan usaha tahun 2021 terealisasi sebesar Rp337.000 juta atau 68,11% dari anggaran sebesar Rp494.800 juta, dan menurun 8,48% dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp368.211 juta.

Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2021 adalah sebesar Rp5.160 juta, atau 18,36% dari anggaran sebesar Rp28.112 juta. Laba bersih konsolidasi ini hanya tercapai 22,97% jika dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp22.468 juta.

Jumlah Aset PIDC per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp284.838 juta, atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp324.261 juta, dan apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp271.142 juta, maka *trend*-nya naik sebesar 5,05%.

Selain itu, Dewan Komisaris juga mendukung langkah Direksi menerapkan strategi dan pengembangan usaha sesuai *Roadmap* PIDC.

Pandangan Atas Prospek Usaha

Untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang yang diamanatkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) Perusahaan, yaitu menjadi perusahaan yang sehat secara financial (*sustainable profit*) sehingga dapat melakukan investasi yang berkelanjutan (*sustainable growth*) untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang didukung SDM dengan kompetensi yang tinggi dan berperilaku sesuai GCG dalam menjalankan usahanya (*corporate value*) maka Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengembangkan prospek usaha yang mampu menciptakan *sustainable value* bagi para pemegang saham, dan dalam skala yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan lainnya.

Masih terdapat ruang yang dapat disempurnakan oleh PIDC, baik dari sisi proses

bisnis, strategis maupun operasional, sehingga PIDC dapat terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kemampuan individu, pengembangan individu, dan kerjasama tim dapat terus ditingkatkan melalui banyaknya kesempatan yang tercipta, karena pencapaian yang diperoleh PIDC merupakan bukti kepercayaan pelanggan semakin membaik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Komitmen PIDC untuk terus tumbuh berkelanjutan telah mendorong kami untuk senantiasa berbenah diri terutama dalam bidang penerapan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* mengacu pada standar praktek terbaik. Pelaksanaan implementasi GCG dan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi pilihan strategi yang tepat dengan melibatkan seluruh pegawai di setiap tingkatan organisasi.

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di PIDC adalah niat dan tekad manajemen untuk menjadikan PIDC sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

Selama tahun buku 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar

dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta RUPS. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial PIDC.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Apresiasi Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan kepada PIDC. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Direksi atas kepemimpinan dengan wawasan yang luas, serta kepada manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan. Dewan Komisaris yakin kinerja baik yang tercapai pada 2021 akan mewujudkan visi dan misi PIDC serta memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum
Wabarakatuh.

Warahmatullahi

Jakarta, 22 Agustus 2022
Atas Nama Dewan Komisaris



M Tukul Harsono
Komisaris Utama

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan



SAMBUTAN DIREKSI

Assalamualaikum
Wabarakatuh

Warahmatullahi

Pemegangsaham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barokatuh dan salam sejahtera. Segala Puji syukur kepada Alloh SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat-Nya PIDC dapat menjalankan berbagai program kerja di tahun 2021 yang penuh tantangan. Kami perlu sampaikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat bahwa secara umum kinerja di tahun 2021 tumbuh dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan semangat dan kerja keras dari seluruh elemen Perseroan, harapan Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang dapat tercapai.

Analisis Atas Kinerja Perseroan

Laporan Tahunan Tahun 2021 memuat laporan kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan Perusahaan dikomparasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021 yang telah direvisi menyesuaikan dengan kondisi dampak pandemi covid-19 dan disetujui oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT PELNI (Persero) Nomor: 12.29/03/S-B/090/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan sebagai pembanding capaian kinerja tahun 2020. Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum dan laporan manajemen ini disajikan dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksanaan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan dan pertanggung jawaban Dewan Komisaris atas pengawasan Perusahaan selama

tahun buku 2021 serta untuk memenuhi ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan.

2. Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1.
3. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan operasi secara lengkap dan benar.
4. Sebagai kepatuhan pelaksanaan sistem pengendalian intern Perusahaan dan kepatuhan pelaksanaan perundang-undangan.
5. Laporan keuangan ini juga memuat capaian program kerja strategi Perusahaan terhadap prespektif keuangan dan pasar, prespektif fokus pelanggan, prespektif produk dan proses, prespektif terhadap tenaga kerja dan prespektif kepemimpinan, tatakelola dan tanggung jawab masyarakat.
6. Laporan keuangan ini juga menyajikan efektifitas struktur pengendali intern dan telah memenuhi prosedur pelaporan keuangan.
Opini dari hasil Audit Kantor Akuntan Publik Djoko Sidik & Indra atas Laporan Keuangan
7. Konsolidasian Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Konsolidasian PT PIDC dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2021.
8. Kinerja Perusahaan Tahun 2021 tercapai sebesar Rp5.160 juta atau 18.36% dari Anggarannya sebesar Rp28.112 Juta dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 77,03%. Penurunan terjadi baik dari sisi produksi, pendapatan dan laba bersih konsolidasi. Hal ini dampak dari kondisi Pandemi Covid-19, pengurangan kapasitas jumlah penumpang sampai 50%, dan pembebanan atas temuan BPK-RI.

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

9. Posisi keuangan Konsolidasian PT PIDC dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta dan Laporan Arus Kas PT PIDC dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp39.950 juta.
10. Disampaikan juga Capaian tingkat kesehatan perusahaan tahun Buku 2021 berdasarkan laporan evaluasi dari KAP "Djoko Sidik & Indra" nomor: 00003/2/0999/NASS.LEK/05/0139-1/1/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP 100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 memperoleh hasil dengan kriteria SEHAT kategori A dengan capaian nilai/skor 71.50. dan capaian program kerja berdasarkan perspektif *Key performance Indicator (KPI)* berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik "Djoko Sidik & Indra" nomor: 00002/2.0999/NASS.KPI/05/0139-1/1/III/2022 KPI Manajemen pada tahun 2021 memperoleh nilai/skor 72,26.

Kondisi Makro Ekonomi

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim bisnis di tanah air sebagaimana telah diurai diatas. Sama seperti entitas bisnis lainnya, PT PIDC juga sangat terdampak dari kondisi memburuknya situasi ekonomi nasional dikarenakan pandemi Covid-19. Namun demikian, meski menghadapi situasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang sangat tidak kondusif tersebut, PT PIDC ternyata tetap mampu menghasilkan kinerja bisnis yang masih relatif cukup baik di sepanjang tahun 2021.

Portofolio bisnis Perseroan secara umum di tahun 2021 tetap mampu bertumbuh dengan cukup baik, meskipun untuk beberapa segmen tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan terjadi penurunan yang cukup signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya 2020.

Meskipun terdapat beberapa risiko, perkembangan ekonomi global terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Perekonomian global terus pulih, namun perlambatan terlihat di berbagai negara terutama faktor pertumbuhan yang tinggi pada triwulan II 2021, dampak menjamurnya

varian delta, dan dampak gangguan rantai pasok. Prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 mencerminkan pemulihan yang kuat. Namun, ada berbagai risiko pemulihan global yang perlu diingat: B. Dampak peningkatan kasus Covid-19 dengan Omicron dan varian baru lainnya, ketimpangan vaksinasi, stagflasi global, dan dinamika kebijakan moneter di negara berkembang.

PIDC untuk terus fokus menjalankan bisnis utama Perseroan dan melakukan implementasi kebijakan strategis terkait pengelolaan biaya yang tepat dan efisien. Analisis bisnis dan manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT PIDC untuk periode 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Di tahun 2021, di tengah volatilitas kondisi perekonomian global serta kondisi kenormalan baru pandemi COVID-19, PT PIDC tetap dapat menjaga kesinambungan bisnis dan manajemen pengelolaan Perseroan melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten, sehingga performa profitabilitas PT PIDC tetap terjaga cukup baik.

Kondisi Ekonomi Global dan Nasional

Momentum pemulihan ekonomi domestik relatif terjaga dengan baik. *Output* ekonomi Indonesia terus tumbuh positif pada triwulan III tahun 2021 di tengah eskalasi Covid-19 oleh *Variant Delta*. Akibat penerapan PPKM yang ketat, konsumsi rumah tangga hanya meningkat 1,0% (*year-on-year*) dan investasi meningkat 3,74% (*year-on-year*), sehingga menahan permintaan domestik. Kinerja ekonomi terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor yang kuat sebesar 29,16%, diikuti oleh kinerja impor sebesar 30,11% (*year-on-year*).

Selain itu, potensi risiko penyebaran virus Covid-19 juga masih tinggi terutama akibat munculnya varian Omicron. Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Selain itu, sinergi kebijakan baik fiskal, sektor keuangan dan moneter juga akan semakin diperkuat guna mengantisipasi dampak negatif pandemi Covid-19 dan eskalasi risiko perekonomian global.

Tinjauan Kinerja

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim bisnis di tanah air sebagaimana telah diurai diatas. Sama seperti entitas bisnis lainnya, PT PIDC juga sangat terdampak dari kondisi memburuknya situasi ekonomi nasional dikarenakan pandemi Covid-19. Namun demikian, meski menghadapi situasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang sangat tidak kondusif tersebut, PT PIDC ternyata tetap mampu menghasilkan kinerja bisnis yang masih relatif cukup baik di sepanjang tahun 2021.

Portofolio bisnis Perseroan secara umum di tahun 2021 tetap mampu bertumbuh dengan cukup baik, meskipun untuk beberapa segmen tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan terjadi Kinerja Perusahaan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp5.165 juta atau 68,11% dari Anggarannya sebesar Rp24.424 Juta dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 78,85%.

Penurunan terjadi baik dari sisi produksi, pendapatan dan laba bersih konsolidasi. Hal ini dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 terutama di kuartal 1 di mana ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Larangan memasuki di beberapa Pelabuhan dan pengurangan kapasitas jumlah penumpang sampai 50%. Posisi keuangan Konsolidasian PT PIDC dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta dan Laporan Arus Kas PIDC dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33,950 juta.

Pendapatan usaha tahun 2021 terealisasi sebesar Rp337.000 juta atau 68,11% dari anggaran sebesar Rp494.800 juta, dan menurun 8,48% dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp368.211 juta

Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2021 adalah sebesar Rp5.160 juta, atau 18,36% dari anggaran sebesar Rp28.112 juta. Laba bersih konsolidasi ini hanya tercapai 22,97% jika dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp22.468 juta.

Jumlah Aset PT PIDC per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp284.838 juta, atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp324.261 juta, dan apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp271.142 juta, maka trend-nya naik sebesar 5,05%.

Analisa Atas Prospek Usaha

Dengan melihat kondisi perekonomian global, regional, dan nasional yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi cukup memuaskan, Perusahaan menyakini bahwa pertumbuhan industri pengangkutan barang/logistik akan semakin prospektif di masa-masa mendatang. Oleh karena itu Perusahaan terus berupaya membuat terobosan melalui beragam strategi dari segi aspek pemasaran. Perumusan strategi tersebut dilakukan dengan melihat pangsa pasar dan prospek usaha setiap segmen usaha yang dimiliki. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, Pemerintah sangat optimis, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali menggeliat di tahun 2021.

Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali menguat. Kemajuan penanganan pandemic Covid-19, termasuk penggunaan vaksin, performa ekonomi global yang menguat, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan akan mendukung optimisme dalam penguatan ekonomi.

Vaksinasi dan disiplin penerapan protokol COVID-19 menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 3,5%-5,1% pada 2021. Inflasi juga diperkirakan tetap terkendali di 2,7%

Seiring dengan langkah penanganan COVID-19 yang terus ditingkatkan Pemerintah sebagaimana telah diurai di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diyakini akan semakin membaik, mulai tahun 2021 dan seterusnya.

Karena itu, Perusahaan merasa optimis bahwa di tahun 2021 dan di tahun-tahun selanjutnya, bisnis Perusahaan akan kembali membaik dan

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

akan kembali bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sebagaimana pada tahun-tahun sebelum pandemi.

Strategi dan Rencana Bisnis Tahun 2021

Pada tahun 2021 ada kebijakan utama yang dilakukan PIDC yaitu Melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan manajemen risiko pada semua proses bisnis, meningkatkan pelayanan, menaikkan *customer value* (kecepatan, ketepatan, keefisienan, keandalan dan keamanan pelanggan), Membangun sistem operasi berbasis proses bisnis yang efisien; Penguatan tim pelayanan jasa.

Pengembangan SDM

PIDC menyadari bahwa keberhasilan Perseroan untuk menghadapi seluruh tantangan usaha bergantung pada kualitas dan kapasitas SDM yang dimiliki. Upaya untuk memiliki SDM yang berkualitas dan profesional dilakukan oleh Manajemen PIDC melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara *in house* maupun bekerjasama dengan lembaga lain. Sehingga diharapkan PIDC mampu memiliki keunggulan bersaing. Bentuk pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain meliputi program pendidikan karir, pendidikan profesi, ketrampilan, serta berbagai kursus, latihan, penataran, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Sejalan dengan terus tumbuh berkembangnya Perseroan, kebutuhan untuk tata kelola yang kuat dan pengawasan internal yang efektif semakin penting. Perseroan berkomitmen untuk memastikan kerangka ini sesuai dengan tujuan dan diimplementasikan dengan tepat, untuk memastikan manajemen usaha yang bertanggungjawab dan untuk memberikan

kepastian kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perseroan telah menerapkan sistem yang tepat dan sesuai untuk melindungi nilai Perseroan.

Dalam penerapan GCG, dasar yang harus dimiliki adalah komitmen. Hal ini menjadi hal yang mutlak bagi Perseroan sebelum memulai pembangunan implementasi GCG. Untuk itulah, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris memastikan bahwa penerapan GCG dimulai dari *top level management*. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Selama tahun 2021 PIDC melakukan kampanye Program Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi GCG agar menjadi bagian dari kultur PIDC. Selain itu, sosialisasi dan internalisasi *Code of Conduct* terus menerus dilakukan, tidak saja kepada internal PIDC, namun juga kepada *stakeholders* lainnya.

Komitmen Penerapan CSR

Kami menyadari bahwa keberhasilan Perseroan haruslah dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perseroan. Hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perseroan dan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan (*sustainability*) PIDC.

Apresiasi

Keberhasilan Perseroan merupakan hasil dari proses *teamwork* yang solid, bukan saja dari *team* Manajemen, namun juga dari seluruh insan Perseroan yang telah memberikan kontribusi optimal demi keberlangsungan Perseroan. Untuk dapat tumbuh berkelanjutan di masa mendatang, kami membutuhkan

dukungan team Manajemen dan jajaran pegawai yang *excellent*, memiliki karakter, integritas, nilai budaya, profesionalisme, pengalaman, dan kematangan yang diperlukan untuk dapat mengemban tugas dan wewenang dalam menjalankan bisnis.

Berbagai pencapaian yang telah kami lalui, merupakan hal yang sangat luar biasa. Atas nama Manajemen, kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusi yang optimal. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan dukungan penuh. Kami bersama

pegawai yang bekerja dengan semangat kebersamaan menyampaikan terimakasih yang tulus kepada seluruh konsumen dan Pemegang Saham serta regulator atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan Perseroan selama ini. Kami akan terus menyalakan semangat kebersamaan untuk senantiasa menghadirkan layanan terbaik dan tangguh yang bisa Anda banggakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum
Wabarakatuh.

Warahmatullahi

Jakarta 22 September 2022
Atas Nama Direksi



Effendi
Direktur Utama

**PROFIL
PERUSAHAAN**Analisis dan
Pembahasan
ManajemenTanggung
Jawab Sosial
PerusahaanLaporan
Teknologi
InformasiLaporan
Sumber Daya
ManusiaTata Kelola
Perusahaan
Yang BaikLaporan
Keuangan

Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Juli 2022

Dewan Komisaris



M Tukul Harsono
Komisaris Utama

Dewan Direksi



Effendi
Direktur Utama

PROFIL KOMISARIS



M. TUKUL HARSONO

Lahir di Demak pada tahun 1967, kemudian menempuh pendidikan akhir dengan gelar Master Mariner pada Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran.

Mengawali karir sebagai pemimpin yang sangat kompeten pada tahun 2016 di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari sebagai Direktur. Kemudian bergabung dengan PT PELNI (Persero) sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan dari tahun 2016-2017. Pada tahun 2017, menjabat sebagai Direktur Armada PT PELNI (Persero). Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero), yang diadakan pada tanggal 10 Desember 2016, beliau ditunjuk sebagai komisaris utama dari PT PIDC.

**PROFIL
PERUSAHAAN**Analisis dan
Pembahasan
ManajemenTanggung
Jawab Sosial
PerusahaanLaporan
Teknologi
InformasiLaporan
Sumber Daya
ManusiaTata Kelola
Perusahaan
Yang BaikLaporan
Keuangan

PROFIL DEWAN DIREKSI



EFFENDI

Lahir di Tasikmalaya tahun 1962, kemudian menempuh pendidikan pada Universitas Mpu Tantular jurusan Hukum tahun 2002.

Mengawali karir pada tahun 1988 di PT PELNI (Persero) dan pada tahun 2012 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) sebelum bergabung dengan PT PIDC. Tahun 2016, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) hingga saat ini.



ROOSHARDIANTI S.

Kelahiran Jakarta, 23 Januari 1976. Menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia tahun 2000, dan Pendidikan terakhir S2 *Master Of Business Administration* di James Cook University Australia di Singapore lulus tahun 2010.

Bergabung di PT PELNI sejak tahun 2002 sebagai dokter umum yang ditempatkan di Rumah Sakit PELNI. Di tahun 2008 beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan dan Pemasaran di tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan dan Pemasaran. Di tahun 2013 beliau mengawali karirnya sebagai Direksi PT Rumah Sakit PELNI dengan menjabat sebagai Direktur Usaha dan kemudian di tahun 2016 menjabat sebagai Direktur Operasional dan kemudian di tahun 2019 beliau merangkap sebagai Direktur Medis dan Digitalisasi Layanan disamping tugasnya sebagai Direktur Operasional. Di tahun 2021 kini menjabat sebagai Direktur Operasional di PT PIDC.

**PROFIL
PERUSAHAAN**

 Analisis dan
Pembahasan
Manajemen

 Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan

 Laporan
Teknologi
Informasi

 Laporan
Sumber Daya
Manusia

 Tata Kelola
Perusahaan
Yang Baik

 Laporan
Keuangan

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : **PT PELITA INDONESIA DJAYA**

Nama Sebutan : **PT PIDC**

Kantor Pusat : Jl. Let-Jen Soeprpto Komplek Ruko Cempaka Mas Blok Q no 5, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640

Telepon : 021 42883740

Surat Elektronik : www.pidc.co.id

e-mail : corporate@pidc.co.id

Tanggal Berdiri : 29 September 1969

Tanggal Beroperasi : 29 September 1969

Dasar Hukum : Akta Notaris No. 53 tanggal 29 September 1969 Notaris Djojo Muljadi, SH yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Pebruari 1970 dirubah Akta Notaris No. 05 tanggal 13 Desember 2019 Notaris Ida Adiningsih, SH. Di Jakarta dan surat pengesahan dari KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-000242605.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, menjadi Anak Perusahaan PT PELNI (Persero).

Modal Dasar : Rp2.010.000.000,-

Modal Disetor : Rp2.010.000.000,-

Pemegang Saham : 1. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) - 99,50%
2. Yayasan Kesehatan Pesiunan PT PELNI (YKPP) - 0.50%

NPWP : 01.307.708.6-093.000

TDP : 246/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 Tanggal 24 Juli 2018

SIUP : 264/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2018 Tanggal 25 Juli 2018

Jumlah Pegawai : 1.511 orang per 31 Desember 2021

Kegiatan Usaha : a. **Usaha Jasa:** Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*), Jasa Pengawasan dan Pengamanan, *House Keeping*, Jasa Hiburan Band, Jasa Pengelolaan Janitor, *Jasa Manage Services*.
b. **Usaha Komersial:** Pengelolaan Bahan Makanan, *Supplement food*, Air mineral & *Mealbox*, Kendaraan disewakan & Pinisi.
c. **Usaha Jasa Maintenance & IT:** Siskomkap, PELNI TV, *BTS Multioperator*, *Maintenance AHU, AC & Chiler Kapal*, Renovasi dan *Running Repair Kamar mandi, Vending Machine*.
d. **Usaha Jasa Lainnya:** *Driver Service* & Pengadaan Cover Kasur.



P I D D
PELITA SERVICES

KCP CEMPAKA MAS

PELITA INDONESIA DJAYA

05

PELITA SERVICES PELITA SERVICES

PLN

PERSEKUTUAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RI
PT. PLN (PERSERO) Tbk
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10150
Telp. (021) 5200 1000
Fax. (021) 5200 1001
www.pln.co.id

SEKILAS PERUSAHAAN



Dalam rangka menyetatkan Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI), atas persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 4 April 1969 nomor: M.8/4/25 Phb, didirikanlah "Usaha Sampingan" dengan akta pendirian tertanggal 29 September 1969 nomor: 53 yang diperbaiki dengan akta tanggal 24 Nopember 1969 nomor 46 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Februari 1970 yang bernama "PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION" (disingkat PT PIDC).

Pendirian Perusahaan PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION yang modal dasarnya dipisahkan dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. PELNI, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) maka PT. PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi Perusahaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari pendirian PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi perusahaan milik Negara, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1970 tertanggal 23 September 1970 dimana ditetapkan pemisahan sebagian dari kekayaan Negara Republik Indonesia

yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN.PELNI) untuk dipergunakan sebagai penyertaan Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC).

Berdasarkan penelitian ternyata Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang dikehendaki, untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka keluarlah Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984 dimana ditetapkan pengalihan pemilikan dan penguasaan modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, sehingga seluruh modal Negara Republik Indonesia dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) dialihkan pemilikan dan penguasaannya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan selanjutnya PT. PIDC dijadikan anak perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, dimana ditetapkan Kekayaan Negara yang tertanam pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT PIDC) sesuai Surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 88/MK.013/1991 tertanggal 23 Januari 1991 sebesar:

Modal Dasar/Disetor: Rp2.000.000.000,00
Cadangan : Rp233.930.877,46
Jumlah : Rp2.233.930.877,46

Perubahan kekayaan Negara yang tertanam pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT PIDC) dengan Akta Notaris nomor 23 tertanggal 14 Juni 1996 Notaris F.J. Mawati yaitu:

- 10.000 lembar saham istimewa dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,-
- 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,- atau seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham istimewa dan 100.000 (seratus ribu) saham biasa atau sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Dengan masuknya pemegang saham baru yaitu YAYASAN KESEHATAN Pensiunan Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelolaan BUMN tertanggal 12 Mei 1998 Nomor: S-65/M/PBUMN/1998, mengambil sebanyak 10 (sepuluh) saham, maka PT. Pelita Indonesia Djaja Corporation (PT. PIDC) merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 10 April 2001 Notaris SP. Henny Singgih, SH sehingga Modal Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaja Corporation PT. PIDC) menjadi:

- PT PELNI (Persero) sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau bernilai nominal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- YAYASAN KESEHATAN Pensiunan PT PELNI sebanyak 10 (sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah 2010 (dua ribu sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp 2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan terbatas maka PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC) merubah nama menjadi PT PELITA INDONESIA DJAYA berkedudukan di Jakarta dengan Akta Notaris nomor 22 tertanggal 10 September 2001.

PT PIDC merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris nomor 19 tertanggal 17 November 2014 Notaris Dewi Sugina Mulyani, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-11563.40.20.2014 tanggal 24 November 2014. Dan terakhir diubah dengan Akte Notaris No. 05 tanggal 13 Desember 2019, Notaris Ida Adiningsih, S.H. Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari KEMNKUMHAM RI Nomor AHU 0242605. AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019.

Agar tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dari Perusahaan Induk yaitu PT PELNI sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat dibidang transportasi laut maka PT Pelita Indonesia Djaja (PT PIDC) ikut berkiprah membantu Induk Perusahaan (PT PELNI) dalam meningkatkan pelayanannya kepada pengguna jasa PT. PELNI sehingga PT Pelita Indonesia Djaja (PT PIDC) merubah brand image menjadi PELNI SERVICES dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 020/DIR/SK/IX/2014 tanggal 29 September 2014.

**PROFIL
PERUSAHAAN**

 Analisis dan
Pembahasan
Manajemen

 Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan

 Laporan
Teknologi
Informasi

 Laporan
Sumber Daya
Manusia

 Tata Kelola
Perusahaan
Yang Baik

 Laporan
Keuangan

ARTI LOGO PT PIDC



Kubus warna merah, kuning, biru, hijau tersusun melingkar melambangkan gerakan yang DINAMIS PT PIDC dalam mencapai tujuan VISI dan MISI serta semangat Inovasi yang sinergi disemua bidang pelayanan yang tidak terpisahkan dimulai dari hal yang kecil menuju ke yang besar sehingga perusahaan tumbuh dan berkembang dengan cepat dan dapat memberikan nilai tambah ke *Stakeholder*.

Warna Kuning

Melambangkan Intelektualitas kerja serta penuh perhatian dalam merespon kepentingan pelanggan.

Warna Merah

Melambangkan semangat yang Tegas, Kreatif Energik penuh motivasi yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang Prima.

Warna Biru

Melambangkan semangat ekspresi Artistik, kekuatan kerjasama dan komunikatif dengan *stakeholder* sehingga tercipta komunikasi yang nyaman.

Warna Hijau

Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) kepercayaan bagi pelanggan baik internal maupun eksternal.

VISI DAN MISI

VISI



“Menjadi perusahaan penyedia layanan terpadu serta pendukung perkapalan dan pelayaran berbasis teknologi terkemuka di Indonesia”

MISI



- Memberikan layanan berbasis teknologi terbaik.
- Memberikan ketersediaan layanan dan kepuasan pelanggan.
- Melaksanakan tata kelola perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

BUDAYA PERUSAHAAN**UNGGUL**

Pegawai PT Pelita Indonesia Djaya berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai Profesional, Tangguh dan Visioner.

INTEGRITAS

Pegawai PT Pelita Indonesia Djaya harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung nilai-nilai Jujur, Adil, Bertanggungjawab dan Disiplin.

KEBERSAMAAN

Pegawai PT. Pelita Indonesia Djaya merupakan satu tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai Sinergi dan Bersatu.

KEPUASAN PELANGGAN

Pegawai PT Pelita Indonesia Djaya selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai Perhatian, Komitmen dan Mutu.

TANGGAP

Pegawai PT Pelita Indonesia Djaya dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha selalu memperhatikan nilai-nilai Inisiatif, Cepat dan Peduli Kondisi Perusahaan.

NILAI PERUSAHAAN

FAST

Cepat dalam menyediakan informasi dan memberikan layanan kepada pelanggan internal maupun eksternal.

ACCESSIBLE

Memberikan kemudahan dalam segala hal untuk mencapai tujuan bersama, termasuk kemudahan untuk ditemui dalam segala urusan bisnis.

INFORMATIVE

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan secara jelas dan dapat dimengerti baik secara lisan maupun tulisan.

RESPONSIBLE

Bertanggung jawab terhadap segala hal yang telah dilakukan dan dikerjakan termasuk didalamnya menangani risiko yang timbul.

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

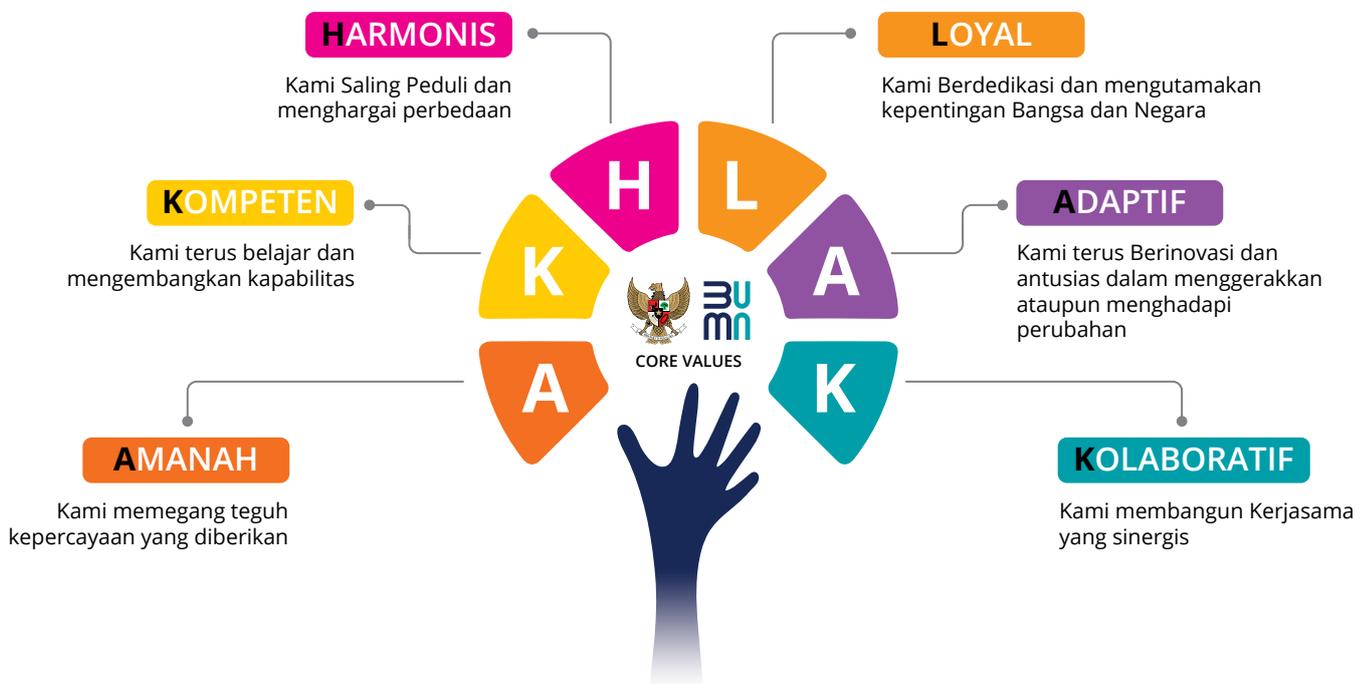
AKHLAK BUMN

Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN dan entitasnya menjadi pemain global dan menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta, maka ditetapkan *Core Values* yang sama untuk seluruh BUMN. PIDC yang merupakan bagian dari PT PELNI (Persero) sebagai salah satu BUMN terkemuka di Indonesia, juga turut menyelaraskan *core values* ini ke dalam budaya perusahaan PIDC yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Budaya perusahaan dikembangkan dari sebuah kumpulan norma-norma, nilai, keyakinan, harapan, asumsi, dan filsafat dari orang-orang yang berada di dalamnya, sejalan dengan visi, misi perusahaan. Budaya perusahaan harus dapat tumbuh menjadi identitas perusahaan yang

mendasari keseluruhan sistem, termasuk mekanisme kontrol, atau mempengaruhi cara berinteraksi di dalam perusahaan maupun para pemangku kepentingan di luar organisasi. Sebuah organisasi akan memiliki arah perkembangan perusahaan yang jelas mengenai akan dibawa kemana sebuah perusahaan ini.

Perilaku dan nilai dari budaya organisasi (AKHLAK) ini diyakini dapat memberikan sebuah *added value* untuk dapat meningkatkan produktifitas kinerja dan profesionalisme perusahaan karena PIDC menjadi mampu untuk dapat bertingkah laku lebih profesional, handal, dan tentunya akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Adapun budaya perusahaan tersebut adalah:



KEGIATAN USAHA

Dalam tahun 2021 Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

CORE BUSINESS



JASA



KOMERSIAL



JASA MAINTENANCE



LAINNYA

UNIT USAHA

1. *Cleaning Service*
2. Pengamanan
3. Janitor
4. Hiburan Band
5. *House Keeping*
6. *Manage Service / Frontliner*

1. Bahan Baku Makanan, *Supplement Food*, Air Mineral dan *Mealbox*
2. Kendaraan Disewakan
3. Pinisi
4. Wisma Bahtera Tretes

1. Siskomkap
2. Bts Multi Operator
3. *Maintenance Ahu, AC & Chiler Kapal*
4. *Renovasi & Running Repair Kamar Mandi*
5. *Vending Machine*

1. *Driver Services*
2. *Cover Kasur*
3. Tenaga Kerja Bongkar Muat (Tkbm)

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan dan inisiatif terkait dengan usaha perusahaan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Jasa, terdiri dari:

- **Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan**

Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

1. Kontrak dengan PT. PELNI (Persero) dalam rangka peningkatan keamanan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan di atas kapal-kapal Pelni sesuai Kontrak nomor: TH.09.01-01/SS/2021 tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021 rincian petugas Pengawasan dan Pengamanan sbb:
 - Pengamanan Darat berlokasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Persemat Tanjung Priok, Galangan Surya Surabaya berjumlah 170 orang
 - Receptionist Kantor Pusat berjumlah 2 orang
 - Pengamanan Laut di kapal sebanyak 147 orang sbb:
 - Satpam Data Center 3 Orang
Tipe 2000: KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Dobonsolo, KM. Bukit Siguntang, KM. Gunung Dempo dan KM. Dorolonda KM. Labobar
Tipe 1000: KM. Kelimutu, KM. Lawit, KM. Tatamailau, KM. Sirimau, KM. Awu, KM. Leuser, KM. Binaiya, KM. Bukit Raya dan KM. Tilongkabila
Tipe 500: KM. Pangrango, KM. Sangiang dan KM. Wilis Tipe Ro-Ro: KM. Egon, JetLiner.
2. Kontrak dengan Wisma Bahtera Pelni Cipayung, sesuai kontrak nomor: 111/SPK/HBI/XI/2019 dengan jumlah tenaga pengamanan sebanyak 4 orang berlaku sampai Dengan 31 Oktober 2020.

- **Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service)**

Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kebersihan (Cleaning Service). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT. PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Kontrak Nomor: TH.06.30-01/SS/2021 tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 untuk Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) pada 26 (dua puluh enam) kapal penumpang PT. PELNI (Persero) sebanyak 320 orang petugas yaitu melaksanakan pekerjaan jasa pelayanan kebersihan, kerapihan dan higienisasi di ruang kelas ekonomi dan kamar mandi kelas ekonomi untuk kapal:
 - a) (satu) kapal tipe 3000 yaitu KM. Labobar, jumlah petugas kebersihan sebanyak 19 orang.
 - b) 11 (sebelas) kapal tipe 2000 yaitu KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang KM. Lambelu, KM. Sinabung, KM. Dorolonda, KM. Gunung Dempo, KM. Nggapulu, KM. Ciremai, KM. Dobonsolo dan KM. Kelud, masing-masing jumlah petugas kebersihan sebanyak 16 orang.
 - c) 9 (sembilan) kapal tipe 1000 yaitu KM. Bukit Raya, KM. Binaiya, KM. Leuser KM. Lawit, KM. Awu, KM. Tilongkabila, KM. Sirimau KM. Tatamailau, dan KM. Kelimutu, masing-masing jumlah petugas kebersihan sebanyak 10 orang.
 - d) 5 (lima) kapal tipe 500/RoRo yaitu KM. Sangiang, KM. Pangrango, KM. Wilis, KM. Egon, dan KFC. Jetliner, masing-masing jumlah petugas kebersihan sebanyak 6 orang.
2. Kegiatan usaha yang menyediakan pelayanan dan pemeliharaan kebersihan, kerapihan, higienisasi di Gedung Kantor PT. PELNI (Persero) :
 - a) Kantor Pusat sesuai kontrak nomor TH.09.22-02/SS/2020 tanggal 1 September 2020, berakhir 31 Agustus 2021 dengan tenaga *cleaning service* 31 orang.

- b) Kantor Cabang PT. Pelni Surabaya sesuai kontrak nomor: TH.12.15-03/SS/2020 tanggal 01 Januari 2021, berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 8 orang.
 - c) Kantor Cabang PT. Pelni Makassar sesuai kontrak nomor: TH.12.15-03/SS/2020 tanggal 01 Januari 2021, berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 6 petugas.
 - d) Kantor Cabang Tanjung Priok sesuai kontrak nomor: TH.12.15- 03/SS/2020 tanggal 01 Januari 2021, berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 4 orang.
 - e) Kantor PT. Pelni Kemayoran sesuai kontrak nomor: TH.12.15- 03/SS/2020 tanggal 01 Januari 2021, berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 3 orang.
 - f) Jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor PT PELNI (Persero) di 14 (Empat Belas) cabang dengan kontrak nomor TH.12.23- 02/SS/2020 tanggal 1 Januari 2021, berakhir 31 Desember 2021 dengan tenaga cleaning service 19 orang.
3. Pemeliharaan kebersihan dan perawatan taman gedung Kantor Pusat PT. PELNI dengan kontrak nomor: TH.03.18-01/SPK/2020 tanggal 01 April 2020 dan berakhir sampai dengan 31 Maret 2021 sebanyak 2 orang.
- **Usaha Jasa Pengelolaan Kasur**
Usaha Jasa Pengelolaan Kasur adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga untuk mengelola, merawat kasur di atas kapal penumpang PT. Pelni (Persero). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT. PELNI (Persero) sesuai kontrak nomor: TH.06.11-04/SS/2021 tanggal 1 Januari 2021 berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 pada 24 (dua puluh empat) kapal penumpang PT. PELNI (Persero) meliputi membersihkan dan memasang kasur pada setiap dek kelas Wisata/Ekonomi, mengontrol jumlah kasur dan menjaga kondisi kasur agar tetap dalam keadaan baik, dengan jumlah petugas kasur yang ditempatkan di atas kapal sebanyak 57 orang sbb:
 - KM. Labobar, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Sinabung, KM. Dorolonda, KM. Gunung Dempo, KM. Nggapulu, KM. Umsini, KM. Ciremai, KM. Dorolonda dan KM. Kelud dengan tenaga masing-masing 3 orang.
 - KM. Binaiya, KM. Leuser, KM. Lawit, KM. Awu, KM. Bukit Raya, KM. Tilongkabila, KM. Sirimau, KM. Tatamailau dan KM. Kelimutu dengan tenaga masing-masing 2 orang.
 - KM. Wilis, KM. Sangiang dan KM. Pangrango dengan tenaga masing-masing 1 orang.
 - **Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor**
Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor adalah Usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga Janitor. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT. PELNI (Persero),
 1. Kegiatan usaha yang menyediakan tenaga Janitor di Gedung Kantor PT PELNI sesuai kontrak nomor: TH.11.20-03/SS/2020 tanggal 1 Desember 2020 berakhir tanggal 30 November 2021 dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan diantaranya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur dan memberikan pelayanan kepada Pegawai PT. PELNI (Persero) dengan jumlah tenaga Janitor 35 orang.
 2. Kegiatan usaha yang menyediakan tenaga Janitor di Kantor Cabang PT. PELNI, sesuai kontrak nomor: TH.12.29-01/SPK/2020 tanggal 1 Januari 2021 berakhir tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan diantaranya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur dan memberikan pelayanan kepada Pegawai PT. PELNI (Persero) dengan jumlah tenaga Janitor 11 orang.
 - **Usaha Jasa Manage Service, DCS, Contact Center dan Laporan Perjalanan serta Jurnal Harian Kapal.**
Usaha Jasa Manage Service Embarkasi/ Debarkasi dan Frontliner, DCS, Contact Center dan Laporan Perjalanan serta

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

Jurnal Harian Kapal, di Cabang- Cabang PT PELNI:

1. Manage Servis HB Cipayung, Surat Keputusan Nomor 002/SPK/HB/2/2020 tanggal 01 Maret 2020 berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan jumlah petugas sebanyak 25 orang.
2. Pekerjaan *Handling Control Center* di PT PELNI (Persero) dengan kontrak No: TH.01.29-04/SPK/2021 tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
3. Jasa layanan tiket kapal PT PELNI (Persero) dengan kontrak No: TH.01.29-01/SS/2021 tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
4. SDM *Contact Center* dengan PT SBN dengan Kontrak No. SBN/AGR/01.01-01/2021 tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
5. Pelayanan embarkasi/debarkasi dan Frontliner di kantor cabang PT PELNI (Persero) dengan kontrak TH.01.18-02/SS/2021 tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
6. Layanan *Departure Control System (DCS)* dan Admin emploi dengan kontrak TH.01.18-03/SS/2021 tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
7. Layanan input data laporan perjalanan dan jurnal harian kapal dengan kontrak No: TH.12.21-01/SPK/2020 tanggal 1 Januari 2021 berakhir tanggal 31 Desember 2021.
8. Jasa entry data di PT PELNI (Persero) dengan kontrak TH.11.13/02/SPK/2020 tanggal 1 November 2020 sampai dengan 30 April 2021, dan nomor kontrak TH.05.25-01/SPK/2021 tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2021.
9. Jasa pemeliharaan dan perawatan taman di Gedung Kantor Pusat PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH.03.18-01/SPK/2020 tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 dan nomor kontrak TH.04.01-01/SPK/2021 tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022.
10. Pekerjaan penyediaan jasa *driver* PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH/11.16-01/SS/2020 tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021.
11. Pengadaan Kasur ekonomi untuk kapal penumpang PT PELNI (Persero) dengan Berita Acara Negosiasi: 05.18/03.A/BA/2021 tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
12. Pekerjaan Jasa Teknisi PT PELNI Cab Surabaya dengan kontrak 11.18/02/SPL/095/2020 tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
13. Pekerjaan Jasa Teknisi PT PELNI Cab Pontianak dengan surat pengadaan langsung nomor 10.16/01/SPL/095/2020 tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021.
14. Pengadaan tenaga kerja atau jasa layanan pemulasaraan jenazah, supir ambulans, dan teknisi Gedung dengan nomor kontrak SPPB/21/08/006 tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
15. Pekerjaan pelayanan jasa bongkar muat di Perusahaan Sarana Bandar Nasional dengan nomor kontrak SBN/AGR/06.05-01/2020 tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2021 dan nomor kontrak SBN/AGR/02.16-01/2021 tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2022.
16. Jasa manage service untuk administrasi di divisi pengelolaan bahan bakar dengan nomor kontrak 10.19/01/BA/035/2020 tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2021.

2. Kegiatan Usaha Komersial

- **Usaha Permakanan**

Usaha Permakanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan bahan makanan penumpang dan awak kapal. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) nomor: TH.05.03-01/SS/2021 tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 yaitu:

1. Tipe 3000: KM. Labobar
2. Tipe 2000: KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu, dan KM. Gunung Dempo.

3. Tipe 1000: KM. Bukit Raya, KM. Binaiya, KM. Leuser, KM. Lawit, KM. Awu, KM. Tilongkabila, KM. Ciremai, KM. Sirimau, KM. Tatamailau, KM. Dobonsolo, KM. Kelimutu.
4. Tipe 500: KM. Pangrango, KM. Sangiang dan KM. Wilis.
5. Tipe Roro: KM. Egon.

- **Usaha Sewa Kendaraan Dinas**

Usaha Sewa Kendaraan Dinas adalah usaha yang bergerak di bidang penyewaan mobil dinas atas menyediakan kendaraan dinas untuk PT PELNI kantor pusat, cabang-cabang PT PELNI dan PT SBN dengan jumlah unit di tahun 2021 sebanyak 89 unit. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

1. Sesuai kontrak dengan PT PELNI (Persero) nomor TH.06.10-02/SS/2021 tanggal 10 Juni 2021, kontrak berlaku terhitung sejak 11 April 2021 sampai dengan 10 April 2022. Tentang Pengadaan sewa kendaraan operasional cabang sebanyak 18 unit, (12 unit Toyota innova G M/T 2.0 tahun 2015 dan Toyota innova G2.0 Q A/T venturer tahun 2020) yaitu pekerjaan jasa penyewaan kendaraan dinas untuk kantor pusat dan cabang PT.PELNI (Persero).
2. Pekerjaan sewa kendaraan dinas operasional cabang PT PELNI (Persero) sebanyak 15 unit (Toyota Avanza 1,3G M/T tahun 2017) sesuai dengan nomor kontrak kerjasama TH.08.11-01/SS/2020 terhitung sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2021.
3. Sesuai Kontrak nomor: SBN/AGR/05.26-16/2019 tanggal 26 Mei 2019 dan berakhir tanggal 25 Mei 2021 tentang Pengadaan sewa menyewa kendaraan operasional PT SBN yaitu 3 unit mobil Pajero Sport Dakar 4x2 2.5 L A/T Tahun 2019.
4. Sesuai kontrak Nomor TH/05.08-03/SS/2020 tanggal 10 April 2020 dan Berakhir tanggal 10 April 2021. Tentang pekerjaan sewa kendaraan dinas di kantor pusat PT PELNI (Persero), yaitu 3 unit Toyota Vios G A/T 1.5 Tahun 2015, 12 unit Toyota Innova G M/T 2.0 Tahun 2015 dan 6 unit Toyota Innova 2.0 Q A/T Venturer Tahun 2020.

5. Sesuai kontrak nomor TH.09.10-02/SS/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 9 Oktober 2021. Tentang pekerjaan sewa kendaraan dinas Direksi PT PELNI (Persero), yaitu 6 unit Toyota Camry Hybird 2.5 A/T Tahun 2019 dan 1 unit Toyota Alphard Tahun 2018.
6. Sesuai kontrak Nomor TH. 09.10-01/SS/2018 tanggal 10 September 2018 dan Berakhir tanggal 10 Oktober 2021. Tentang pekerjaan sewa 9 unit kendaraan untuk operasional kantor cabang PT PELNI (Persero), yaitu 9 unit Toyota Avanza G 1,3 M/T Tahun 2018.
7. Sesuai kontrak nomor TH.9.4-01/SS/2018 tanggal 4 September 2018 dan berakhir tanggal 8 Juli 2021. Tentang pekerjaan sewa 16 unit kendaraan untuk operasional kantor cabang PT PELNI (Persero) yaitu 16 unit Toyota Veloz 1,5 M/T Tahun 2015.
8. Penyewaaan 2 (dua) unit kendaraan truck hino louhan dan truck hino colt diesel untuk kendaraan operasional Gudang presmat tanjung priok PT PELNI (Persero) sesuai nomor kontrak TH.11.10-SS/2020 terhitung sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2021.
9. Penyewaaan 4 unit kendaraan Mitsubishi Expander dengan PT. Artdeco Sejahter, 4 unit Kendaraan Mitsubishi Expander dengan PT Alif, 7 Unit Kendaraan Mitsubishi Expander dengan Jamkrindo.

- **Usaha Sewa Pariwisata Kapal Pinisi**

Sebagai tindak lanjut program tahun 2020 mengenai pengembangan usaha dalam bidang usaha wisata, PT PIDC merealisasikan pengadaan kapal Pinisi untuk menunjang bisnis PT PIDC dibidang pariwisata, yang diresmikan pada tanggal 23 Juli 2019 di Tanjung Bira, Bulukumba dan Sulawesi Selatan. Adapun Paket Wisata yang di tawarkan adalah sebagai berikut:

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

No.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	1 Hari (Fullday)	1. Pulau Komodo 2. Pulau Padar 3. Pulau Pink 4. Snorkeling
2.	2 Hari 1 Malam	1. Pulau Bidadari 2. Pulau Komodo 3. Pulau Kalong Rinca 4. Snorkeling
3.	3 Hari 2 Malam	1. Pulau kalong rinca 2. Pulau rinca 3. Pulau kelor 4. Pulau komodo 5. Pulau padar 6. Pantai pink 7. Gili laba 8. Snorkeling
4.	4 Hari 3 Malam	1. Pulau kalong rinca 2. Pulau rinca 3. Pulau kelor 4. Pulau komodo 5. Pulau padar 6. Pantai pink 7. Gili laba 8. Snorkeling 9. Pulau Sembilan 10. Maint point

3. Jasa Maintenance terdiri dari:

- Pengadaan Suku Cadang *Nozzle Element Motor* Induk KM. Umsini No. Kontrak: 12.29/03/SPL/095/2020.
- Pengadaan Suku Cadang *Exhaust Valve Seat Insert Motor* Induk KM. Bukit Raya No Kontrak: 01.06/01/SPL/095/2021.
- Pengadaan Suku Cadang *Nozzle Element Motor* Induk KM. Sirimau No. Kontrak: 01.08/05/SPL/095/2021.
- Pengadaan Suku Cadang *Exhaust Valve Seat Insert Motor* Induk KM. Sirimau No. Kontrak: 01.08/04/SPL/095/2021.
- Pengadaan Kamar Mandi Dek 3,4,5, & 6 KM. Dorolonda No. Kontrak :01.08/03.A/BA/2021.
- Sekat Tempat Tidur KM. Sinabung, KM. Labobar & KM Egon No. Kontrak: 01.14/01.A/BA/2021.
- Sekat Tempat Tidur KM. Dorolonda & KM Nggapulu No. Kontrak 01.08/03.A/BA/2021.
- Reefer Container* 2 Unit KM. Sirimau No. Kontrak 02.10/02.A/BA/2021.
- Plafon Kamar Mandi *Deck 2 s/d 5* KM. Tidar No. Kontrak 02.16/01.A/BA/2021.
- Sekat KM. GN Dempo, KM. Kelud, KM. Dobonsolo, KM. Ciremai No. Kontrak 03.03/03.A/BA/2021.
- Sekat KM. Binaiya, KM. Lambelu, KM. Bukit Siguntang No. Kontrak 03.09/02.A/BA.202123.
- Reefer Container KM Egon No. Kontrak: 03.19/04.A/BA/2021.
- Kran *Wastafel* KM. Umsini No. Kontrak: 03.08//01.A/BA.2021.
- Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Plafon Kamar Mandi KM. Umsini No. Kontrak: 04.12/04.A/BA/2021.
- Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Boiler KM. Lambelu No. Kontrak: 04.14//03.A/BA/2021.
- Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Fresh Water Cooler High* Temperatur Motor Bantu No. 1 KM. Sirimau No. Kontrak: 05.05/02.A/BA/2021.
- Pengadaan Barang dan Jasa Macgregor Palka KM. Tidar No. Kontrak: 05.20/01.A/BA/2021.

18. Perbaikan *Cargo Crane* 1 KM. Caraka Jaya Niaga III-22 No. Kontrak: 05.24/01/BA-B/031/2021.
19. Perbaikan *Cargo Crane* 2 KM. Caraka Jaya Niaga III-22 No. Kontrak: 05.24/02/BA-B/031/2021.
20. Perbaikan *Cargo Crane* 3 KM. Caraka Jaya Niaga III-22 No. Kontrak: 05.24/03/BA-B/031/2021.
21. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan 2 Unit *Reefer Container* KM Awu No. Kontrak: 06.04/03.A/BA/2021.
22. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Palka Macgragor KM. Tilongkabila No. Kontrak: 06.03/01.A/BA/2021.
23. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Preheater Kanan & Kiri KM. Ciremai No. Kontrak: 06.11/02.A/BA/2021.
24. Pengadaan Suku Cadang Motor Induk KM. Sangiang No. Kontrak: 06.15/01/BA/031/2021.
25. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Motor Bantu No. 1 KM. Logistik Nusantara 1 No. Kontrak: 06.18/02.A/BA/2021.
26. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Condensor* Mesin Es KM. Sirimau No. Kontrak: 06.30/01.A/BA/2021.
27. Pengadaan Suku Cadang *Exhaust Valve Seat Insert Motor* Induk KM. Bukit Raya No. Kontrak: 07.26/01/BA/031/2021.
28. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan FO Separator Kanan KM. Ciremai No. Kontrak: 08.31/02.A/BA/2021.
29. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Reefer Container* Kanan KM Tatamailau No. Kontrak: 08.24/02.A/BA/2021.
30. Penawara Harga Pekerjaan Perbaikan 6 Unit Kamar Mandi Dek 2 KM. Dorolonda No. Kontrak : 09.07/02.A/BA/2021.
31. Pengadaan Barang dan Jasa Deck Crane Kiri KM Tidar No. Kontrak: 08.25/05.A/BA/2021.
32. Pengadaan Perbaikan Kamar Mandi KM. Tidar No. Kontrak: 09.20/03.A/BA/2021
33. Pengadaan Perbaikan Kamar Mandi KM. Bukitraya No. Kontrak: 09.27/03.A/BA/2021.
34. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Kelas dan Kamar Mandi Ekonomi KM. Sirimau No. Kontrak: 09.29/02.A/BA/2021.
35. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Kelas, Kamar Mandi Ekonomi dan Fasilitas di KM. Lawit No. Kontrak: 09.27/02.A/BA/2021.
36. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi Deck 2 KM. Leuser No. Kontrak: 09.30/04.A/BA/2021.
37. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi KM. Umsini No. Kontrak: 10.04/01.A/BA/2021.
38. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi dan Vinyl KM. Tatamailau No. Kontrak: 10.16/04.A/BA/2021.
39. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan 5 Unit Kamar Mandi Deck 2 KM. Awu No. 24 Kontrak: 10.16/03.A/BA/2021.
40. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan AHU 9,10&11 KM. Sirimau No. Kontrak: 10.12/05.A/BA/2021.
41. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Reefer Container* Kanan KM. Awu No. Kontrak: 21.10/04.A/BA/2021.
42. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan FO Separator No. 1 & 2 KM. Leuser No. Kontrak: 10.26/01.A/BA/2021.
43. Pekerjaan Perbaikan Fasilitas Layanan Penumpang KM. Binaiya No. Kontrak: 10.26/05/BA/031.A/2021.
44. Sekrap KM. Umsini No. Kontrak: 10.26/06/BA/031.A/2021.
45. Lampu Penerangan Dek 5 Belakang KM. Kelimutu No. Kontrak: 10.26/07/BA/031.A/2021.
46. Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemasangan *USB Power Charger* Ruang Penumpang Ekonomi KM. Kelimutu No. Kontrak: 11.05/01/BA/031.A/2021.
47. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi KM. Kelud No. Kontrak: 11.03/02.A/BA/2021.
48. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Fresh Water Cooler High Temperature* Motor Bantu No 3 & 4 KM. Sirimau No. Kontrak: 10.27/02.A/BA/2021.
49. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Ruang Pantry dan Informasi Deck 4 KM. Kelimutu No. Kontra: 11.12/02.A/BA/2021.
50. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Exhaust Blower* AC No. 4,5,15 dan 17 KM. Dorolonda No. Kontrak: 11.06/06.A/BA/2021.
51. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Reefer Container* Daging KM. Egon No. Kontrak: 11.17/01.A/BA/2021.
52. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Exhaust Blower* E 1, E 2, E 6, E 8, E 9 dan E 11 KM. Kelimutu No. Kontrak: 11.17/06.A/BA/2021.

PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

53. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi Deck 5, 6 dan 7 KM. Leuser No. Kontrak: 11.18/05.A/BA/2021.
54. Penawaran Harga Perbaikan Instalasi Pipa Separator FO & LO KM. Caraka Jaya Niaga III-22 No. Kontrak: 11.30/01.A/BA/2021.
55. Penawaran Separator FO Kanan KM. Tidar No. Kontrak: 12.21/03.A/BA/2021.

4. Jasa IT terdiri dari:

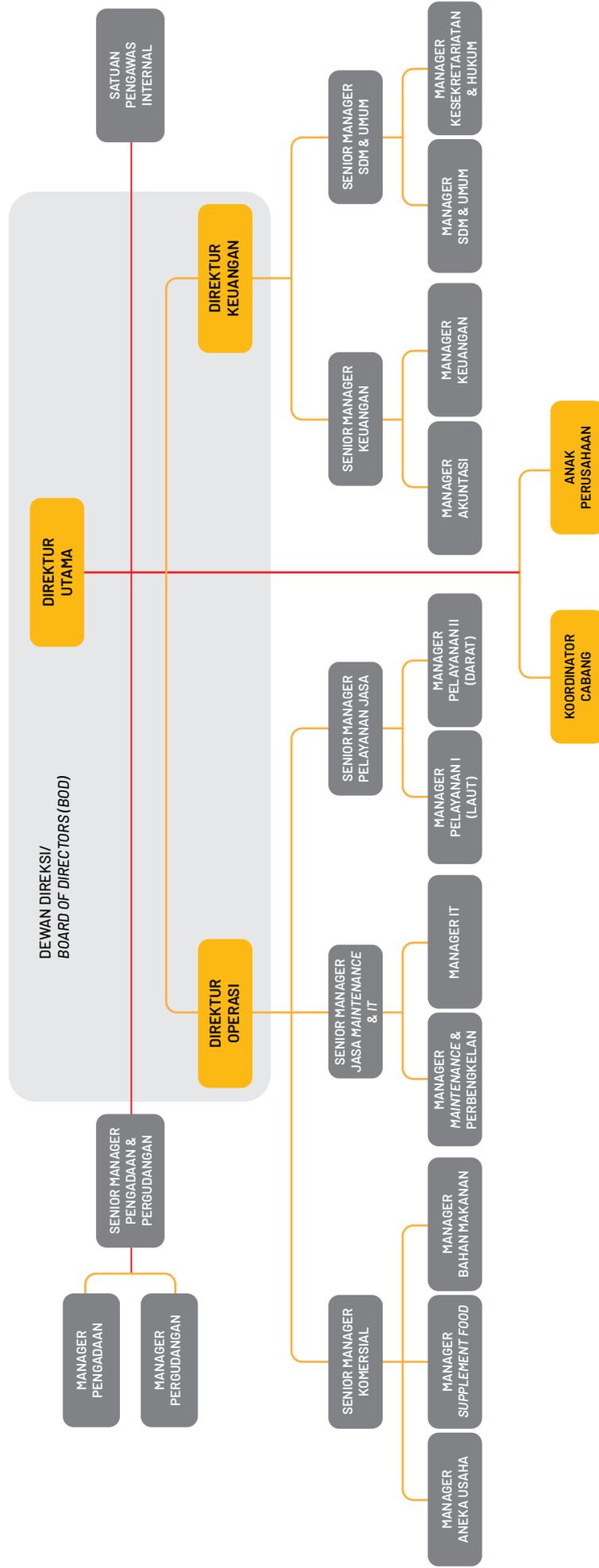
1. Sesuai kontrak nomor kontrak nomor: TH.04.26-05/SS/2021 tanggal 26 April 2021 yaitu menyediakan layanan sistem komunikasi diatas 26 kapal penumpang PT PELNI (Persero), dengan ukuran jaringan layanan sistem komunikasi dengan minimum *bandwidth* (kbits=kilo bits per second) *upstream* 1024 Kbps, *dwonstream* 2048 Kbps, dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun terahitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Sesuai kontrak nomor: TH.07.15-01/SS/2021 terhitung sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 30 September 2021, dengan lingkup pekerjaan menyediakan aplikasi perangkat *vending machine* yang ditempatkan di cabang Belawan, Bau-bau, Balikpapan, Benoa/Denpasar, Batam, Tj Balai Karimun, dan Tj Pinang.
3. Pekerjaan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic (OSP-FO)* dengan nomor kontrak kerjasama 10.26/PKS/DIR/001/100/2020 dan 031/WGS-PKS/IX/2020 terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2021, dengan rincian pekerjaan menyediakan perlengkapan alat-alat kerja untuk menunjang pekerjaan pemasangan *Out Side Plant Fiber Optic (OSP-FO)* sesuai dengan standar yang telah disepakati.
4. Pengadaan Layanan akses internet di Kapal PT PELNI (Persero) dengan nomor 25 surat perintah kerja 02.26/SPK/DIR/004/100/2021 dengan lingkup pekerjaan menyiapkan layanan jaringan internet (*Lease Line*) dengan spesifikasi *Upstream* 64 Kbps dan *Dwonstream* 128 Kbps.

5. Kegiatan Usaha Jasa Lain-Lain

- Tenaga Kerja Bongkar Muat di Gudang Presmat Tanjung Priok dengan nomor kontrak TH.11.18-01/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Penyedia jasa *driver* PT PELNI (Persero) dengan kontrak No: TH.11.16- 01/SS/2020.
- Usaha yang bergerak di bidang PerWismaan & *Outbond* yaitu Wisma Bahtera Tretes Jawa Timur dengan fasilitas 8 (delapan) bungalow dan 1 *meeting room*.

Struktur Organisasi
PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PIDC)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 09.30/DIR/SK/001/100/2020
Tanggal : 30 September 2020



PROFIL PERUSAHAAN

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Teknologi Informasi

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

Organisasi Entitas Anak Perusahaan

- a. PT Pelita Bandar Nasional
 PT. PELITA BANDAR NASIONAL (PT. PBN) adalah anak perusahaan PT PIDC yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1989 dengan Akta Pendirian nomor 19 tertanggal 28 Juni 1989 Notaris Atmadji, SH diubah dengan Akta No. 30 tanggal 25 Oktober 2010 Notaris Tosin, SH dan terakhir diubah dengan No. 5 tanggal 21 November 2017 notaris Z. Amrozi Johar, SH.

Organisasi PT. Pelita Bandar Nasional (PT.PBN) dipimpin oleh seorang Direktur sebagai penanggung jawab pengelolaan perusahaan dan membawahi atas unit kerja:

- Bagian Terminal
- Bagian Keuangan

- b. PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya
 PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia (PT PANI) Dengan mempertimbangkan POJK No. 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi pasal 56 ayat 1 bahwa Ekuitas PT. PANI minimal Rp2.000.000.000,-

Mempertimbangkan pada hasil kajian KJPP Syarif, Endang dan Rekan nomor 0004/2.113-03/BS-FS/05/03401/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Laporan Kajian Kelayakan Bisnis PT. Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya, dengan pendapat Usaha Pialang Asuransi pada PT. Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya disimpulkan bahwa Perusahaan tidak layak untuk di pertahankan.

Berdasarkan aprisal Owner Estimate dengan metode pendekatan Price Book Value (PBV), rekomendasi KJPP dan mempertimbangkan untuk mencegah kerugian PT. PIDC selaku induk secara terus menerus, menjaga nama baik dan reputasi perusahaan dari sanksi yang diberlakukan oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berakibat pencabutan ijin usaha PT. PANI serta sanksi Blacklist dari Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun.

Dan berdasarkan surat dari Dewan Komisaris PT. PIDC kepada Direktur utama PT.PIDC (selaku pemegang saham mayoritas

PT. PANI) nomor 06.08/01/B/DK.PIDC/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Persetujuan Pengalihan Kepemilikan Saham Entitas Anak Usaha PT. Pialang Asuransi Nasional Indonesia Djaya (PT.PANI).

Dan berdasarkan pengesahan Notaris Abdul Jumin, SH.,MKn nomor 116/WAR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 atas Perikatan Penjualan Saham Perseroan Terbatas antara Pemegang Saham Mayoritas kepada Pemegang Saham Minoritas PT. Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya tanggal 11 Juni 2021. Para pihak menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA (PT. PIDC) telah setuju untuk menjual seluruh kepemilikan saham kepada PIHAK KEDUA (PT. PANI) dan PIHAK KEDUA setuju untuk membeli saham dari PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian jualbeli saham sebanyak 2.850 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp2.850.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Kronologis pencatatan saham

Sampai dengan tahun 2021, Perusahaan belum mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.







2

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tahun 2021, di tengah volatilitas kondisi perekonomian global serta kondisi new normal pandemi COVID-19, PT PIDC tetap dapat menjaga kesinambungan bisnis dan manajemen pengelolaan Perseroan melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten, sehingga performa profitabilitas PT PIDC tetap terjaga cukup baik.

KINERJA BISNIS PT PIDC MASIH TERJAGA CUKUP BAIK MESKI DALAM SITUASI PANDEMI

Sepanjang tahun 2021, PT PIDC tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja bisnis yang cukup baik, meski mengalami penurunan pada beberapa segmen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena Perseroan turut terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di 2020.

Capaian pertumbuhan kinerja bisnis yang tergolong masih cukup baik tidak terlepas dari upaya PT PIDC untuk terus fokus menjalankan bisnis utama Perseroan dan melakukan implementasi kebijakan strategis terkait pengelolaan biaya yang tepat dan efisien.

Analisis bisnis dan manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT PIDC untuk periode 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Di tahun 2021, di tengah *volatilitas* kondisi perekonomian global serta kondisi kenormalan baru pandemi COVID-19, PT PIDC tetap dapat menjaga kesinambungan bisnis dan manajemen pengelolaan Perseroan melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten, sehingga performa profitabilitas PT PIDC tetap terjaga cukup baik.

Kondisi Ekonomi Global dan Nasional

Sebagaimana kita ketahui Bersama, pandemi COVID-19 adalah bencana yang bersifat global, yang mengakibatkan permasalahan besar tidak hanya dibidang kesehatan, namun juga menimbulkan permasalahan dibidang ekonomi, karena hampir diseluruh negara di dunia di sepanjang tahun 2021 ini mengalami kontraksi yang cukup dalam pada bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap penurunan aktivitas perekonomian global secara drastis, sehingga menimbulkan resesi di hampir semua negara di dunia.

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan sangat serius bagi prospek makro ekonomi global. Terlebih volatilitas pasar meningkat cukup tinggi, dikarenakan meningkatnya kekhawatiran investor.

Pandemi COVID-19 memang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap perekonomian global. Berbagai indikator yang ada menunjukkan, bahwa aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi di banyak negara tertekan tajam, sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan internasional.

Tekanan berat terjadi pada pasar keuangan, yang diakibatkan oleh ketidakpastian prospek ekonomi global. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan berisiko memberikan dampak rambatan pada stabilitas sistem keuangan.

Dilakukannya berbagai upaya pada sektor kesehatan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi, sehingga kemudian berdampak merugikan bagi pertumbuhan ekonomi maupun pasar keuangan global.

Dari sisi ekonomi global memang berkontraksi secara tajam, terutama pada semester I 2020. Kemudian, kondisi ekonomi perlahan mulai membaik pada semester II 2020. Hal ini didorong oleh kemajuan penanganan COVID-19, peningkatan mobilitas manusia, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegrasi antar otoritas di berbagai negara.

Perbaikan ekonomi dunia memang didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Dengan perkembangan tersebut, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh di kisaran 5,0% pada tahun 2021, setelah berkontraksi 3,8% di tahun 2020.

Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan akan sangat dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

Perbaikan ekonomi global tersebut akan mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sesuai prakiraan sebelumnya.

Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan menurun didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global seiring dengan ketersediaan vaksin, di tengah kondisi likuiditas global yang besar, suku bunga rendah dan tren pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (*c-to-c*) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi

Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Sesuai dengan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa sepanjang tahun 2020 Indonesia mengalami Pertumbuhan Negatif sebesar Minus 2,07%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini baru dialami Indonesia dalam 20 tahun terakhir sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut, hampir seluruh dunia usaha di Indonesia mengalami penurunan.

Covid-19 memberikan tekanan kuat pada perekonomian Indonesia pada 2020, dengan sumber utama gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana terjadi di global, gejolak bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian merambat ke permasalahan ekonomi.

Respon cepat Pemerintah untuk menahan penyebaran COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berdampak pada penurunan kinerja perekonomian. Kebijakan tersebut telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa.

Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan. Itu pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam.

Tinjauan Kinerja

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim bisnis di tanah air sebagaimana telah diurai diatas. Sama seperti entitas bisnis lainnya, PT PIDC juga sangat terdampak dari kondisi memburuknya situasi ekonomi nasional dikarenakan pandemi Covid-19.

Namun demikian, meski menghadapi situasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang sangat tidak kondusif tersebut, PT PIDC ternyata tetap mampu menghasilkan kinerja bisnis yang masih relatif cukup baik di sepanjang tahun 2021.

Portofolio bisnis Perseroan secara umum di tahun 2021 tetap mampu bertumbuh dengan cukup baik, meskipun untuk beberapa segmen tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan terjadi

Kinerja Perusahaan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp5.165 juta atau 68,11% dari Anggarannya sebesar Rp24.424 Juta dan mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 78,85%.

Penurunan terjadi baik dari sisi produksi, pendapatan dan laba bersih konsolidasi. Hal ini dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 terutama di kuartal 1 di mana ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Larangan memasuki di beberapa Pelabuhan dan pengurangan kapasitas jumlah penumpang sampai 50%.

Posisi keuangan Konsolidasian PT PIDC dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta dan Laporan Arus Kas PTPIDC dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp33,950 juta.

Tinjauan Segmen Usaha

PT PIDC adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung perusahaan Induk yaitu PELNISERVICES untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa PT PELNI dalam pelaksanaannya berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perusahaan menjalankan 4 segmen usaha dan memiliki 2 anak usaha. Segmen usaha yang dijalankan oleh Perusahaan adalah:

1. Usaha Jasa:

- *Cleaning Service*
- Pengamanan
- Janitor
- Hiburan Band
- *House Keeping*
- *Manage Service/Fronliner*

2. Usaha Komersial:

- Bahan Baku Makanan, *Supplement Food*, Air Mineral dan *Mealbox*
- Kendaraan Disewakan
- Pinisi

3. Usaha Maintenance:

- Siskomkap
- Bts Multi Operator
- *Maintenance Ahu, AC & Chiler Kapal*
- *Renovasi & Running Repair Kamar Mandi*
- *Vending Machine*

4. Usaha Penunjang:

- *Driver Services*
- Cover Kasur
- Tenaga Kerja Bongkar Muat (Tkbm)

Laporan Laba (Rugi) Perusahaan per 31 Desember 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	URAIAN	TAHUN 2020 REALISASI AUDITED	TAHUN 2021					
			RKAP	PRAGNOSA	REALISASI AUDITED	CAPAIAN (%) 7=(6/4)	DEVIASI (%) 8=(6-5)/5	TREND (%) 9=(6/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENDAPATAN USAHA							
A	PENDAPATAN USAHA SENDIRI							
1	Usaha Jasa	100,149	101,674	103,205	95,954	94.37	(7.03)	95.81
2	Usaha Komersial	186,614	311,362	191,719	190,700	61.25	(0.53)	102.19
3	Usaha JMI	47,794	75,583	38,716	41,855	55.38	8.11	87.57
4	Usaha Penunjang	29,981	2,493	5,512	5,188	208.06	(5.88)	17.30
	Jumlah Pendapatan Usaha Sendiri	364,539	491,113	339,153	333,696	67.95	(1.61)	91.54
B	PENDAPATAN USAHA SENDIRI							
1	PT PBN	3,215	3,668	3,204	3,303	89.57	3.09	102.75
2	PT PANI	457	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Usaha Anak	3,672	3,668	3,204	3,303	89.57	3.09	89.96
	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	368,211	494,800	342,357	337,000	68.11	(1.56)	91.52
II	BIAYA USAHA							
A	BIAYA USAHA SENDIRI							
1	Usaha Jasa	71,929	75,810	75,857	93,840	123.78	23.71	130.46
2	Usaha Komersial	152,595	263,118	160,171	166,209	63.17	3.77	108.92
3	Usaha JMI	44,659	66,505	35,086	37,091	55.77	5.71	83.05
4	Usaha Penunjang	25,156	1,830	4,612	4,078	222.84	(11.57)	16.21
	Jumlah Biaya Usaha Sendiri	294,338	407,263	275,726	301,219	73.96	9.25	102.34
B	BIAYA USAHA ANAK							
1	PT PBN	1,297	1,635	1,535	1,391	85.10	(9.38)	107.22
2	PT PANI	222	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Biaya Usaha Anak	1,519	1,635	1,535	1,391	85.10	(9.38)	91.57
	JUMLAH BIAYA USAHA	295,857	408,897	277,261	302,610	74.01	9.14	102.28
III	LABA (RUGI) KOTOR USAHA	72,354	85,903	65,096	34,390	40.03	(47.17)	47.53
IV	BIAYA OVERHEAD	41,527	51,475	48,390	45,759	88.90	(5.44)	110.19
V	LABA (RUGI) BERSIH USAHA	30,827	34,428	16,706	(11,370)	(33.02)	(168.06)	(36.88)
VI	LABA (RUGI) DILUAR USAHA	(733)	1,634	1,309	15,666	959.00	1,096.36	(2,137.14)
VII	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	30,093	36,061	18,016	4,297	11.92	(76.15)	14.28
	Bagian Kepemilikan Minoritas	44	16	9	6	35.86	(39.16)	12.67
	Estimasi Pajak Pph pasal 25	(7,669)	(7,933)	(3,985)	869	(10.95)	(121.81)	(11.33)
VIII	LABA (RUGI) KONSOLIDASI	22,468	28,112	14,022	5,160	18.36	(63.20)	22.97

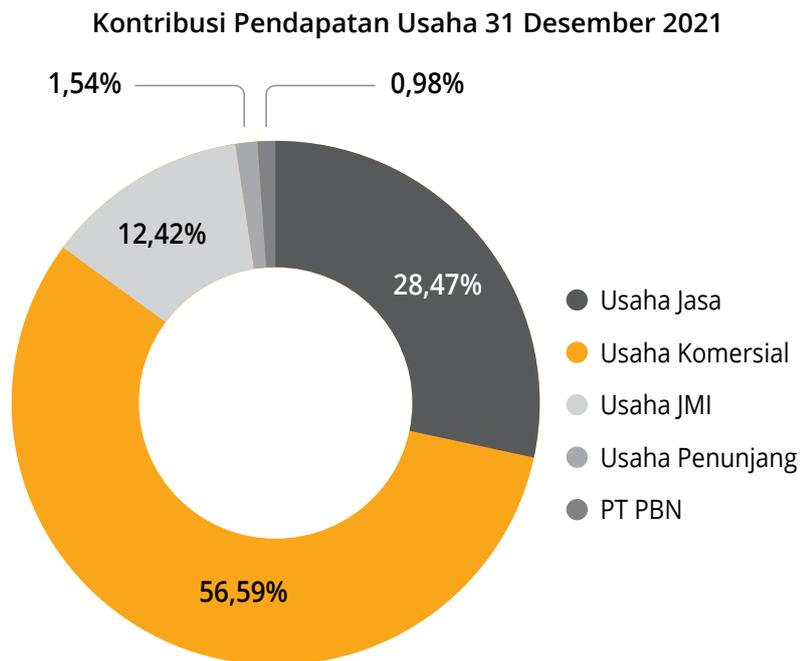
Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2021 terealisasi sebesar Rp337.000 juta atau 68,11% dari anggaran sebesar Rp494.800 juta, dan menurun 8,48% dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2020 sebesar Rp368.211 juta.

1. Usaha Jasa sebesar 28,47%;
2. Usaha Komersial 56,59%;
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 12,42%;
4. Usaha Penunjang 1,54%;
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,98%.

Pendapatan usaha tahun 2021 sebesar Rp337.000 juta berkontribusi dari:

Kontribusi pendapatan usaha tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:



Biaya Usaha

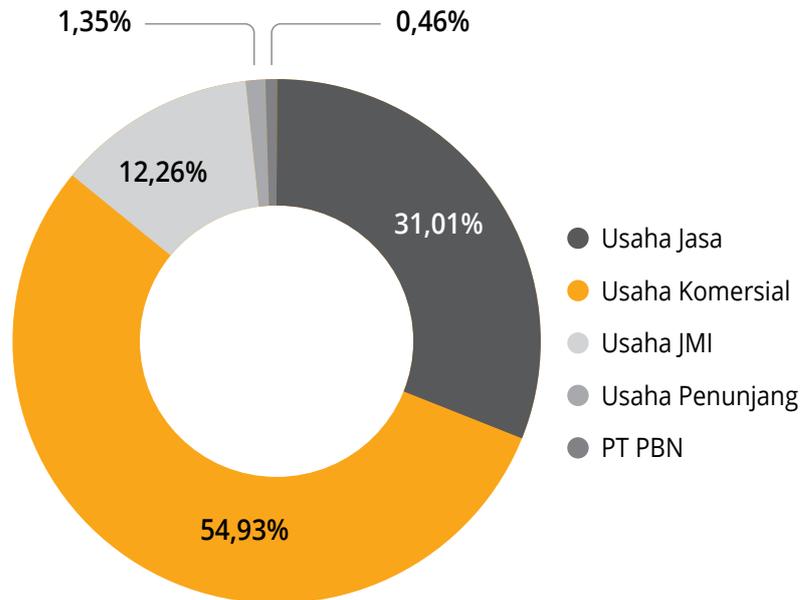
Biaya usaha tahun 2021 terealisasi sebesar Rp302.610 juta atau 74,01% dari anggaran sebesar Rp408.897 juta, dan hanya tercapai 102,28% dibandingkan dengan Biaya Usaha tahun 2020 sebesar Rp295.857 juta.

1. Usaha Jasa sebesar 31,01%;
2. Usaha Komersial 54,93%;
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 12,26%;
4. Usaha Penunjang 1,35%;
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,46%.

Biaya usaha tahun 2021 sebesar Rp302.610 juta berkontribusi dari:

Kontribusi Biaya usaha tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:

Kontribusi Biaya Usaha 31 Desember 2021



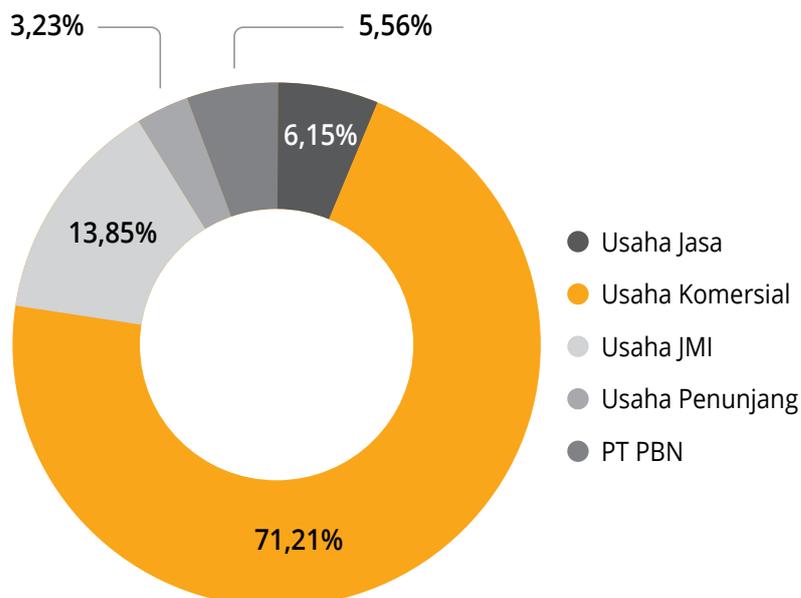
Laba Usaha

Laba usaha tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.390 juta atau 40,03 % dari anggaran sebesar Rp85.903 juta, dan hanya tercapai 34.390% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2020 sebesar Rp72.354 juta.

Laba usaha tahun 2021 sebesar Rp34.390 juta berkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 6,15%;
2. Usaha Komersial sebesar 71,21%;
3. Usaha Jasa Maintenance & IT sebesar 13,85%;
4. Usaha Penunjang sebesar 3,23%;
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 5,56%.

Kontribusi Laba Usaha 31 Desember 2021



Berdasarkan data-data diatas, terlihat bahwa kontributor terbesar laba usaha berasal dari segmen usaha komersial yang mengontribusi sebesar 71.21% dari total laba usaha. Realisasi laba usaha dari segmen usaha komersial ini adalah sebesar Rp24,491 juta atau 50.76% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp48,224 juta.

Dan jika dibandingkan dengan tahun 2020 hanya tercapai 71.99% dari laba usaha jasa komersial di tahun 2020 sebesar Rp34.019 juta.

Sementara itu, kontributor laba usaha terbesar kedua berasal dari segmen usaha jasa maintenance & IT, yang mengontribusi sebesar 13,85% dari total laba usaha. Realisasi laba usaha dari segmen usaha jasa maintenance & IT tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.764 juta atau 52,48% dari anggaran sebesar Rp9.078 juta dan dibandingkan dengan tahun 2020 hanya tercapai 151,93% dari laba usaha jasa *outsourcing* tahun 2020 sebesar Rp3.136 juta.

Sedangkan laba usaha dari segmen usaha jasa *outsourcing*, tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.113 juta atau 8,17% dari anggaran sebesar Rp25.865 juta, dan tercapai 7,49% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp28.220 juta. Tahun 2021 laba usaha jasa memberikan kontribusi laba usaha sebesar 71,21% dari total laba usaha.

Sedangkan laba usaha dari segmen usaha jasa penunjang tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.110 juta atau 167,30% dari anggaran

sebesar Rp663 juta, dan trend naik naik 23,00%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.826 juta. Tahun 2021 laba usaha penunjang memberikan kontribusi laba usaha sebesar 3,23% dari total laba usaha..

Kontributor pendapatan usaha selanjutnya adalah usaha entitas anak (PT PBN) yang memberikan kontribusi 5,56% dari total pendapatan. Laba usaha entitas anak PT PBN tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.912 juta atau 93,13% dari anggaran sebesar Rp2.053 juta, dan jika dibandingkan dengan laba usaha tahun 2020 hanya tercapai 99,72% dari laba usaha tahun 2020 sebesar Rp1.917 juta.

Laba Bersih Konsolidasian

Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2021 adalah sebesar Rp5.160 juta, atau 18,36% dari anggaran sebesar Rp28.112 juta. Laba bersih konsolidasi ini hanya tercapai 22,97% jika dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp22.468 juta.

Capaian Posisi Keuangan

Jumlah Aset

Jumlah Aset PT PIDC per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp284.838 juta, atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp324.261 juta, dan apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp271.142 juta, maka trend-nya naik sebesar 5,05%.

Adapun rincian Posisi Keuangan Entitas sebagai berikut:

PERKIRAAN	AUDITED	PROYEKSI	AUDITED	PROSENTASE	
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021	4 : 3	4 : 2
1	2	3	4	5	6
ASSET					
Asset Lancar	219,441	264,481	220,344	100.44%	100.44%
Asset Tetap	26,001	27,821	41,29	93.47%	100.01%
Properti Usaha	-	-	17,042	0.00%	0.00%
Asset Sewa Guna Usaha	15,355	24,585	15,237	61.98%	99.23%
Asset Tak Berwujud	960	2,738	2,510	91.68%	261.38%
Asset Dalam Penyelesaian	5,895	2,012	49	2.44%	0.83%
Asset Hak Guna Usaha	1,358	464	670	14439.71%	49.32%
Asset Pajak Tangguhan	2,131	2,161	2,925	135.36%	137.26%
JUMLAH ASSET	271.142	324,261	284.838	87.84%	105.05%
LIABILITAS MODAL					
Liabilitas Lancar	88,316	122,483	114,459	93.37%	129.49%
Liabilitas Jangka Panjang	22,363	5,543	11,519	103.65%	25.69%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	1,365	614	477	9430.93%	41.41%
Hak Minoritas	223	143	127	88.51%	56.88%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5,771	5,680	5,296	93.24%	91.77%
Modal dan Cadangan	133.985	142,544	154,443	109.76%	116.77%
Saldo Laba (Rugi)	20.525	48,636	3,217	6.62%	15.68%
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.407)	(1,383)	(937)	67.78%	66.63%
Ekuitas	153.103	189,797	158,859	83.70%	103.76%
JUMLAH LIABILITAS DAN MODAL	271.142	324,261	284,838	87.84	105.05%

Capaian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Cash Flow)

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021		PROSENTASE	
		RKAP	REALISASI	CAPAIAN (%)	TREND (%)
1	2	3	4	5	6
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	354,158	401,375	373,609	93.08	105.49
Pembayaran Kepada Pemasok	(239,974)	(220,804)	(201,676)	91.34	84.04
Pembayaran Biaya Operasional	(103,600)	(162,368)	(109,134)	67.21	105.34
Pengeluaran Lain-lain	(2,099)	(3,846.00)	(27,299)	709.80	1,300.54
Pembayaran Pajak	(13,297)	(13,204)	(20,213)	153.08	152.01
Penerimaan Lain-lain	(213)	545	15,721	2,884.62	7,384.19
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(5,026)	1,698	31,009	1,826.20	616.96
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan Deposito	-	-	-	-	-
Penambahan Aset Tetap	(14,421)	(4,203)	(18,377)	437.23	127.43
Pemasangan IT	(248)	(2,345)	(1,867)	-	-
Penambahan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(14,669)	(6,548)	(20,243)	309.15	138.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Pinjaman Bank	5,000	-	29,200	-	-
Penerimaan dari Pemegang Saham	-	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan/Pembayaran Hutang Bank/Pihak III	(804)	15,700	(20,658)	-	-
Pembayaran Dividen	(8,867)	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(9,671)	15,700	8,542	54.41	88.32
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(24,367)	10,850	(19,307)	177.95	65.74
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41,067	16,700	14,642	87.68	35.66
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	11,700	27,550	33,950	123.23	290.17

Realisasi kas bersih sampai dengan akhir tahun 2021 yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp29.913 juta atau sebesar 1.761,68% dari RKAP tahun 2021 sebesar Rp1.698 juta, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp(5.026) juta turun sebesar (595,17) %.

Sepanjang tahun 2021 dalam penggunaan dana, Entitas sangat selektif agar tepat sasaran, sehingga saldo akhir kas dan setara kas menjadi Rp33.956 juta atau 123,25% dari RKAP tahun 2021 sebesar Rp27.550 juta dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp11.700 juta, maka trendnya naik 190,23%, penggunaan dana sampai dengan akhir tahun 2020 dipergunakan untuk pembiayaan operasional dan investasi baik alat produksi dan alat penunjang.

Capaian Investasi

Realisasi investasi sampai akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp5.719 juta, atau 29.82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.180 juta.

Investasi terdiri dari alat penunjang produksi sebesar Rp4.736 juta, aplikasi software sebesar Rp983 juta.

Anggaran investasi hanya terserap Rp5.719 juta diantaranya:

- Pengadaan mobil Dinas untuk kegiatan usaha sewa kendaraan terealisasi 18 unit Avanza Veloz,
- Aplikasi *Software ERP Business offline*

Adapun rincian investasi sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI 2020		RKAP 2021		REALISASI 2021		PROSENTASE	
	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	7 : 5	7 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alat Produksi								
Mobil Dinas:								
- Avanza Veloz	-	-	-	-	18	4,440	-	-
- Avanza	-	-	-	-	-	-	-	-
- Vios	-	-	3	1.262	-	-	-	-
- Camry	1	958	-	-	-	-	-	-
- Alphard	-	-	-	-	-	-	-	-
- Innova	6	2,813	12	4,560	-	-	-	-
- Toyota Atlis	-	-	-	-	-	-	-	-
- Truck 6 Roda	-	-	1	370	1	296	80.00	-
- Expander	15	4.064	1	596	-	-	-	-
- Kapal Phinisi	-	7.298	15	6,000	-	-	-	-
Pelni TV	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Alat Produksi	22	7.835	32	12.788	19	4,736	39,38	60,55
Sarana Penunjang								
- Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
- Gudang	1	3.000	1	2.000	-	-	-	-
- Perawatan Hotel Tretes	-	-	1	1,000	-	-	-	-
- Komputer & Printer	-	-	-	-	-	-	-	-
- Perabotan Kantor	18	162	-	-	-	-	-	-
- Cold Storage	-	-	1	130	-	-	-	-
- Penghancur Sampah	4	76	-	-	-	-	-	-
- Vacuum Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-
- Polisher	-	-	4	140	-	-	-	-
- Mobil Box (Makassar)	-	-	1	350	-	-	-	-
- Kamera	-	-	1	12	-	-	-	-
- Forklip	-	-	1	400	-	-	-	-
- Mesin Cetak ID Card	-	-	1	15	-	-	-	-
Jumlah Alat Penunjang	23	3,238	11	4.047	-	-	-	-
Software	-	-	3	2,345	1	983	41.92	-
Jumlah Investasi	45	11,073	46	19,180	20	5,719	29,82	51,65

Kinerja Entitas

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, secara umum Kinerja Entitas adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Entitas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "DJOKO, SIDIK & INDRA" sesuai dengan laporannya Nomor: LAI: 00028/2.0999/AU.I/05/0139-1/1/III/2022, 01 Maret 2022 dengan Pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".

a. Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2021 sebesar Rp5.165 juta atau 18.36% dari anggaran sebesar Rp28.112 dan hanya tercapai 22,97% dibanding tahun 2020 sebesar Rp22.468.

b. Total Asset per 31 Desember 2021 sebesar Rp284.838 juta atau naik 5,05% dari total Asset per 31 Desember 2020 sebesar Rp271.142 juta.

2. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/ MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "DJOKO, SIDIK & INDRA" Nomor: 00003/2/0999/NASS.LEK/05/0139-1/1/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori A dengan nilai skor 71,50.

3. Capaian kinerja Entitas berbasis Key Performance Indicator (KPI) untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "DJOKO, SIDIK & INDRA" Nomor: 00002/2.0999/NASS.KPI/05/0139-1/1/III/2022 tanggal 01 Maret 2022, Capaian Nilai Skor 72,26 Nilai Maksimal Skor 100,00.

4. Untuk Market *Share Growth* realisasi tahun 2021 adalah sebesar 95.81%.
5. Rasio Entitas sebagai berikut:
 - a. Rasio Likuiditas:
 - *Current Rasio* tahun 2021 sebesar 192,57% dan ditahun 2020 sebesar 228,02%.
 - *Cash Ratio* tahun 2021 sebesar Rp29,67% dan ditahun 2020 sebesar 15,36%.
 - b. Rasio Aktivitas:
 - *Collection Period* tahun 2021 76,8 hari dan ditahun 2020 *Collection* Periode 103 hari.
 - *Total Asset Turn Over* tahun 2021 sebesar 123,50% dan ditahun 2020 139,04%.
 - c. Rasio Rentabilitas:
 - *Gross Profit Margin* tahun 2021 sebesar 9,73% dan ditahun 2020 sebesar 19,62%.
 - *EBITDA Margin* tahun 2021 sebesar 9,64 % dan tahun 2020 sebesar 8,83%.
6. Realisasi investasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp5.719 juta atau 29,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.180 juta.
7. Pembuatan Aplikasi ERP, absensi menggunakan *mobile simpeg*, portal PIDC, pembayaran gaji karyawan produksi menggunakan aplikasi *simpeg*, aplikasi *dashboard invoice* dan aplikasi *WMS (Warehouse Management System)*.

Kelangsungan Usaha

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2021 mempengaruhi kinerja seluruh sektor industri di tanah air. PT PIDC pun turut terkena dampak langsung dari kondisi memburuknya situasi perekonomian nasional dikarenakan pandemi Covid-19 tersebut.

Namun demikian, Manajemen Perusahaan merasa optimis, bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan pada fundamental perusahaan dan tidak mempengaruhi

kelangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Karena berdasarkan Analisa Perusahaan, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan meyakini hal ini berdasarkan:

1. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/ MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik " DJOKO, SIDIK & INDRA" Nomor: 00003/2/0999/NASS.LEK/05/0139-1/1/III/2022 tanggal 01 Maret 2021 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori A dengan nilai skor 71.50.
2. Perusahaan tetap berhasil membukukan pendapatan usaha yang cukup baik di tahun 2021 yaitu sebesar Rp337.000 juta atau 68.11% dari anggaran sebesar Rp494.800 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar 8,48% dari tahun 2020.
3. Rasio-rasio keuangan sebagaimana disajikan dalam ikhtisar kinerja keuangan menunjukkan, bahwa Perusahaan tetap dalam kondisi likuid, *solvable*, dan *profitable*.
4. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Perusahaan.

Prospek Usaha Ke Depan

Berbagai upaya Pemerintah R.I. untuk menjaga stabilitas perekonomian diharapkan menjadi faktor pendukung dan basis fundamental bagi proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Sepanjang 2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 5 (lima) kali sebesar 125 bps menjadi 3,75% pada akhir 2020, level terendah sepanjang sejarah. Penurunan dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020 masing-masing sebesar 25 bps. Keputusan penurunan suku bunga dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan inflasi dan menjaga daya saing aset keuangan domestik serta stabilitas eksternal, serta sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Bank Indonesia juga telah melakukan injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp726,57 triliun (sekitar 4,7% dari PDB), terutama penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp555,77 triliun hingga 31 Desember 2020.

Proses pemulihan didukung langkah mitigasi pandemi yang diambil Pemerintah, bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah-langkah akselerasi penanganan pandemi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah antara lain kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Stimulus tersebut diberikan antara lain melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 juga telah dirancang menjadi instrumen *countercyclical* untuk menangani pandemi Covid-19 dan menolong rakyat dan dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar segera bangkit. Belanja negara menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, Pemerintah sangat optimis, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali menggeliat di tahun 2021.

Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali menguat. Kemajuan penanganan *pandemic Covid-19*, termasuk penggunaan vaksin, performa ekonomi global yang menguat, stimulus kebijakan makro ekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan akan mendukung optimisme dalam penguatan ekonomi.

Vaksinasi dan disiplin penerapan protokol COVID-19 menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 3,5%-5,1% pada 2021. Inflasi juga diperkirakan tetap terkendali di 2,7%.

Seiring dengan langkah penanganan COVID-19 yang terus ditingkatkan Pemerintah sebagaimana telah diurai di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diyakini akan semakin membaik, mulai tahun 2021 dan seterusnya.

Karena itu, Perusahaan merasa optimis bahwa di tahun 2021 dan di tahun-tahun selanjutnya, bisnis Perusahaan akan kembali membaik dan akan kembali bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sebagaimana pada tahun-tahun sebelum pandemi.

Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Sampai dengan tahun 2021, Saham Perusahaan dimiliki oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar 99,50% dan Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Pelni sebesar 0,50%.

Oleh karena itu tidak terdapat program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Informasi Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dalam kegiatan usahanya:

No.	PIHAK-PIHAK BERELASI	SIFAT HUBUNGAN PIHAK-PIHAK BERELASI	TRANSAKSI
1	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas induk	Hutang piutang
2	PT Pelita Bandar Nasional	Entitas anak	Penyertaan, hutang-piutang
3	PT PANI	Entitas anak	Penyertaan, hutang piutang





3

TANGGUNG JAWAB **SOSIAL** **PERUSAHAAN**

Perusahaan berupaya untuk memberikan kontribusi positif kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menjalankan pengembangan usaha yang selaras dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan kontribusi Perusahaan dalam membangun bangsa melalui kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan, ketenagakerjaan serta kepada konsumen yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan PIDC, Perusahaan menyadari bahwa kemajuan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar ini, PIDC berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa keberlanjutan usaha Perusahaan sangat tergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan PIDC, kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan secara konsisten oleh Perusahaan adalah Program Kemitraan, Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program-program tersebut dilaksanakan di wilayah sekitar operasional Perusahaan untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar dapat menerima manfaat langsung atas kehadiran PIDC.

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PIDC menyadari bahwa kinerja positif Perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan, merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci keberhasilan PIDC. Hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* yang secara konsisten dilakukan oleh PIDC. Program CSR Perusahaan dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta perlindungan dan pelayanan prima kepada konsumen.

Selaras dengan strategi pelaksanaan CSR PIDC, secara umum, Program CSR PIDC difokuskan pada 4 (empat) aspek Program CSR yaitu:



TUJUAN

Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PIDC bertujuan untuk mendorong budaya kerja Perusahaan yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas bisnis, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan PIDC.

DASARKEBIJAKAN PELAKSANAAN CSR

Pelaksanaan program CSR PIDC mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PRINSIP PELAKSANAAN CSR

Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun kebijakan dan program CSR baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program CSR.

STAKEHOLDER YANG PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

PIDC mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan PIDC. Berdasarkan hasil identifikasi, keterlibatan Pemangku Kepentingan PIDC dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMANGKU KEPENTINGAN	TOPIK UTAMA YANG DIAJUKAN
Pemegang Saham	Kinerja keuangan/kinerja non finansial PIDC/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis PIDC.
Karyawan	Kesejahteraan/kesehatan dan keselamatan kerja/pelatihan dan pengembangan.
Konsumen	Pelayanan konsumen/kerahasiaan data konsumen.
Pemerintah	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat	Kontribusi kepada masyarakat.

ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, PIDC melakukan *Focus Group Discussion* kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
2. Kepatuhan Lingkungan
3. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepuasan Karyawan
6. Kesejahteraan Masyarakat

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Lingkup tanggung jawab sosial PIDC adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Azasi Manusia
3. Operasi Yang Adil
4. Lingkungan Hidup
5. Ketenagakerjaan
6. Pemenuhan Kepentingan Konsumen
7. Kemasyarakatan

ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PIDC memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

PIDC memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. PIDC juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Terjalannya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

Pelaksanaan Dan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, PIDC senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PIDC (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di PIDC telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Waktu Kerja

1. Memperhatikan kelancaran operasional PIDC, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara PIDC dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu PIDC akan membayar upah kerja lembur kepada Pegawai.
2. Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dan Perusahaan menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bagi pegawai *teller*, *customer service*, dan pegawai operasional lainnya pada jama-jam istirahat tetap melayani konsumen, selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.
4. Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Izin Pernikahan

1. Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada Direksi melalui unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri/suami.
2. Permohonan izin tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah atau yang bisa dipersamakan dari kantor kelurahan/kepala desa dari instansi berwenang lainnya bagi pegawai atau calon yang memiliki status belum pernah melakukan perkawinan.
3. Permohonan izin secara tertulis diajukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum melaksanakan pernikahan.

Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Perusahaan selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
2. Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
3. Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan jabatan Pegawai yang diatur oleh PIDC.
4. Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh PIDC.
5. Hak cuti tahunan dilaksanakan berdasarkan permintaan pegawai dan/atau penugasan oleh Perusahaan dan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan PIDC.
6. Bagi pegawai yang mengajukan rencana

cuti tahunan namun ditolak oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada kepala unit dimaksud untuk memberikan alasan penolakannya secara tertulis dan ditembuskan ke unit kerja *Human Capital*.

Izin Menjalankan Ibadah

PIDC senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh PIDC, termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat:

1. Peristiwa khusus yaitu pernikahan pegawai, pegawai menikahkan anak, suami/istri/ anak/menantu/orang tua/ mertua/anggota dalam satu rumah meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan, khitanan anak, dan lain-lain.
2. Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
3. Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan.
PIDC telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK AZASI MANUSIA

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, PIDC dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional PIDC. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan

PIDC. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2021, PIDC belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PIDC memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. PIDC telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System (WBS)*, *Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat. Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh PIDC saat ini adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders. Penerapan anti korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan WBS, *Code of Conduct* dan Kebijakan Gratifikasi.

Rumusan Dan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi *Whistleblowing System dan Code of Conduct*, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

PIDC senantiasa menargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan PIDC dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh PIDC meliputi hal-hal berikut ini:

Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interests*)

PIDC melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh jajaran PIDC. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Perusahaan sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan konsumen, rekanan dan seluruh *stakeholder* dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Implementasi *Whistleblowing System*

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat PIDC wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan PIDC. Kebijakan *whistleblowing* diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PIDC untuk melaporkan *fraud* yang terjadi. Lingkup pengaduan meliputi:

- a. Perbuatan *fraud*.
- b. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
 - Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
 - Penyalahgunaan jabatan untuk

kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar PIDC.

- Menginformasikan/mengungkapkan rahasia konsumen dan PIDC.
- Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian PIDC.
- Penyelewengan uang/kas PIDC.
- Penggelapan aset dan/atau inventaris PIDC.
- Pemerasan.
- Perbuatan Asusila.

Capaian Dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Komitmen PIDC dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* kepada PIDC. Dengan meningkatnya kepercayaan dari *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan kinerja PIDC. Sampai dengan tahun 2021, Perusahaan tidak dikenakan sanksi dalam perkara hukum serta diakuinya kinerja Perusahaan oleh pihak eksternal. Sampai dengan Desember 2021, PIDC belum memiliki penghargaan terkait operasi yang adil.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya. Beberapa program peduli lingkungan telah dilaksanakan PIDC. Program Peduli lingkungan tersebut dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: program internal dan *external*.

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, PIDC telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Terjadinya efisiensi di lingkungan internal PIDC sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profit kepada Perusahaan dengan menekan biaya operasional. Sedangkan untuk kegiatan eksternal, dapat dijalin hubungan yang baik antara masyarakat dan PIDC, sehingga citra PIDC di masyarakat dapat terjaga.

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Wujud dukungan PIDC terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perusahaan baik itu operasional di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

Peduli Lingkungan Internal

PIDC terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk kinerja kami pada lingkungan. Oleh sebab itu, PIDC senantiasa menerapkan peduli lingkungan di lingkungan operasional PIDC. Perusahaan menyadari, efisiensi energi dan air tidak hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. PIDC membuat kebijakan terkait lingkungan internal yaitu melalui program PIDC *Go Green*. Melalui program PIDC *Go Green* ini, seluruh pegawai diminta untuk peduli akan 5 (lima) hal, yakni:

- Gunakan air sehemat mungkin;
- Nyalakan listrik jika diperlukan;
- Tanam pohon sebanyak mungkin;
- Gunakan bahan yang mudah didaur ulang;
- Buang sampah pada tempatnya.

Selain hal tersebut, manajemen telah menentukan kebijakan antara lain hemat penggunaan listrik terutama di gedung kantor pusat PIDC dimana seluruh bagian gedung akan dimatikan saat jam 18.00 sore untuk penghematan. Selain itu dalam melaksanakan rapat sudah jarang digunakan kertas dalam menduplikasi bahan rapat melainkan dengan

presentasi melalui TV atau *Infocus*, selain itu dalam penggunaan kertas juga diminimalisasi dengan penggunaan *email* dan kertas yang sudah terpakai untuk dimanfaatkan sisi yang masih bisa digunakan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

K3 (Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah sebuah konsep untuk mencapai kondisi keselamatan yang bebas dari kecelakaan dan kerusakan dimana para karyawan bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi peralatan, keselamatan, dan kondisi karyawan sebagai pekerjaannya. Yang paling utama adalah bagaimana perusahaan membuat sistem dan kebijakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja biasanya adalah:

1. *Unsafe Action*: Tindakan Membahayakan
2. *Unsafe Condition*: Kondisi Membahayakan
3. *Factor X*: Faktor diluar kemampuan manusia

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikemukakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas "Keselamatan dan kesehatan kerja".

Lingkup Dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi berbagai program ketenagakerjaan. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Semua karyawan PIDC dapat memahami prosedur dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga jika pada suatu saat nanti terjadi kondisi *force majeure*, maka semua karyawan dapat melakukan tindakan yang benar demi keselamatan diri dan lingkungan (*safety officer*). Di sinilah pentingnya keberadaan *safety officer* yang bertanggung jawab menakar risiko dan memberikan solusi atas permasalahan K3.

Kegiatan Dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

Kegiatan Dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan

Kesetaraan Dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan pada tahun 2021 dilakukan penyempurnaan jalur karir berbasis manajemen talenta dengan penyempurnaan aturan dan kebijakan jalur karir pegawai atau *Career Path* Manajemen. Pengembangan sistem *E-learning* yang terus dilanjutkan dalam pengelolaan *knowledge management*, Pengembangan *Learning Center* yang menjadi wadah bagi pegawai dalam pembelajaran baik melalui *e-learning* maupun *inhouse training* dengan menyiapkan kurikulum dan silabus (pendidikan yang terprogram) serta instruktur internal yang handal di bidangnya. *Database* kepegawaian juga terus dilakukan penyempurnaan sistem informasi mengenai kepegawaian.

Selama tahun 2021, PIDC telah menyelenggarakan pelatihan/training baik itu yang berupa *inhouse* dan Pelatihan Ekstern Dalam Negeri yang diikuti oleh pegawai. PIDC memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengoptimalkan potensi diri dan keahliannya dengan mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan pelatihan. Seluruh program pelatihan dan pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh PIDC disesuaikan dengan standar kompetensi yang diinginkan, guna memenuhi kebutuhan bisnis dan suksesi SDM PIDC di masa depan.

Program Kesejahteraan Pegawai

PIDC senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai. Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, antara lain melalui materi maupun nonmaterial. Kesejahteraan pegawai secara material berkaitan langsung dengan prestasi pegawai, dan dapat diberikan berupa kenaikan gaji pegawai, kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, serta memberikan penghargaan pegawai.

Kesempatan Bekerja yang Adil dan Merata

PIDC menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan SDM. Rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan dan fair tanpa adanya nepotisme dari kalangan internal dan eksternal. Proses rekrutmen pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi calon pegawai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

PIDC menjamin kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang luas bagi semua pegawai tanpa memandang jenis kelamin, suku maupun agama dan kepercayaan pegawai.

Reward System

Reward System memiliki bagian yang penting dalam memotivasi produktivitas dan meningkatkan *retention* SDM. Untuk itu, sistem penggajian dan kesejahteraan terus di-*review* dengan mempertimbangkan prinsip internal *equity* dan *external competitiveness*. Unsur-unsur penggajian adalah: Gaji pokok dan Tunjangan jabatan.

Selain remunerasi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi pegawainya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi, diantaranya dengan memberikan fasilitas dan tunjangan sebagai berikut:

1. Fasilitas Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan
2. Uang Makan (uang kehadiran)
3. Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar
4. Bantuan Pakaian Dinas
5. Uang santunan kematian
6. Jasa Produksi
7. THR
8. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun

9. Jaminan Hari Tua (BPJS)
10. Manfaat Pensiun
11. Tunjangan Hari Tua
12. Tunjangan Pajak

Cuti Tahunan dan Cuti Besar

Setiap pegawai di PIDC berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja setiap tahun. Selain itu Pegawai juga berhak atas istirahat panjang/ cuti besar setelah menjalani masa dinas sebagai pegawai tetap selama setiap 5 (lima) tahun sekali, selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- **Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja**

Dalam melakukan perekrutan pegawai, PIDC senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam hal pengangkatan calon pekerja, PIDC tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

- **Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai, PIDC secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan. PIDC menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan.

- **Penggunaan Tenaga Kerja Lokal**

Perusahaan selalu berupaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain praktik kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, Perusahaan juga senantiasa menggunakan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama dalam seluruh kegiatan operasional.

- **Remunerasi**

PIDC senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi

yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional PIDC. Terkait dengan remunerasi, PIDC senantiasa berupaya menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

- **Kegiatan Kesejahteraan Pegawai**

PIDC senantiasa memerhatikan kesejahteraan seluruh pegawainya agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material. Program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi pegawai dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk uang transportasi, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian. Sedangkan program yang bersifat non-material merupakan program kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai PIDC tanpa melakukan diskriminasi.

- **Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan**

Sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, maka PIDC telah menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis Kegiatan Kreatifitas, Bakat Olah Raga dan Seni Pegawai

Kegiatan Keselamatan Kerja

PIDC senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai. Terkait hal tersebut, maka Perseroan telah menyusun pedoman/panduan dalam menjaga kemandirian dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja PIDC. Prosedurnya terfokus pada kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung, kesiapan pelaksanaan penyelamatan jiwa manusia, serta pelatihan kepada pegawai. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan inspeksi/pemeriksaan terhadap peralatan proteksi kebakaran gedung secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pengecekan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dilakukan oleh Petugas *Security* setiap 1 (satu) bulan sekali sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Api Tersistem (APAT) dan *Fire Alarm* dilakukan oleh pengelola gedung yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melakukan standardisasi spesifikasi, penempatan perangkat keselamatan gedung dan jalur evakuasi yang dimasukkan dalam buku panduan standar renovasi gedung kantor yang disusun bersama dengan konsultan perencana yang akan dilakukan review setiap 1 (satu) sekali atau sesuai kebutuhan.
3. Menerapkan standar operasional dalam rangka pengamanan gedung kantor pada saat jam kerja dan pada saat *cash supply* dengan menggandeng aparat kepolisian.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Sepanjang tahun 2021, PIDC tidak mencatat adanya kecelakaan kerja (*zero accident*) dalam kegiatan operasional Perseroan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Ketenagakerjaan Dan Kesehatan

Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan dan menjamin aspek kesehatan dalam rangka menjaga produktivitas karyawan. Keseluruhan upaya Perusahaan berdampak pada meningkatnya produktivitas karyawan.

Kegiatan Dan Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Tugas *safety officer* meliputi penentuan jam kerja aman bagi karyawan, mengecek kondisi site, hingga inspeksi peralatan kerja secara kontinyu setiap bulan. Dan juga diadakan simulasi setahun sekali, dimana pada keadaan yang darurat dan perlu evakuasi,

lalu dilihat apakah para karyawan *aware* atau tidak dengan bahaya. Semua orang bekerja pasti ada risikonya. Meski bekerja di dalam ruangan kantor, bisa saja kecelakaan atau sakit. Kesadaran karyawan sama saja baik di kantor maupun di lapangan. Tapi karyawan yang berada di kantor, selalu diingatkan dan disosialisasikan. Ini karena karyawan yang berada di dalam kantor, tempatnya tenang, adem, sehingga tidak sedikit yang menyepelekan K3.

Baik bekerja di dalam maupun di luar kantor, risiko akan tetap ada. Tanda-tanda peringatan dan fasilitas keselamatan gedung kantor Menara Dang Merdu Perusahaan telah dipasang di dalam ruangan, seperti *emergency exit*, alat pemadam kebakaran, panel-panel tanda bahaya, dan sebagainya. Gedung mesti mempunyai perlengkapan pemadam kebakaran berbentuk hidran air didalam ataupun diluar gedung, *sprinkler* atau alat yang bisa menyemprotkan air apabila suhu meraih 68 derajat celcius.

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Perkantoran

Kementrian Kesehatan mengeluarkan regulasi terbaru terkait Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, peraturan tersebut dimuat di dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan September 2016. Dengan dikeluarkan peraturan ini, maka standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran dapat ditingkatkan. Peraturan Standar K3 Perkantoran ini ditujukan sebagai acuan bagi pemimpin Kantor dan/ atau pengelola gedung dalam mengelola Perkantoran untuk mewujudkan kantor yang aman, sehat, dan nyaman sehingga karyawan dapat bekerja dengan selamat, sehat, bugar dan tetap produktif.

Perkantoran adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat. Di dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016 mewajibkan pengelola gedung atau pemimpin kantor untuk menyelenggarakan K3 Perkantoran dengan membentuk dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dan menerapkan standar K3 Perkantoran.

Simulasi Keadaan Bencana

Kebakaran gedung bertingkat memiliki tingkat kesulitan tersendiri, karena akses ke gedung bertingkat diperlukan alat pemadam yang kuat, tangga, dan yang lebih penting adalah skill petugas. Untuk itu, PIDC harus melakukan simulasi kebakaran minimal sekali atau dua kali setahun. Simulasi ini akan menambah kepedulian dan keahlian pegawai disetiap lantai gedung akan keselamatan diri dan paham apa yang harus dilakukan saat ada bencana.

Dengan simulasi yang diadakan rutin ini, maka Perusahaan dapat mengevaluasi Standar Operasional dan Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi ketika terjadi keadaan darurat, sehingga kondisinya ia anggap sudah ideal dan baik.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait keselamatan kerja telah memberikan dampak yang positif bagi PIDC. Selama tahun 2021 tidak terdapat kecelakaan kerja di PIDC yang dialami oleh para karyawan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

PIDC berkomitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada konsumen. Terkait komitmen tersebut, Perusahaan telah memiliki berbagai kebijakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Perlindungan Kerahasiaan Data Konsumen

Kami komitmen menjaga dan melindungi kerahasiaan data konsumen.

Kemudahan Akses Informasi Dan Jaringan Layanan Perpidcan

Akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari

peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif dari para *stakeholders* dalam hal ini para konsumen terhadap kebijakan dan kegiatan PIDC.

Peningkatan Kualitas Layanan Konsumen

Dalam meningkatkan loyalitas konsumen PIDC melakukan beberapa upaya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi harapan konsumen. Beberapa upaya yang dilakukan PIDC dalam meningkatkan kepuasan konsumen yaitu:

1. Terus menerus mengembangkan inovasi produk;
2. Menjaga kualitas produk;
3. Memberikan kemudahan kepada konsumen dalam bertransaksi;
4. Menyelesaikan keluhan konsumen;
5. Menjaga privasi konsumen;
6. Melakukan pembenahan terhadap kinerja karyawan;
7. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen;
8. Penanganan kejahatan *financial*;
9. Edukasi Konsumen.

Dampak Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Konsumen

Dengan dimudahkannya akses informasi bagi konsumen, loyalitas konsumen semakin meningkat dan pada akhirnya menjadikan peningkatan kinerja bagi PIDC.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan pengembangan sosial masyarakat merupakan penjabaran dari salah satu misi PIDC yaitu peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan, sebagai kontribusi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program sosial bagi masyarakat ini, PIDC tentunya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat Riau dan Kepri. PIDC percaya bahwa dengan melakukan hal yang baik, bagi masyarakat sekitar adalah bagian dari investasi untuk mendukung perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada Tahun 2021 dalam program kegiatan sosial bagi masyarakat, PIDC mempunyai kebijakan mendukung penuh program-program Pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan pola kemitraan dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan.

Isu-Isu Sosial Yang Relevan Dengan Perusahaan

Perusahaan sebagai perusahaan yang memperoleh keuntungan dari masyarakat harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perusahaan yang tidak hanya memperhatikan kinerja ekonomi, namun harus tetap memperhatikan kinerja sosial. Dengan adanya CSR Perusahaan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada Perusahaan untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan.

Lingkup Dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang kemasyarakatan adalah dalam hal memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak. Kegiatan CSR ini ditujukan kepada seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat sekitar Kantor Perusahaan dan masyarakat luas.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Sebagai bagian dari masyarakat, PIDC senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, PIDC berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat sejahtera.

Kegiatan Dan Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Pada tahun 2021, PIDC telah mengadakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan seperti bantuan sosial, keagamaan dan lain sebagainya sehingga memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan kepercayaan kepada PIDC.

Kegiatan CSR Di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan dan Strategi CSR di masa Pandemi COVID-19 dan Kenormalan Baru

- Bantuan Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Masyarakat
- Bantuan Sanitaser dan Penyemprotan Disinfektan
- Penyediaan tempat cuci tangan di berbagai lokasi strategis mengurangi dampak pandemi COVID-19.

Program CSR Unggulan di masa Pandemi COVID-19 dan Kenormalan Baru

- Bantuan Sembako Penanggulangan Pandemi COVID-19

Kegiatan Sosial Dan Lingkungan

Di tahun 2020, berbagai kegiatan dilaksanakan PIDC dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai salah satu sarana terbaik

untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Program yang telah dilaksanakan dalam bentuk kontribusi berupa Rumah Layak Huni, bantuan sembako sarana dan prasarana, bantuan organisasi sosial, bantuan untuk masyarakat miskin, pembangunan taman dan lain-lain.

Dampak Kegiatan

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan Bina Lingkungan (BL) dan lebih dikenal *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan Perusahaan sepanjang tahun 2021 diharapkan dapat memberikan dampak berupa pemerataan dan perbaikan ekonomi masyarakat di lingkungan pelaksanaan program TJSL dan BL sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.



Menyediakan bantuan transportasi untuk pasien Covid kerjasama dg PT PELNI dn RS PELNI Petamburan



Pemberian santunan ke Yayasan Yatim Piatu





4

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI

PT PIDC sangat menyadari, teknologi informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi bisnis Perusahaan, agar dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif.

Profil
PerusahaanAnalisis dan
Pembahasan
ManajemenTanggung
Jawab Sosial
Perusahaan**LAPORAN
TEKNOLOGI
INFORMASI**Laporan
Sumber Daya
ManusiaTata Kelola
Perusahaan
Yang BaikLaporan
Keuangan

Teknologi Informasi sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Oleh karenanya, PIDC senantiasa berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi. Melalui layanan berbasis Teknologi Informasi, PIDC berharap mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dan senantiasa melaksanakan perbaikan proses bisnis.



KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Teknologi Informasi dan penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang baik serta pemenuhan terhadap Peraturan PIDC telah melakukan penyusunan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, Penyediaan Jasa Teknologi Informasi oleh Perusahaan.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Divisi Teknologi Informasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan bisnis PIDC yang telah ditetapkan oleh manajemen. Guna mengembangkan dan menyiapkan kemampuan Sumber Daya Manusia agar dapat menunjang pekerjaan di bidang Teknologi Informasi, pegawai pada Divisi Teknologi Informasi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan *workshop*. Pada tahun 2021 PIDC telah mengikutsertakan pegawai Divisi Teknologi Informasi dalam beberapa Pelatihan.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT PIDC – *IT GOVERNANCE*

Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI

Laporan Sumber Daya Manusia

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Laporan Keuangan

PENGELOLAAN LINGKUNGAN





**PENGELOLAAN
PERANGKAT KERAS**



**PENGELOLAAN
PERANGKAT LUNAK**



**PENGELOLAAN
FILE**



**PENGELOLAAN
BACKUP / RESTORE**



WEBSITE CORPORATE dan SOSIAL MEDIA: Instagram @pelniservices

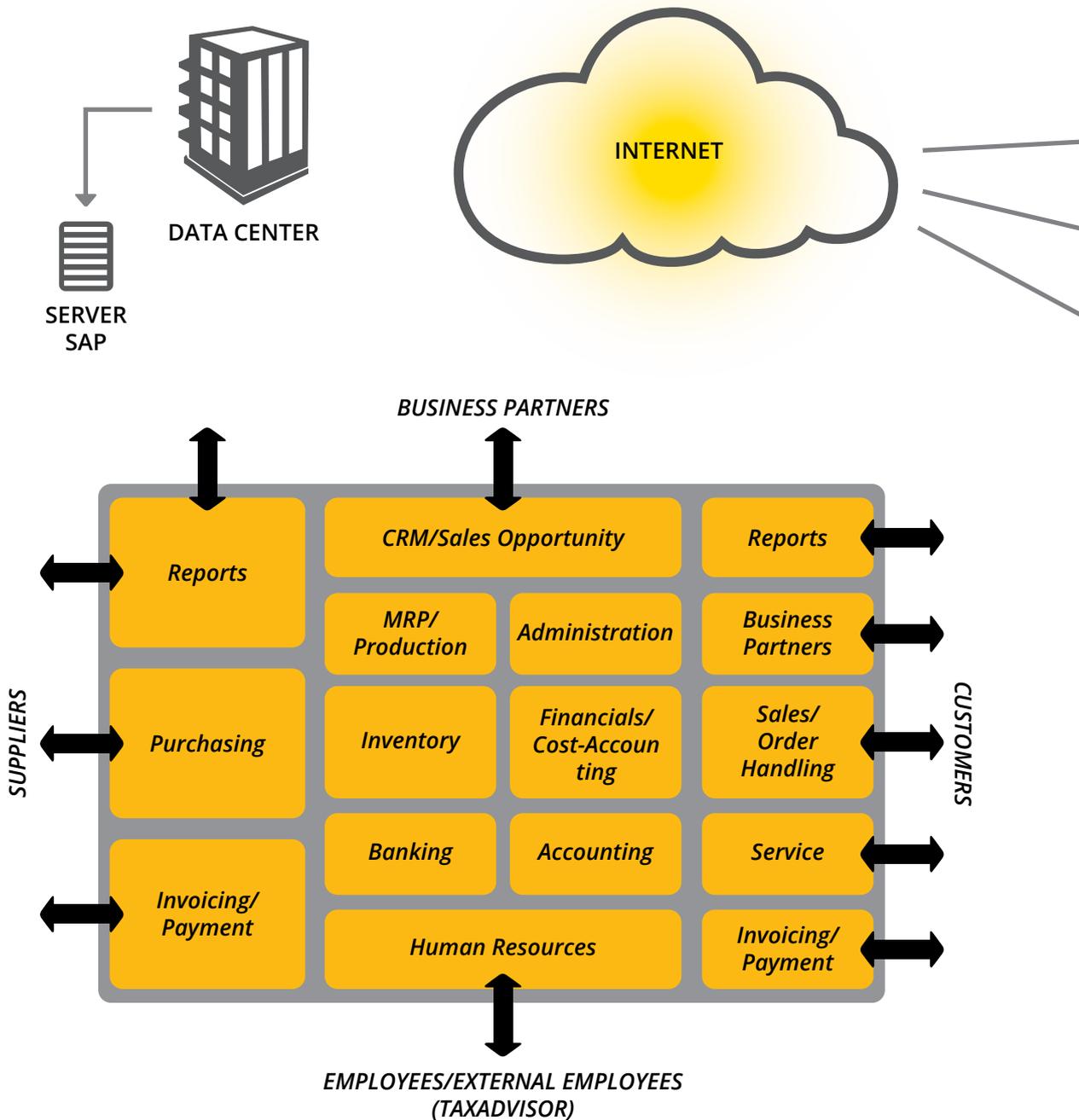
- Profil Perusahaan
- Analisis dan Pembahasan Manajemen
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI**
- Laporan Sumber Daya Manusia
- Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- Laporan Keuangan

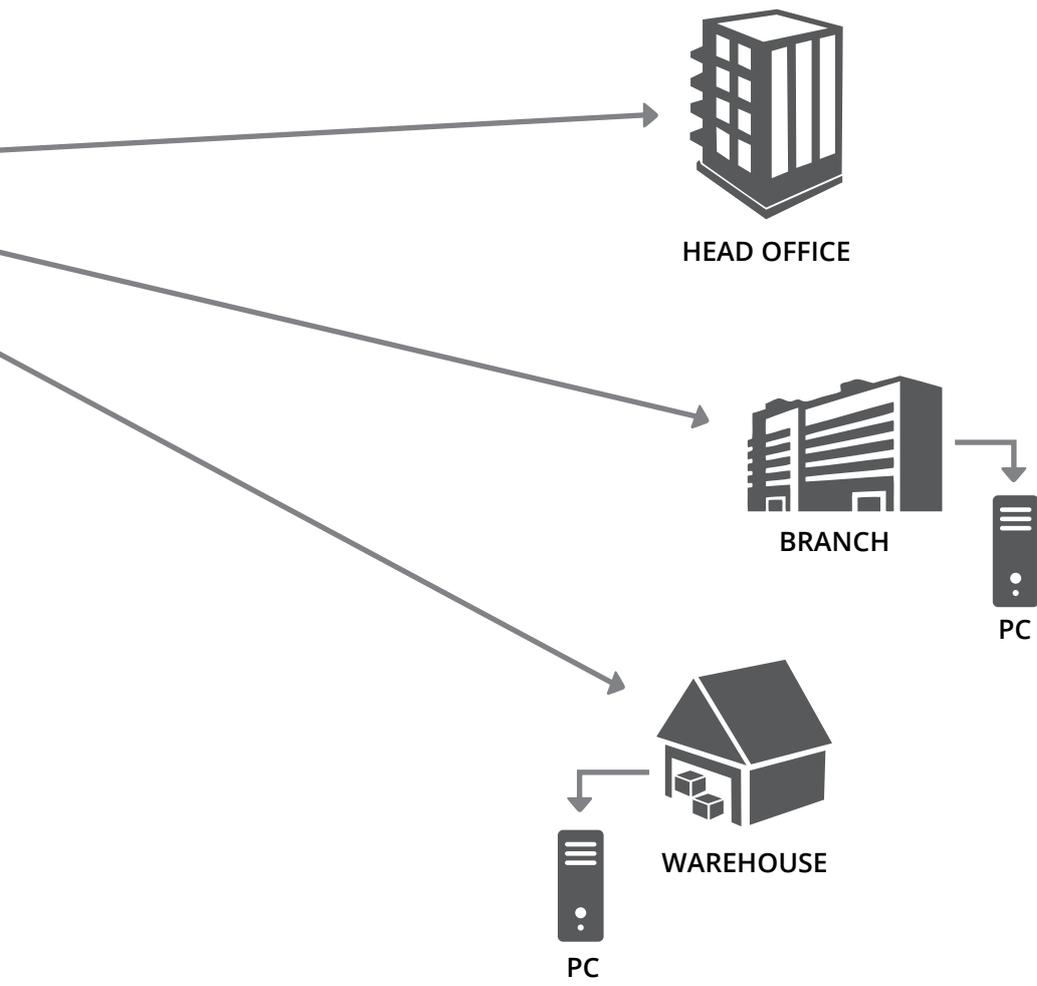




- Profil Perusahaan
- Analisis dan Pembahasan Manajemen
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- LAPORAN TEKNOLOGI INFORMASI**
- Laporan Sumber Daya Manusia
- Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- Laporan Keuangan

APLIKASI SYSTEM KEUANGAN SAP



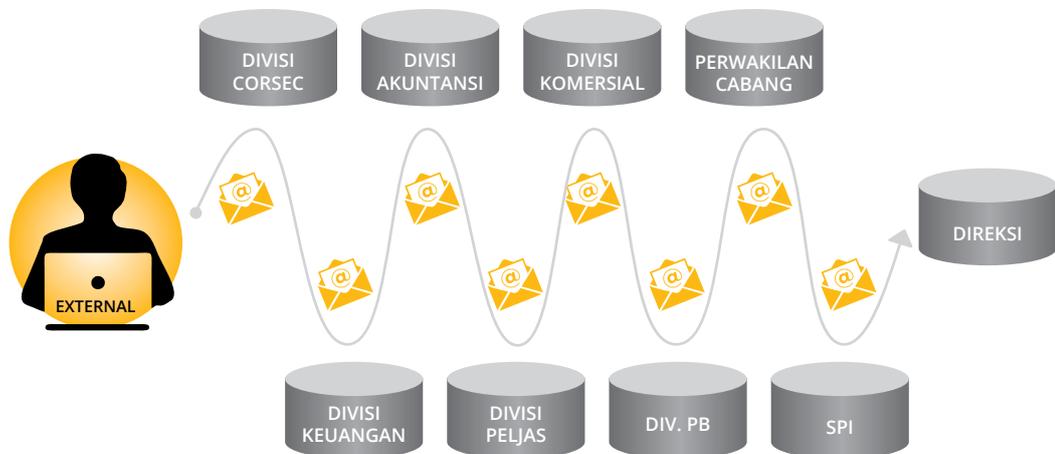


Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (E-Mail)

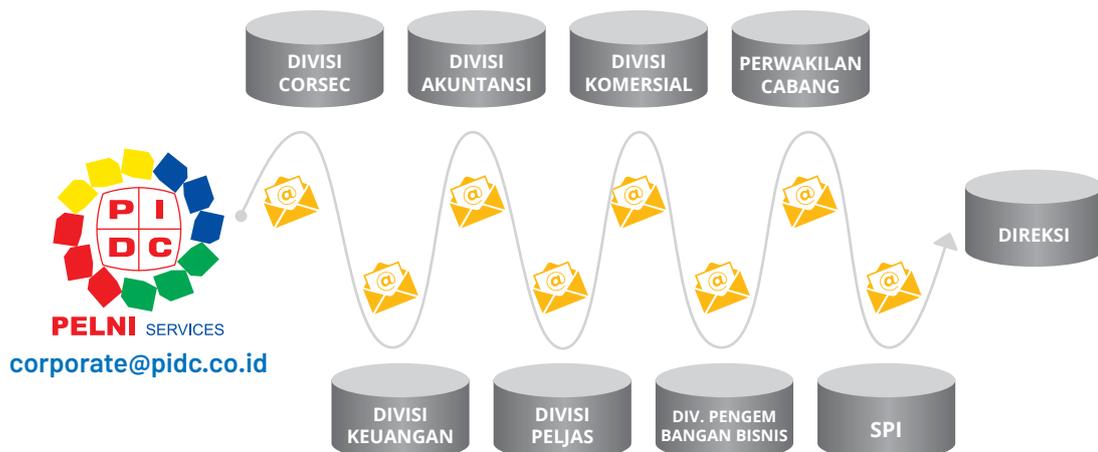
1. User external kirim email ke alamat corporate@pidc.co.id sebagai main email PT PIDC



Atau User external kirim email langsung ke account email divisi unit kerja/account email Direksi.



2. PIC email corporate @ PT PIDC.co.id share email ke masing-masing email divisi unit kerja dan email Direksi.

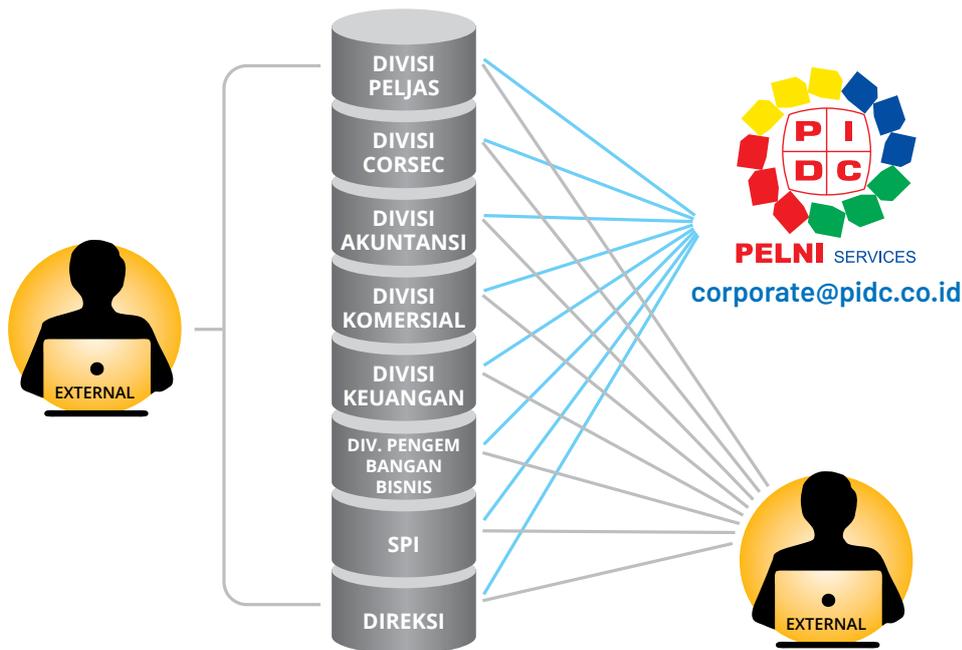


Catatan:

PIC back Up berkala *attachment email* masuk (24 *hourse x 1*), dan di kelola rapih sebagai *database/ dokumentasi* dengan media *external HDD (hardisk)*. PIC diberikan hak acces pada *account email* direksi (direktur Utama dan Direktur Operasi).

System Response

3. Pada saat merespon *email* pihak *user external* tersebut tiap Divisi unit kerja atau Direksi diperkenankan merespon langsung melalui *account email* Divisi / Direksi masing-masing di cc: ke *email corporate@pidc.co.id (main email)*.



Dari *account Gmail* *ptpidc@gmail.com* ke *account email corporate@pidc.co.id*

1. Jika pihak *user external* kirim email ke *account Gmail* pada saat merespon harus *via email corporate@pidc.co.id*.
2. Tidak diperkenankan merespon email pihak ke-3 melalui *account Gmail*.
3. Selama masa peralihan tersebut, *account Gmail* hanya untuk menerima *email* pihak ke-3.
4. *Account Gmail* dapat digunakan untuk merespon apabila terjadi kendala, dan proses *maintenance* pada *account corporate*.
5. *Account Gmail* tetap dapat di *acces* oleh masing-masing divisi unit kerja.
6. *Account personal domain @pidc.co.id* digunakan untuk pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
7. Hubungi dan laporkan bila ada kendala pada saat pelaksanaannya ke *Staff IT*.

INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI SELAMA 2021

Teknologi Informasi merupakan kebutuhan utama PIDC untuk berkompetisi dengan Perusahaan Berikut ini Inovasi Penguatan Platform Teknologi Informasi meliputi:

1. *Maintenance* Jaringan SISKOMKAP di 26 Kapal PT PELNI (Persero)
 2. Pemasangan Siskomkap di 3 Kapal Perintis
 3. *Delivery* dan instalasi *Vending Machine*
 4. Develop Aplikasi *Vending Machine by WEB*
 5. Develop Aplikasi *Invoice*
 6. Develop Aplikasi WMS
 7. *Maintenance* Jaringan Sinet
 8. Relokasi *Server WMS ke Cyber*
 9. Pengadaan ERP
 10. Pengadaan kertas cetak *Boarding Pass*
 11. Pengadaan Layanan Link BMKG
2. Mengembangkan area, fasilitas dan jumlah *Workshop* untuk mendukung pekerjaan *maintenance* yang dijalankan dengan membuat standarisasi *Workshop*
 3. Meningkatkan efektivitas kegiatan operasional untuk pekerjaan Jasa *Maintenance* dengan menyusun dan menjalankan mekanisme/ prosedur kerja yang baku
 4. Mengoptimalkan pendapatan dari pasar *non-captive* untuk pekerjaan *Maintenance* dengan bekerjasama bersama pelanggan / mitra bisnis yang baru
 5. Mengoptimalkan pasar *non-captive* untuk pekerjaan IT dengan pemasangan *outside plan fiber optic (OSP/FO)*
 6. Menerapkan dan mengaplikasikan system IT untuk menunjang segala jenis pekerjaan
 7. Meningkatkan jumlah *vending machine* di Pelabuhan
 8. Mengoptimalkan usaha yang sudah dijalankan yaitu *Tenant Link* dan Siskomkap

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2021

Divisi Jasa *Maintenance* dan Teknologi Informasi telah membuat rencana pengembangan teknologi informasi PIDC tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan ketersediaan peralatan, sarana, prasarana dan tenaga profesional serta kehandalan alat untuk pekerjaan Jasa *Maintenance* dengan membuat *monitoring* secara berkala



PELNI SERVICES

DEPARTURE
COUNTER
KEBERANGKATAN

DEPARTURE
COUNTER
KEBERANGKATAN

1

2



1A

1B



5

LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan manajemen yang bagus dan terarah terkait pengelolaan SDM, akan menghasilkan sebuah kinerja yang positif bagi kelangsungan usaha, dan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat.

PIDC menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

Kami senantiasa berkomitmen memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, profesional dan berkemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta menjawab tantangan baru. Kami terus berupaya mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan profesionalisme.

Kami memperlakukan SDM sebagai partner usaha strategis dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kehadiran pegawai yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuannya.

Pimpinan dan sumber daya manusia PIDC, telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola bisnis perusahaan konvensional. Sejalan dengan tantangan bisnis kedepan, terutama dalam menghadapi persaingan di era digitalisasi, PIDC merespon secara tepat, baik dari aspek bisnis, operasional, maupun dari aspek pengelolaan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, PIDC telah menyusun perencanaan strategis pengelolaan sumber daya manusia PIDC, yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan, guna menjamin keberlangsungan usaha PIDC kedepan.

Peseroan memperlakukan SDM sebagai aset yang paling berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur gender maupun ras. Peseroan menjamin hak dan kewajiban setiap Karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

KOMPOSISI SDM

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan

JENJANG JABATAN	2020	2021
Direktur	1 Orang	2 Orang
Kepala SPI	1 Orang	1 Orang
Senior Manager	6 Orang	6 Orang
Manager	7 Orang	12 Orang
Asisten Manager	11 Orang	8 Orang
Staf (Kantor Pusat)	107 Orang	100 Orang
Karyawan Produksi	1.265 Orang	1.362 Orang
Anak Perusahaan	11 Orang	20 Orang
TOTAL	1.409 Orang	1.511 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

JENJANG JABATAN	2020	2021
Kontrak	1.357 Orang	1.453 Orang
Tetap	52 Orang	57 Orang
TOTAL	1.409 Orang	1.511 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Perseroan secara berkelanjutan berusaha mempertahankan komposisi tingkat pendidikan pegawai dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan perubahan bisnis. Komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan secara lengkap tersaji di bawah sebagai berikut:

JENJANG JABATAN	2020	2021
> Strata 2 (S.2)	9 Orang	8 orang
Strata 1 (S.1)	233 Orang	87 orang
Diploma	37 Orang	54 orang
< SMA	1.130 Orang	1.362 orang
TOTAL	1.409 Orang	1.511 Orang

Kegiatan Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan terkait dengan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai Perkembangan Perusahaan.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM

Sistem pengembangan sumber daya manusia di PIDC dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan menuju kinerja bisnis terbaik di era digital. PIDC menjadikan SDM sebagai tenaga pendukung utama setiap aktivitas operasional. Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

PIDC menyusun perencanaan SDM jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar.

Perencanaan SDM PIDC dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Sumber Daya Manusia. Perencanaan SDM

meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan pegawai, dan analisis pemenuhan kebutuhan SDM.

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia

PIDC memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu Pemangku Kepentingan yang memiliki peran kunci bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan serta memandang SDM sebagai mitra strategis dalam menjalankan usaha. Oleh karenanya PIDC senantiasa berupaya mengelola dan meningkatkan kompetensi serta menciptakan lingkungan kerja kondusif untuk memastikan kinerja SDM yang optimal, efisien dan produktif.

Strategi pengelolaan SDM yang diterapkan PIDC merupakan *alignment* terhadap visi dan misi, strategi serta budaya perusahaan. Untuk itu, PIDC melakukan serangkaian upaya yang berkesinambungan dan terarah dalam melakukan program pengembangan SDM. Untuk mempertahankan kesinambungan dalam pengembangan organisasi, PIDC menerapkan pengelolaan SDM melalui strategi-strategi peningkatan kualitas SDM PIDC sebagai berikut,

1. Proses rekrutmen yang selektif baik yang bersifat *replacement* maupun pengisian posisi-posisi *vacant* sesuai dengan kebutuhan.
2. Program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai melalui berbagai program baik *in-house* maupun *public training* seiring dengan perkembangan bisnis dan *volume* usaha Perusahaan .
3. Proses rotasi, mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi Perusahaan sekaligus sebagai jenjang karir pegawai.
4. Pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan pegawai secara terus menerus seiring dengan pencapaian dan perkembangan bisnis dan usaha Perusahaan .
5. Penerapan peraturan internal sebagai panduan Perusahaan dan pegawai agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, dan dinamis.

Dalam rangka pengembangan bisnis dan usaha serta produktivitas, PIDC secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif serta memberikan kesempatan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Kebijakan rekrutmen dilaksanakan untuk memenuhi sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan sehingga menjamin terpenuhinya upaya peningkatan Bisnis Perusahaan. PIDC memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perusahaan, tanpa memandang unsur gender, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan *fair*, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan

pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ruang lingkup proses rekrutmen meliputi:

1. Perencanaan dan persiapan rekrutmen
2. Pelaksanaan seleksi
3. Hasil seleksi

Kebijakan rekrutmen bertujuan untuk:

1. Merancang proses rekrutmen yang handal, sehingga calon pegawai yang akan menjalani seleksi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;
2. Mencapai visi dan misi perusahaan secara optimal melalui ketersediaan sumber daya manusia yang bekerja secara profesional;
3. Memperoleh pegawai yang berkualitas berdasarkan syarat dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

PIDC menyadari SDM memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan. Keterlibatan SDM yang berkualitas akan memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, PIDC senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik yang dilakukan oleh pihak internal melalui Lembaga Pendidikan, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal.

Perencanaan pengembangan sumber daya manusia disusun setiap tahun, yang meliputi antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengembangan karir dapat dipahami sebagai pendekatan formal dalam upaya peningkatan atau perbaikan, pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan dan kemampuan pegawai agar dapat memastikan bahwa orang-orang yang berkualifikasi dan pengalaman yang tepat

tersedia ketika dibutuhkan, dengan demikian perencanaan dan pengembangan karir yang jelas akan membantu pegawai dan organisasi dalam meraih keberhasilan.

Pengembangan karir harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi promosi tetapi juga dari sisi peningkatan kapabilitas, perluasan kewenangan, pengembangan individu dan peningkatan remunerasi.

PENGEMBANGAN SDM

Peningkatan sumber daya manusia PIDC melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan tahun 2021 untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara menyeluruh baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, PIDC mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop* baik secara internal maupun secara eksternal bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan serta profesionalitas.

Dalam tahun 2021, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *Coaching* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan khusus.

Manajemen dan Penilaian Kinerja

Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta KPI Perseroan. Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

Penerapan Penghargaan dan Sanksi

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan berdasarkan pencapaian kinerja secara adil dan obyektif. Prestasi kinerja terbaik akan memperoleh penghargaan demikian sebaliknya bagi Karyawan yang tidak berprestasi maupun melakukan pelanggaran memperoleh sanksi.

Remunerasi Pegawai

Penentuan dan pemberian remunerasi pegawai tunduk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMR), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan terkait lainnya.

- Tunjangan Hari Raya Gaji Ke-13 SK Direksi No05.10/DIR/SK/001/100/2021.
- Pemberian Jasa Produksi Tahun 2021 1 (satu) bulan gaji ke-16 SK Direksi Nomor: 11.30/DIR/SK/001/100/2021.
- Pemberian Tunjangan Pendidikan gaji ke-14 SK Direksi No: 10.01/DIR/SK/001/100/2021.
- Pemberian gaji ke-15 akhir tahun 2021 SK Direksi No 01.05/DIR/SK/001/100/2022.

Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan serta mempertahankan Karyawan, Perseroan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi
- Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan; dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga;
- Bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.
- Dan lain-lain

TURNOVER

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada pegawai, perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu JK, JKK dan JHT pada pegawai juga telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Pensiun. Terkait pemenuhan normatif kewajiban paska kerja/pemberian pesangon, kepada pegawai organik perusahaan telah memprogramkan Jaminan Hari Tua.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

PIDC memiliki sistem penilaian kinerja pegawai yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menilai performa/kinerja unit kantor yang dinilai setiap triwulan/tahunan dan Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja pegawai setiap setahun sekali. Penilaian SKI secara aktif akan membimbing para pegawai dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha PIDC serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Internalisasi Budaya

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama PIDC. Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana PIDC jugatelah menetapkan budayaperusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi PIDC untuk memastikan setiap pegawai mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *Good Corporate Governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan

kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas pegawai dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha PIDC.

Tim Internalisasi Budaya

Dalam menjalankan internalisasi budaya perusahaan, PIDC melibatkan seluruh pegawai mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja.

Program Internalisasi Budaya

Selama tahun 2021 PIDC telah melaksanakan program internaslisasi budaya, di antaranya sebagai berikut,

- Mengenalkan dan mensosialisasikan sejak awaltentang budaya perusahaan yang berlaku di PIDC yaitu sejak pegawai mengikat kontrak kerja dengan PIDC.
- Selalu mensosialisasikan kepada pegawai disetiap kesempatan misalnya pada saat *briefing* pagi atau pada pertemuan-pertemuan internal lainnya.
- Membuat dan memberikan buku saku yang berisi budaya perusahaan kepada pegawai.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

PIDC memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, *workshop* dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PIDC dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan
2. Penetapan Tujuan
3. Pengembangan Metode Pelatihan
4. Pengembangan Materi Pelatihan
5. Pelaksanaan Pelatihan
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya.

Program Peningkatan/Pengembangan Kompetensi

Dalam tahun 2021, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *Coaching* sebanyak 114 orang yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan - pengetahuan dan kemampuan khusus sebagai berikut:

- Diklat Dasar-Dasar Audit
- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Gada Pratama tingkat POLDA Angkatan Pertama
- Diklat Gada Pratama tingkat POLDA Angkatan Kedua
- Diklat ISO 22000:2018 Sitem Manajemen Keamanan Pangan.

TUJUAN PELATIHAN

Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir pegawai itu sendiri. Pegawai akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekarang dan antisipasi pengembangan tugas ke depan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pengembangan kualitas dan kompetensi Pegawai dilaksanakan sesuai dengan pedoman *blue print* edukasi PIDC yang telah dirumuskan sebagai berikut:

KESEMPATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PIDC merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kinerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun PIDC berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. PIDC berupaya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

PIDC menetapkan standarisasi penilaian kinerja pegawai menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator (KPI)*. Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing pegawai. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pegawai.

REWARD AND PUNISHMENT

Sistem *reward and punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Perusahaan. Sistem *reward and punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem *reward and punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola karyawan dengan tepat, sehingga target perusahaan dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward and punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan

Profil
Perusahaan

Analisis dan
Pembahasan
Manajemen

Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan

Laporan
Teknologi
Informasi

**LAPORAN
SUMBER DAYA
MANUSIA**

Tata Kelola
Perusahaan
Yang Baik

Laporan
Keuangan

agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk punishment antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward*, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Penerimaan Sumber Daya Manusia baru akan dilaksanakan guna menunjang pemenuhan pegawai pada jaringan kantor baru, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti pegawai yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya serta pertimbangkan hasil *Work Load Analysis (WLA)*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan, salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran secara serempak dapat dilaksanakan untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapan pun serta dapat diikuti setiap pegawai.







6

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan Perusahaan. Karena itu, PT PIDC memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara benar dan konsisten, serta terus berusaha untuk menyempurnakan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dimilikinya.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) telah menjadi landasan yang kuat bagi PIDC untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* yang merupakan komitmen kuat PIDC, demi kepentingan Pemilik Saham (Oleh karenanya PIDC selalu menjaga kepercayaan, kredibilitas serta upaya kontinuitas terkait produk dan jasa yang mana menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan).

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di bidang perPerusahaan an.

Dalam melaksanakan implementasi GCG, Perusahaan II melakukan sosialisasi secara terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG. Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran.

DASAR DAN PENERAPAN GCG

Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di PIDC adalah niat dan tekad manajemen PIDC untuk menjadikan PIDC sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki *Code of Conduct*, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Tujuan Penerapan GCG di PIDC adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perusahaan

(Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.

2. Mendorong dan mendukung pengembangan PIDC.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PIDC.
7. Memperbaiki budaya kerja PIDC.
8. Meningkatkan citra PIDC (*image*) menjadi semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PIDC memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi PIDC dalam penerapan GCG yaitu:

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PIDC

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Selama tahun 2021, manajemen memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan telah memiliki *code of conduct* yang dijadikan sebagai dasar rujukan bagi setiap personil dalam bertindak di dalam relasinya dengan pelaksanaan tugas.

Seluruh personil berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi serta tidak melaksanakan praktik-praktik KKN melalui penandatanganan pakta integritas.

Dalam rangka menilai komitmen perusahaan dalam melaksanakan praktik GCG, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR: PER01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ditandai dengan melakukan kegiatan dengan pihak ketiga (Diklat ISO).

Perusahaan telah melakukan *assesment* kriteria penilaian kinerja unggul berbasis Malcolm Baldrige.

Perusahaan mengevaluasi Standard Operasional Perusahaan (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa.

Perusahaan membuat SOP Pengadaan Barang dan Jasa bidang Permakanan dan Jasa *Maintenance* secara swakelola.

Perusahaan menerbitkan kebijakan akuntansi dan keuangan tentang mekanisme perlakuan dan pencatatan uang muka dan pertanggungjawaban kegiatan swakelola.

Komitmen Implementasi GCG

Bagi PT. Pelita Indonesia Djaya, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance - GCG*) merupakan prinsip yang senantiasa mengarahkan Perusahaan dalam mengendalikan seluruh kegiatan usaha, mulai dari operasional, keuangan hingga sumber daya manusia untuk memastikan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diberikan kepada Perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan. Implementasi GCG senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapannya dibuat sejalan dengan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Transparency**

Perusahaan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat melalui jalur komunikasi yang memadai secara terbuka sehingga dapat dengan mudah diakses oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. **Accountability**

Perusahaan memiliki sistem manajemen yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan.

3. **Responsibility**

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip korporasi yang sehat.

4. **Independency**

Perusahaan memastikan diri bebas atau tidak terikat dengan benturan kepentingan yang berpotensi untuk menempatkan Perusahaan dalam tekanan dari pihak manapun.

5. **Fairness**

Perusahaan memberikan perhatian yang setara kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dengan membuka diri terhadap segala masukan dan saran yang ingin disampaikan oleh seluruh pemangku kepentingan guna menjamin hubungan imbal balik yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebijakan GCG

Kebijakan tata kelola Perusahaan yang baik antara lain meliputi pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara Direksi dan Dewan Komisaris, *check and balances*, strategi Perusahaan yang jelas, etika bisnis, hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, dan pengawasan operasional.

Beberapa pedoman-pedoman dan kebijakan Perusahaan dalam pelaksanaan penerapan GCG meliputi:

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*),

- a. Pedoman Kebijakan Perusahaan (*Code of Corporate Governance*),
- b. *Board Manual*,
- c. Piagam Komite Audit
- d. Piagam Satuan Pengawasan Intern,
- e. Kebijakan Pengelolaan Risiko,
- f. Peraturan Perusahaan
- g. Kebijakan lainnya yang berhubungan

dengan *stakeholders* yang mengatur hak dan kewajiban karyawan, pelanggan, dan pemasok.

Tujuan Penerapan GCG

PIDC mengimplementasikan GCG sebagai sebuah strategi fundamental dalam melakukan transformasi dan turnaround, yang diharapkan dapat menciptakan PIDC sebagai sebuah korporasi yang berkelanjutan (*sustainable company*). Untuk itu dengan menerapkan GCG, PIDC memiliki tujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan untuk membangun daya saing yang kuat, dalam menjaga etika dan integritas agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perusahaan;
3. Mengarahkan serta mengendalikan hubungan kerja antara organ PIDC;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan SDM yang profesional;
6. Meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan PT Pelita Indonesia Djaya serta peningkatan kemanfaatan bagi *Stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PIDC;
8. Memperbaiki Budaya Kerja PIDC.

Pengukuran Implementasi GCG

PIDC secara berkala melakukan pengukuran atas implementasi tata kelola perusahaan. Melalui proses pengukuran tersebut, PIDC memiliki tujuan untuk:

- Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
- Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan

antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.

- Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi PIDC, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
- Mendorong pengelolaan PIDC yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PIDC.

Mekanisme dan Struktur GCG

Mekanisme GCG merupakan mekanisme atas implementasi tata kelola perusahaan yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi tata kelola perusahaan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme GCG dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PIDC Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambar pada Organ PIDC yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ PIDC yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah Organ PIDC yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- Direksi adalah Organ PIDC yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PIDC untuk kepentingan PIDC, sesuai dengan maksud dan tujuan PIDC serta mewakili PIDC, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Struktur GCG



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tingkat kekuasaan tertinggi yang tidak bisa diberikan kepada Direksi atau Komisaris dan pihak lain dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang PIDC dan/atau Anggaran Dasar PIDC.

Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Keputusan Rups:

1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan selama Tahun Buku 2021

- 2) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2021;
- 3) Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;
- 4) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.

DEWAN KOMISARIS

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Komposisi Komisaris

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
MUHAMMAD TUKUL HARSONO	Komisaris Utama	Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelita Indonesia Djaya tertanggal 13 Desember 2019 Nomor: 5 tentang Penunjukkan Plt Komisaris Utama PT. Pelita Indonesia Djaya Notaris IDA ADININGSIH, SH. Dengan nomor SK Kemenkumham AH 0242605.AH01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019

Independensi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bersifat independen, tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang telah disahkan.

Laporan Tugas Pengawasan 2021

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS atas laporan tahunan tahun buku 2021 dan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2021 ;
- Memberikan pendapat dan saran serta tanggapan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi atas hasil kinerja tahun buku 2021 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tahun 2021;
- Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja bulanan perusahaan dan memberikan saran dan pendapat dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan;
- Memberikan saran terkait dengan hal-hal yang harus segera diselesaikan di tahun 2021;

- Memperoleh akses informasi Perusahaan yang diberikan manajemen secara tepat waktu dan lengkap;
- Tidak melakukan transaksi yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan dan keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan;
- Menelaah draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2020 yang diajukan oleh Direksi dan menyampaikan pendapat/saran kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan;
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 untuk mendapat persetujuan oleh RUPS yang merupakan bagian dari pengesahan RKAP tahun 2019;
- Memberikan arahan, saran dan pendapat terkait dengan pengelolaan Perusahaan;
- Kunjungan Kerja Direksi dan Organ Dewan Komisaris ke Gudang.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.30/04/S-B/090/2021 tanggal 30 November 2021 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/

MBU/09/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap saat apabila dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris, seorang atau lebih anggota Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2021

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti seminar, *training* dan *workshop*.

Organ Dewan Komisaris

Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/01/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko Pada Dewan Komisaris PT. PELITA Indonesia Dajaya berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/02/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

DIREKSI

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Komposisi Direksi

NAMA	JABATAN	DASAR PENGANGKATAN
EFFENDI	Direktur Utama	Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 5 tanggal 12 Februari 2020 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih.S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor: AHU-AH.01.03-0116585 tanggal 02 Maret 2020 Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya nomor 5 tanggal 12 Februari 2020.
ROOSHARDIANTI	Direktur Operasi	

Independensi Direksi

Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, anggota Direksi bertindak secara mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pihak mana pun.

Tanggung Jawab Direksi dan Pembagian Tugas Direksi

1. Direktur Utama

Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan Perusahaan di antaranya internal audit, *legal and contract*, dan corporate secretary di mana seluruh kegiatan tersebut dikaitkan dengan usaha pencapaian visi dan misi Perusahaan.

2. Direktur Operasi

Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan pembuatan kebijakan operasi Perusahaan meliputi Divisi Pengembangan Usaha, Divisi Pelayanan dan Jasa dan Divisi Komersial, Divisi Akuntansi, Divisi Keuangan, Divisi SDM & Umum serta mengevaluasi

Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. Pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai kinerja perusahaan, namun tidak terbatas pada pengukuran kinerja Perusahaan menyangkut kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan juga dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat ini juga bertindak sebagai sebuah forum sharing (saling berbagi) antara anggota Direksi mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Remunerasi

Remunerasi Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PTPIDC) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya Nomor:

11.30/04/S-B/090/2021 tanggal 30 September 2021 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-13/MBU/09/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2021

Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2021, Anggota Direksi telah mengikuti seminar, *training* dan *workshop*.

Laporan Pelaksanaan Direksi Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT Pelita Indonesia Djaya. Beberapa perubahan strategis dari sisi perencanaan maupun sistem manajemen perusahaan dilakukan di sepanjang tahun 2021, selanjutnya tahun 2021 melakukan perubahan dan revisi terhadap RKAP 2021 dalam rangka penyesuaian terhadap dampak covid-19 yang kemudian membawa pengaruh kepada tingkat pencapaian target RKAP 2021.

Dengan berbagai tantangan yang ada tersebut, manajemen mengambil berbagai kebijakan baik di bidang operasional maupun manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berkat upaya tersebut dan didorong oleh kerja keras dari personel di semua lini, Perusahaan berhasil menutup tahun 2021 dengan kinerja keuangan dan operasional yang sudah mencukupi.

Beberapa prinsip utama yang diterapkan oleh manajemen dalam melakukan perubahan kebijakan pada tahun 2021, yaitu:

1. Komitmen pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi Perusahaan
2. Menjaga keseimbangan dalam mencapai pertumbuhan yang baik dan berkualitas.
3. Meningkatkan kompetensi, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.

Inisiatif tersebut kemudian diturunkan kepada kebijakan strategis di masing-masing satuan

kerja. Di bidang operasional, komitmen perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan. Dalam tahun 2021 penyampaian keluhan pelanggan melalui *SMS center*, surat, buku keluhan, kotak saran, *email* dan langsung dengan petugas.

Peningkatan kompetensi personil dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui *training*, *coaching*, dan *benchmarking*. Di sisi lain, perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi personil yang ada sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2021 Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Lenggo Geni.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
- d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- e. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris
- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

ke depan. Pemenuhan kewajiban pasca kerja karyawan serta pengikutsertaan karyawan ke dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan oleh manajemen.

Manajemen telah membuat asersi (*assertion*) Pernyataan manajemen yang terkandung didalam komponen laporan keuangan serta rangkaian deklarasi secara keseluruhan terkait penyajian Laporan Keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lainnya seperti berikut :

- a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG
- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan PIDC mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai *liaison officer (public relation/corporate communication), institution relations, GCG implementation, monitoring* pencapaian *Key Performance Indicator (KPI), monitoring* pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi.

Sampai akhir Desember 2021 Perusahaan telah memiliki Sekretaris Perusahaan. Adapun peran dan fungsi Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh bapak Irwan Sudirwan sebagai Senior Manager SDM dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK Dir 10.19/SK/Dir/100/001/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



ICHWAN ANANDA

Lahir di Cirebon tahun 1986, kemudian menempuh pendidikan pada Universitas Gadjah Mada jurusan Hukum tahun 2013.

Mengawali karir pada tahun 2017 di Rumah Sakit PELNI sebagai Humas & Senior Staff Hukum. Di tahun 2019 bergabung di PT PIDC sebagai Legal & Corporate Secretary Manager.

Laporan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2021 Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal.
2. Melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi, dan kerumahtanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris
3. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja
4. Menyelenggarakan RUPS, *corporate actions* dan *public expose*
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/ lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris
6. Mengkoordinir/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris
7. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi korporasi
8. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada calon investor, pelanggan dan masyarakat
9. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak *stakeholders*
10. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi
11. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal
12. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan perusahaan
13. Menyiapkan laporan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku
14. Mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
15. Memberikan keterangan pers (pers release) mengenai kebijakan Perusahaan
16. Mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulanan Perusahaan
17. Laporan Manajemen, Annual Report serta RJPP
18. Mengusulkan tindakan koreksi maupun tindakan preventif terhadap setiap kejadian operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian
19. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal, internal dan mitra kerja

Akses Data dan Informasi Perusahaan

Untuk memperkuat upaya penerapan GCG, PIDC berupaya memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) melalui pengembangan sistem teknologi informasi yang kuat dan handal.

PIDC menyadari bahwa penyebaran informasi kepada *stakeholders* merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media *website*, Buletin Sejahtera, dan sebagainya.

Stakeholder Perusahaan juga dapat memperoleh informasi mengenai produk dan manfaatnya, tentang polis, pembayaran premi, klaim, perubahan polis, dan lain-lainnya ke alamat PIDC

Laporan Audit Internal

Sumber daya Unit Audit Internal pada tahun 2021 berjumlah 1 Orang.

Syarat & Kompetensi Sumber Daya Unit Audit Internal

Untuk menjadi Auditor Internal, harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- Memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan;
- Secara kolektif memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi;
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundang-undangan terkait lainnya;

- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh *International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*;
- Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan;
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;

Internal Audit Charter

PIDC telah memiliki *Internal Audit Charter* yang menjadi dasar dan panduan pelaksanaan kegiatan Audit Internal.

Tujuan pembentukan *Internal Audit Charter* adalah:

1. Menetapkan posisi kegiatan Unit Audit Internal dalam Organisasi;
2. Memberikan otorisasi kewenangan kepada Unit Audit Internal dalam memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap semua catatan dan atau informasi tentang seluruh aktivitas dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Menetapkan lingkup tugas dan aktivitas Audit Internal.

Tugas dan Kewenangan Unit Audit Internal

Berdasarkan *Internal Audit Charter*, tugas dan kewenangan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membuat pelaksanaan audit tahunan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada Komite Audit dan *Compliance*, serta membuat rekomendasi perbaikan
3. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam pelaksanaan audit, apabila ada atau diperlukan, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit.

Pembinaan SDM dan Pengembangan Profesi Audit

Pengembangan kompetensi bagi auditor PIDC dilakukan melalui pelatihan pada institusi pelatihan dalam bentuk kursus atau seminar/ lokakarya terkait dengan masalah auditing baik yang dilaksanakan oleh internal Perusahaan maupun Lembaga Pendidikan Eksternal lainnya.

Program Kerja dan Laporan Unit Audit Internal 2021

Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal

- 1) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
- 2) Mengevaluasi integritas dan kehandalan, informasi dan sarana yang Digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi;
- 3) Mengevaluasi sistem yang dibuat untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundang-undangan yang dimiliki, serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan organisasi;
- 4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai kebijakan perusahaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas pada bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya dalam organisasi sesuai dengan *Good Corporate Governance*;
- 6) Melakukan audit/*review* atas Anak Perusahaan atas permintaan Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat Laporan Hasil Audit dan hasil *review* dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan Auditor eksternal;

- 10) Melakukan evaluasi mutu kegiatan audit internal;
- 11) Melakukan audit khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama;
- 12) Mengidentifikasi kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat resiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya perencanaan audit;
- 13) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit triwulan, semester, *current* audit, *post* audit, dan audit lanjutan (audit khusus)
- 14) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya *Good Corporate Governance* serta mendorong efektifitas sistem pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan resiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;

Pelaksanaan Kegiatan SPI tahun 2021

Evaluasi Pengendalian Intern

- 1) Peran serta audit intern dalam penerapan panduan *Good Corporate Governance*;
- 2) Peran serta audit intern dalam proses manajemen resiko;
- 3) Peran serta audit intern dalam penerapan pedoman perilaku *Code Of Conduct*;
- 4) Peran serta evaluasi *Audit Charter* sesuai perkembangan;
- 5) Peran serta evaluasi Kriteria Penilaian Kerja Unggul (KPKU)
- 6) Hasil evaluasi berdasarkan *review* dan pengumpulan informasi yang relevan serta pemantauan di lapangan ditemukan adanya penyimpangan dan kelemahan yang signifikan dalam proses pengelolaan resiko dan pengendalian intern, dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Administrasi dan Keuangan

Perusahaan telah melakukan kegiatan administrasi keuangan dengan tertib dan baik dan telah melakukan pengendalian pengamanan terhadap aset seperti:

 - a) Sistem pengamanan kas, telah dilakukan secara rutin dengan dilakukan kas *opname* dan dibuat berita acara.
 - b) Sistem pengamanan aset tetap perusahaan, telah dilakukan dengan membuat daftar aset tetap dan penyusutannya secara rinci sesuai pedoman akuntansi.

- c) Pengelolaan pendapatan dan biaya diatur berdasarkan RKAP dan dibuat anggaran pelaksanaan dengan target masing-masing Unit dan Satuan Kerja berdasarkan *Key Performace Indicators (KPI)*, dan Implementasinya dilakukan dengan *monitoring* realisasi anggaran setiap bulan.
 - d) Pemantauan proses rekonsiliasi saldo bank dengan saldo buku perusahaan setiap bulan secara rutin.
 - e) Pemantauan tentang mekanisme perlakuan dan pencatatan uang muka dan pertanggungjawaban untuk kegiatan swakelola
 - f) Mengelola system persediaan bahan baku permakanan di gudang dengan di dukung system aplikasi *WMS (Warehouse Management System)*
2. Kegiatan Operasi

Perusahaan telah melakukan kegiatan operasional dengan tertib dan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah dilakukan pemantauan proses *supply* bahan makanan diatas kapal.
 3. Kegiatan SDM dan Umum

Pada tahun 2020 kegiatan SDM terkait dengan pengembangan SDM telah dilakukan berbagai pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan terkait dengan kegiatan umum telah dilakukan pengamanan aset tetap dengan membuat daftar aset tetap berdasarkan jenis aset.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SPI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tinjau yang pernah disampaikan *auditee*.

Kegiatan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor di tahun 2021 dilaksanakan sepanjang

tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada *auditee* secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Seiring dengan perkembangan usaha perusahaan yang terus tumbuh, PIDC memandang perlu dilakukannya pengendalian internal secara menyeluruh dan terintegrasi serta berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif dan mencegah terjadinya *fraud*.

Fungsi pelaksanaan pengendalian internal dilakukan oleh Direksi melalui Unit Internal Audit. Sedangkan fungsi pengawasan dan penasehatan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

PROFIL SPI



SRI ERNAWATI

Lahir di Jakarta pada tahun 1967, menyelesaikan studi terakhir di PPM Management School dan memulai bekerja di PT PELNI tahun 1990 di Divisi Keagenan. Pada tahun 2013 sebagai General Manager pada Divisi Keagenan, kemudian tahun 2014 ditugaskan sebagai General Manager di PT PELNI Cabang Semarang.

Mulai bergabung di PT PIDC sejak 2016 sebagai Corporate Secretary (Corsec), dan selanjutnya ditempatkan diberbagai divisi seperti, Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi SDM & Umum, Divisi Pengadaan, dan terakhir di Unit SPI sejak Juli 2020 hingga sekarang.

MANAJEMEN RISIKO

PIDC menyadari pelaksanaan manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan ditingkat global.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada stakeholder maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian, dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam aktivitas usaha, PIDC menghadapi beberapa risiko yang melekat (*inherent risk*). Risiko tersebut secara umum dapat timbul akibat dipengaruhi oleh manusia, aset, alam, pendanaan, lingkungan, dan reputasi. Sedangkan secara khusus, risiko yang dihadapi sesuai karakteristiknya dapat berbentuk risiko kegagalan operasional penerbangan, kegagalan operasi bandara, kegagalan layanan dan ketidakpatuhan pada regulasi. Berbagai risiko tersebut ditangani melalui upaya *existing control*, mitigasi risiko, ataupun pengalihan risiko. Evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi karena risiko itu sendiri sifatnya dinamis.

PIDC secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar bandara internasional, manajemen PIDC akan menyusun profil risiko korporasi, untuk fungsi Operasional dan Teknik yang fokus pada proses bisnis perusahaan antara lain: *Safety, Security, Services through Compliance (3S+1C)* yang merupakan *compulsory* dalam pengelolaan risiko, serta di lingkungan Administrasi, Keuangan dan Komersial yang mengarah pada risiko tinggi.

Komponen Pengelolaan Risiko

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 komponen saling terkait yaitu:

1. Prinsip-prinsip manajemen risiko;
2. Kerangka kerja dalam mengelola risiko; dan
3. Proses pengelolaan risiko.

Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko. Sementara proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.

PERKARA HUKUM

Perkara Penting adalah permasalahan hukum yang dihadapi PIDC selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum baik melalui jalur Pengadilan ataupun Arbitrase. Sementara Nilai Perkara merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada PIDC sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIDC sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil mau Perkara Yang dihadapi PIDC.

Sengketa Pajak

Tidak terdapat Sengketa Pajak yang dihadapi PIDC sepanjang tahun 2021.

Perkara yang Melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PIDC

Sepanjang tahun 2021 tidak ada perkara hukum yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi PIDC.

Sanksi dari Regulator

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat sanksi dari regulator yang diberikan kepada PIDC .

Penyimpangan Internal

Selama tahun 2021 tidak ada penyimpangan yang bersifat kecurangan yang dilakukan oleh karyawan PIDC .

Etika Perusahaan (Code of Conduct)

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG di Perusahaan, PIDC bertekad untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan etika tertinggi dalam kejujuran dan keadilan. Komitmen ini dirancang bukan hanya sekadar untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan hal yang sangat substansial bagi keberhasilan usaha jangka panjang.

PIDC telah merumuskan berbagai kebijakan menyangkut etika Perusahaan dengan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Bisnis.

Penyebaran Etika Bisnis

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Standar Etika Perusahaan. PIDC senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Etika Bisnis kepada seluruh pegawai PIDC , mulai dari *level* operasional sampai kepada *top management*. Sosialisasi ini dimaksudkan agar insan PIDC senantiasa patuh terhadap Etika Bisnis.

Penegakan Etika Bisnis

PIDC melakukan penegakan terhadap Etika Bisnis yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Etika Bisnis. Upaya penegakan Etika Bisnis dilakukan oleh PIDC melalui penyediaan media pengaduan pelanggaran, penerapan *reward and punishment* serta pernyataan komitmen.

Whistleblowing System

Kebijakan pengaduan pelanggaran diperlukan untuk mengatur penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi stakeholders. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan.

Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas aturan atau persyaratan internal.
2. Pelanggaran atas hukum atau peraturan yang berlaku tidak termasuk *fraud* atau pencurian (termasuk *insider trading*).
3. *Fraud* atau pencurian.
4. Membahayakan kesehatan atau keselamatan.
5. Masalah-masalah sumber daya manusia yang telah gagal untuk diselesaikan melalui prosedur pengaduan SDM.

6. Memalsukan atau menyembunyikan catatan keuangan.
7. Memalsukan atau menyembunyikan informasi manajemen non-finansial.
8. Perilaku tidak etis.
9. Perlakuan terhadap pelanggan yang tidak pada tempatnya.
10. Kerusakan lingkungan.

Mekanisme Sistem Pengaduan

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang disusun dimaksudkan untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi antara lain terkait dengan kerugian perusahaan secara finansial maupun reputasi perusahaan yang bersifat negatif. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui *email* maupun surat resmi.

Pengaduan dari pihak ketiga dan/atau dari karyawan Perusahaan harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan GCG. Pengaduan harus disampaikan oleh pelapor dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian di atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

PIDC tidak terlibat didalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi atau bantuan untuk kepentingan politik. Sedangkan kepedulian terhadap masalah sosial merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab PIDC kepada masyarakat. Uraian lebih lengkap terdapat pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada laporan ini.

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Selama tahun 2019 tidak ada transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PIDC, setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

PIDC memiliki komitmen kuat dalam penerapan GCG dan sedapat mungkin menghindari praktik-praktik *bad corporate governance*. Terkait dengan praktik-praktik *bad corporate governance*, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Laporan Teknologi Informasi
Laporan Sumber Daya Manusia
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Laporan Keuangan

No.	PRAKTIK <i>BAD CORPORATE GOVERNANCE</i>	PRAKTIK DI PIDC
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	PIDC tidak pernah mendapatkan cap/predikat sebagai perusahaan pencemar lingkungan dari instansi manapun.
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Seluruh perkara penting telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	PIDC telah memenuhi semua ketentuan terkait perpajakan
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAK	PIDC telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

RENCANA PENGEMBANGAN GCG TAHUN 2021

PIDC berkomitmen untuk terus melanjutkan implementasi GCG secara konsisten.





7

LAPORAN KEUANGAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan Perusahaan. Karena itu, PT PIDC memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara benar dan konsisten, serta terus berusaha untuk menyempurnakan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dimilikinya.

- Profil Perusahaan
- Analisis dan Pembahasan Manajemen
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Laporan Teknologi Informasi
- Laporan Sumber Daya Manusia
- Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
- LAPORAN KEUANGAN**



DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultant
Registered Public Accountant

International member of:



**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Angka Perbandingan Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)

Nomor : 00028/2.0999/AU.1/05/0139-1/1/III/2022
Tanggal : 01 Maret 2022

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELITA INDONESIA DJAYA DAN ENTITAS ANAK	
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2021 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020)	1 - 2
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)	3
• Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)	4
• Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)	5
• Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	6 - 72
<u>INFORMASI TAMBAHAN</u>	
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT PELITA INDONESIA DJAYA	
(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan tersendiri)	
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)	
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk saja	
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	
• Laporan Perubahan Ekuitas - Induk saja	
• Laporan Arus Kas - Induk saja	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

**SURAT PERNYATAAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PELITA INDONESIA DJAYA DAN ENTITAS ANAKNYA
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Effendi
Alamat kantor : Ruko Cempaka Mas Blok Q No. 5
Nomor telepon : 0811185794
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jln Kimangun Sarkoro RT.001/RW.010 Kel.Bekasi Jaya. Kec.Bekasi Timur
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Rooshardianti
Alamat kantor : Ruko Cempaka Mas Blok Q No. 5
Nomor telepon : 081310996121
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jl.Depsos IX No.17 RT.006/RW.002 Kel. Bintaro. Kec.Pesanggrahan
Jabatan : Direktur Operasional

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan bebas dari kesalahan maupun kecurangan.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Jakarta, 01 Maret 2022
PT Pelita Indonesia Djaya

materai 10000 dan cap perusahaan



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00028/2.0999/AU.1/05/0139-1/1/III/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit reklasifikasi penyajian yang dijelaskan pada catatan 36 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, reklasifikasi tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan reklasifikasi tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atau bentuk lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Hal lain

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 10 Mei 2021.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA**



Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA.
NRAP : 0139

1 Maret 2022



LAPORAN KEUANGAN

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des. 2021	31 Des. 2020 *)	1 Jan. 2020/ 31 Des. 2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	3d;3e;3h;5	33.949.640.758	14.642.422.860	38.509.285.869
Piutang Usaha	3d;3e;3s;6	70.908.316.378	103.898.544.299	75.161.303.574
Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp 2.565.139.628 dan Rp858.778.470				
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3e;7	19.452.439.907	3.682.565.256	1.298.430.767
Persediaan	3j;8	4.855.617.377	3.552.398.632	5.084.216.218
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	3k;9	13.554.025.857	29.339.976.483	14.600.012.321
Aset Kontrak	10	46.284.749.763	51.142.180.437	66.704.157.072
Pajak Dibayar Dimuka	3u;18a	31.338.844.978	11.125.571.483	25.910.010.616
Jumlah Aset Lancar		220.343.635.018	217.383.659.450	227.267.416.437
ASET TIDAK LANCAR				
Properti Investasi	3l;11	17.042.363.615	-	-
Aset Tetap	3m;12	41.289.955.785	47.251.625.968	37.758.280.383
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing - masing sebesar Rp25.727.763.198 dan Rp21.565.183.017				
Aset Tak Berwujud, bersih	3n;13	2.509.700.114	960.180.043	927.849.807
Aset Hak Guna, bersih	3q;14	670.002.417	1.358.353.377	-
Aset Pajak Tangguhan	3u;4;18e	2.925.294.190	2.131.158.232	2.070.499.253
Aset Tidak Lancar Lainnya	3i;15	57.300.000	2.057.300.000	2.557.300.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		64.494.616.121	53.758.617.620	43.313.929.443
JUMLAH ASET		284.838.251.139	271.142.277.070	270.581.345.880

*) Reklasifikasi, Lihat Catatan 36.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des. 2021	31 Des. 2020 *)	1 Jan. 2020/ 31 Des. 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Pendek	3f;16	12.737.470.435	4.195.797.344	-
Utang Usaha	3f;17	29.071.418.988	12.472.580.309	9.722.979.396
Utang Pajak	3u;18b	4.297.955.248	678.900.437	6.481.209.222
Beban Akrua	3f;19	64.900.068.975	70.080.967.066	76.275.770.548
Bagian Lancar dari Liabilitas Jk. Panjang:	3f;21			
- Sewa Pembiayaan		1.101.752.859	3.537.422.000	3.414.540.000
- Liabilitas Sewa		101.678.500	751.248.337	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	3f;3p;20	2.249.192.969	1.545.924.117	1.238.020.806
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		114.459.537.974	93.262.839.610	97.132.519.972
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Pihak Berelasi	3f;22	1.907.280.187	16.093.935.042	26.691.567.878
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi:	3f;21			
- Sewa Pembiayaan		3.838.559.225	2.074.480.400	1.861.787.000
- Liabilitas Sewa		477.380.592	614.099.489	-
Liabilitas Imbalan Kerja	3r;23	5.296.069.050	5.771.196.449	5.040.444.803
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		11.519.289.054	24.553.711.380	33.593.799.681
JUMLAH LIABILITAS		125.978.827.027	117.816.550.990	130.726.319.653
EKUITAS				
Modal Saham	24	2.010.000.000	2.010.000.000	2.010.000.000
Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal Desember 2021 dan 2020.				
Saldo Laba :				
Ditentukan Penggunaannya	3v;25a	154.442.902.454	131.974.755.011	81.732.995.380
Belum Ditentukan Penggunaannya	3v;25b	3.217.405.889	20.525.452.883	57.279.364.340
Komponen Ekuitas Lainnya	26	(937.458.100)	(1.406.997.326)	(1.436.489.836)
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		158.732.850.244	153.103.210.568	139.585.869.884
Kepentingan Non Pengendali	27	126.573.868	222.515.512	269.156.343
JUMLAH EKUITAS		158.859.424.112	153.325.726.080	139.855.026.227
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		284.838.251.139	271.142.277.070	270.581.345.880

*) Reklasifikasi, Lihat Catatan 36.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
Pendapatan Usaha	3t;28	336.999.559.832	368.210.585.149
Beban Usaha	3t;29	(302.609.591.947)	(295.856.738.925)
LABA KOTOR		34.389.967.885	72.353.846.224
Beban Umum dan Administrasi	3t;30	(45.759.490.756)	(41.527.300.168)
LABA USAHA		(11.369.522.871)	30.826.546.056
Pendapatan (Beban) Non Usaha	3t;31	15.666.238.904	(733.047.876)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		4.296.716.033	30.093.498.180
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan:			
Kini	3u;4;17c	(57.600.287)	(7.753.969.499)
Tanggungan	3u;4;17e	926.570.099	84.528.079
		868.969.812	(7.669.441.420)
LABA TAHUN BERJALAN		5.165.685.845	22.424.056.760
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja :			
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	3r;26	601.973.367	37.810.910
Efek pajak keuntungan (kerugian) Terkait	3u;26	(132.434.141)	(8.318.400)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		469.539.226	29.492.510
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		5.635.225.071	22.453.549.270
Labanya Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		5.160.100.449	22.379.966.077
Kepentingan Non Pengendali	27	5.585.396	44.090.683
Labanya Tahun Berjalan		5.165.685.845	22.424.056.760
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		5.629.639.675	22.409.458.587
Kepentingan Non Pengendali	27	5.585.396	44.090.683
Labanya Tahun Berjalan		5.635.225.071	22.453.549.270
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR		2.569.992,96	11.156.247,14

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba		Komponen Ekuitas Lainnya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
		Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo per 31 Desember 2019 (Disajikan Kembali)	2.010.000.000	81.732.995.380	57.279.364.340	(1.436.489.836)	269.156.343	139.855.026.227
Efek Penyesuaian PSAK 71	2c:25b	-	(17.407.080)	-	(1.480.436)	(18.887.516)
Efek Penyesuaian PSAK 73	2c:25b	-	(96.699.313)	-	-	(96.699.313)
Saldo per 1 Januari 2020 (Dampak PSAK)	2.010.000.000	81.732.995.380	57.165.257.947	(1.436.489.836)	267.675.907	139.739.439.398
Cadangan Umum	3v:25a	-	50.241.759.631	(50.241.759.631)	-	-
Dividen	3v:25a	-	-	(8.866.192.876)	-	(1.069.712)
Laba Tahun Berjalan	25b	-	-	22.468.147.443	-	(44.090.683)
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	3r:26	-	-	-	29.492.510	29.492.510
Saldo per 31 Desember 2020	2.010.000.000	131.974.755.011	20.525.452.883	(1.406.997.326)	222.515.512	153.325.726.080
Divestasi PT PANI		-	22.468.147.443	(22.468.147.443)	-	(101.527.039)
Laba Tahun Berjalan	25b	-	-	5.160.100.449	-	5.585.396
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	3r:26	-	-	-	469.539.226	469.539.226
Saldo per 31 Desember 2021	2.010.000.000	154.442.902.454	3.217.405.889	(937.458.100)	126.573.869	158.859.424.112

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	373.608.842.564	352.100.280.681
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(201.675.516.017)	(239.974.261.855)
Pembayaran Operasional	(109.133.646.344)	(103.600.082.363)
Pengeluaran Lain-lain	(27.298.717.698)	(2.099.022.289)
Pembayaran Pajak	(20.213.273.495)	(13.297.363.796)
Penerimaan Lain-lain	15.721.153.293	(212.902.871)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	31.008.842.303	(7.083.352.493)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(18.376.727.696)	(14.421.345.271)
Penambahan Aset Tak Berwujud	(1.866.569.800)	(248.000.000)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(20.243.297.496)	(14.669.345.271)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman Bank	29.200.000.000	5.000.000.000
Pembayaran utang Bank	(20.658.326.909)	(804.202.657)
Pembayaran dividen	-	(8.867.262.588)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	8.541.673.091	(4.671.465.245)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SET ARA KAS		
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	14.642.422.860	41.066.585.869
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	33.949.640.758	14.642.422.860

*Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelita Indonesia Djaya didirikan di Jakarta pada Tanggal 29 September 1969 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 53 tanggal 29 September 1969 oleh Notaris Djojo Muljadi. S.H yang diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 10 Februari 1970.

Dalam perkembangannya PT Pelita Indonesia Djaya mengalami perubahan nama dikarenakan adanya keberatan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 26 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas. maka diputuskan merubah nama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya Cooperation berkedudukan di Jakarta menjadi PT Pelita Indonesia Djaya berkedudukan di Jakarta. Hal ini telah disahkan dengan Akta Notaris SP. Henny Singgih. S.H No : 22 Tanggal 10 September 2001.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 5, tanggal 12 Februari 2020, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., dan telah mendapat Persetujuan Menhumkam Nomor : AHU-AH.01.03-0116585, tanggal 02 Maret 2020.

Maksud dan tujuan Perusahaan didirikan sebagai berikut:

- a) Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal. Selanjutnya bertindak sebagai perwakilan dari badan - badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b) Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dan Perusahaan-Perusahaan dibidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut, kepariwisataan, perhotelan, dan real estate serta percetakan.
- c) Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan rumah pendingin (*coold storage*).
- d) Mengusahakan galangan-galangan pembuatan dan reparasi kapal-kapal (*shipdocking and shiprepairing*).
- e) Menjalankan segala sesuatu yang selaras atau yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat dimuka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalm arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, secara komisi atau tidak ataupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

Perusahaan berkedudukan Ruko Cempaka Mas Blok Q Nomor 5, di Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta Pusat.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.434 orang yang terdiri dari karyawan tetap 60 orang, karyawan PKWT 82 orang dan karyawan *outsourcing* 1.292 orang. Sedangkan tahun 2020 Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.433 orang yang terdiri dari karyawan tetap 61 orang, karyawan PKWT 62 orang dan karyawan *outsourcing* 1.310 orang. Seluruh karyawan tersebut tidak diaudit.

b. Susunan Komisaris dan Direktur

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 5, tanggal 12 Februari 2020 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.03-0116585 tanggal 02 Maret 2020 Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya nomor 5 tanggal 12 Februari 2020 maka susunan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) sebagai berikut:

	2021	2020
Komisaris Utama	: Muhammad Tukul Harsono	Muhammad Tukul Harsono
Komisaris	: Muhammad Tukul Harsono	Muhammad Tukul Harsono
Direktur Utama	: Effendi	Effendi
Direktur Operasi	: Dr. Rooshardianti	Effendi

c. Entitas Anak

Entitas Anak yang dikonsolidasi dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Presentasi Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi	
					2021	2020
PT Pelita Bandar Nasional	Surabaya	Bongkar Muat	98%	1989	7.697.477.666	7.606.502.728

Pelita Bandar Nasional (PT PBN) Surabaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Atmadji di Surabaya No. 19 tanggal 28 Juni 1989 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor C - 131213 tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000. Anggaran Dasar Perusahaan diperbaharui dengan Akta Notaris Sujadi. S.H No. 3 tanggal 11 Juni 2009. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp250.000.000.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Anggaran Dasar Perusahaan diperbaharui dengan Akte Notaris Sujadi. S.H. No. 3 tanggal 11 Juni 2011. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp250.000.000.

Maksud dan Tujuan Perusahaan didirikan adalah :

- Melakukan kegiatan jasa bongkar muat termasuk kegiatan dalam bidang stevedoring, cargodoring, recover, dan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan usaha bongkar muat.
- Kegiatan usaha lainnya yang menunjang pelaksanaan usaha bongkar muat.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Perak Barat No. 437. Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan tetap Perusahaan adalah 10 orang (tidak audit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Bandar Nasional per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	2021	2020
Komisaris:		
Komisaris Utama :	Effendi	Effendi
Anggota Komisaris :	Hefi Apriyanto	Patoh Sembiring
Direksi :		
Direktur Utama :	Nur Hasanudin	Nur Hasanudin

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021 yang relevan dengan operasi perusahaan dan tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2";

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan belum diterapkan secara dini oleh perusahaan, sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 "Sewa"

Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang)"
- Amendemen PSAK 16 "Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan"

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan revisi pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru yang telah diterbitkan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020:

Pada tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Grup telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar-standar yang relevan terhadap kegiatan operasional dan memberikan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Grup sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Pada tanggal 1 Januari 2020, manajemen telah menilai model bisnis mana yang berlaku untuk aset keuangan yang dimiliki Perusahaan dan telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya ke dalam kategori PSAK 71 yang sesuai.

Tabel berikut menjelaskan kategori pengukuran asli berdasarkan PSAK 55 dan kategori pengukuran baru berdasarkan PSAK 71 untuk masing-masing aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020:

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (lanjutan)

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru yang telah diterbitkan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020: (lanjutan)

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan" (lanjutan)

	Klasifikasi awal berdasarkan PSAK	Klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71	Nilai tercatat awal berdasarkan PSAK 55	Nilai tercatat baru berdasarkan PSAK 71
Aset Keuangan:				
Piutang usaha	Piutang	Biaya perolehan diamortisasi	75.161.303.574	75.157.966.755
Total aset keuangan			75.161.303.574	75.157.966.755

Perusahaan menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umumnya. Hal ini mengakibatkan peningkatan penyisihan kerugian pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp3.336.817 untuk piutang usaha dan disajikan sebagai pengurang saldo laba awal 2020.

Total dampak penerapan PSAK 71 pada laba ditahan Perusahaan pada 1 Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
• Penyesuaian CKPN tahun 2019 Induk Saja	(70.685.000)
• Pengaruh Terhadap Aset Pajak Tangguhan	15.550.700
• Penyesuaian CKPN tahun 2019 Anak Perusahaan	74.021.817
Jumlah	18.887.517

- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Perusahaan telah mengadopsi PSAK 72 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sejak 1 Januari 2020 yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK 72 Perusahaan telah mengadopsi aturan baru secara retrospektif.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (lanjutan)

c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru yang telah diterbitkan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020: (lanjutan)

- **PSAK 73 "Sewa"**

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 Sewa secara retrospektif sejak 1 Januari 2020. Tetapi belum menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan 2020, seperti yang diizinkan berdasarkan ketentuan transisi spesifik dalam standar. Oleh karena itu, reklasifikasi dan penyesuaian yang timbul dari aturan sewa guna usaha yang baru diakui dalam saldo awal neraca pada tanggal 1 Januari 2020.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya. Perusahaan telah menggunakan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- 1) Menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang mirip secara wajar.
- 2) Akuntansi sewa operasi dengan sisa jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek.
- 3) Menggunakan peninjauan kembali dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa.

Perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi item-item berikut di laporan posisi keuangan pada 1 Januari 2020:

- a) Aset hak guna - meningkat sebesar Rp 1.358.353.377.
- b) Liabilitas sewa - meningkat sebesar Rp 1.365.347.826.
- c) Dampak ke penyajian saldo laba awal 2020 sebesar Rp96.699.313.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah mematuhi dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2017). "Penyajian Laporan Keuangan".

Kecuali dinyatakan berbeda, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dari Perusahaan dan entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan memiliki pengendalian ketika Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Perusahaan menggunakan metode akuisisi untuk mencatat akuisisi entitas anak. Biaya perolehan termasuk nilai wajar imbalan kontinjensi pada tanggal akuisisi.

Kepentingan nonpengendali atas total laba rugi komprehensif entitas anak diidentifikasi sesuai proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari total laba komprehensif yang dapat diatribusikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas entitas anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk bagian tahun ketika pengendalian masih berlangsung.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Kepentingan nonpengendali disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dalam hal yang material telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
 - c) Personal manajemen kunci Entitas pelapor atau perusahaan induk Entitas pelapor.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- 2) Suatu perusahaan berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- a) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk Entitas anak dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain);
 - b) Suatu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau venture bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
 - g) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas); dan
 - h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Aset Keuangan

Mulai 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas – apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengukuran

Pada pengakuan awal grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

• **Instrumen Utang**

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- a) Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran (lanjutan)

• **Instrumen Utang (lanjutan)**

b) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

c) Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan / (kerugian) lainnya, dalam periode kemunculannya.

• **Instrumen Ekuitas**

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain. tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perseroan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, Grup menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian, Grup menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan. Untuk membuat penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ("*Expected Credit Loss - ECL*") tersebut untuk piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pembiayaan yang signifikan.

ECL adalah estimasi kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). ECL didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

Nilai tercatat bruto dari aset keuangan dihapuskan (sebagian atau seluruhnya) sepanjang tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Ini umumnya terjadi ketika perusahaan menentukan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut, namun demikian aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan kegiatan penegakan hukum untuk memenuhi prosedur perusahaan untuk pemulihan jumlah yang telah jatuh tempo.

Pada setiap akhir periode pelaporan, grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

• **Aset Dicatat Sebesar Harga Perolehan Diamortisasi**

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak.

Untuk alasan praktis. Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur) pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

• **Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual**

Jika terdapat bukti objektif dari penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual kerugian kumulatif diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar saat ini dikurangi rugi penurunan nilai aset keuangan tersebut yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi - dihapus dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Jika di periode selanjutnya nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah rugi penurunan nilai diakui di laporan laba rugi, rugi penurunan nilai tersebut dibalik melalui laporan laba rugi.

Penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang diakui di laporan keuangan konsolidasian tidak dibalik melalui laporan laba rugi konsolidasian pada periode berikutnya.

Grup menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

- **Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual**

Untuk piutang usaha. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian seumur hidup yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal piutang.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan. dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha, beban akrual, utang bank, liabilitas hak guna, liabilitas kontrak, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, dan utang pihak berelasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, Grup mencatat liabilitas keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak diskontonya signifikan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

- 1) Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*), dan
- 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

i. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai "kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya."

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode First In First Out. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Cadangan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Persediaan rusak alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan, dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

k. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing- masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka (lanjutan)

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi (ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Manajemen melakukan reklasifikasi penyajian aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Makassar dan Tretes, dari sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset tetap berubah menjadi properti investasi pada triwulan III tahun 2021.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

I. Properti Investasi (lanjutan)

Pada triwulan IV tahun 2021, manajemen melakukan perubahan kebijakan pengukuran dari model biaya menjadi model nilai wajar terhadap aset berupa tanah dan bangunan tersebut. Perubahan model pengukuran tersebut berlaku prospektif sebagaimana diatur pada standar yang berlaku. Nilai wajar didasarkan pada laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00017/2.0069-07/PI/05/0523/1/I/2022, tanggal 27 Desember 2021 dan 00176/2.0126-00/PI/05/0156/1/XII-2021, tanggal 31 Desember 2021.

Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding dengan nilai buku atas penerapan pertama kali atau nilai wajar sebelumnya diakui sebagai keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar aset non keuangan dan disajikan pada pendapatan (beban) non usaha.

Selanjutnya pada setiap tanggal laporan posisi keuangan atau sekurang-kurangnya pada akhir tahun dengan pilihan model nilai wajar. Perseroan melakukan telaahan atas nilai wajar properti investasi - tanah dan bangunan. Kenaikan (penurunan) yang berasal dari nilai wajar pada tanggal posisi laporan keuangan dibanding nilai wajar sebelumnya merupakan keuntungan (kerugian) dan disajikan pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

m. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Sampai dengan saat ini, Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya (*cost model*) dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif Penyusutan %
Bangunan	40	2,5
Mesin Instalasi dan Peralatan Penunjang	6-7	15
Alat-alat Berat	12	8,33
Kendaraan	5	20,00
Inventaris dan Perabotan Rumah Tangga	6-7	15,00

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset Dalam Konstruksi

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada akhir tahun sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Dalam Konstruksi (lanjutan)

Aset dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dari aset tetap yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Aset Tetap Usul Hapus

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi/usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan/pelepasannya dikategorikan sebagai aset tetap usul hapus dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tetap usul hapus dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Aset tetap usul hapus dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini diakui pada kelompok pendapatan atau beban non usaha.

n. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditanggihkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) tahun.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

Setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan nilai langsung diakui dalam laba rugi konsolidasian, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Liabilitas Kontrak

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

q. Sewa

Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

- 1) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- 2) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Aset yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, lessee mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi penghentian tersebut.

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap, sedangkan liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa satu tahun atau kurang dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hakguna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dan sewa yang aset pendasarnya bernilairendah. Grup mengakui pembayaran terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun. meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

- **Pensiun**

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun setelah memperhitungkan faktor usia masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Dalam program ini, manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program manfaat pensiun dikelola oleh Dana Pensiun dan iuran pasti dikelola oleh DPLK.

Pembayaran kontribusi (iuran dana pensiun) dibiayai oleh karyawan (Peserta) dan Perseroan (Pemberi Kerja). Iuran Dana Pensiun (IDP) beban peserta ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perseroan.

IDP beban pemberi kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial sesuai dengan kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun setelah dikurangi IDP beban peserta. Perhitungan aktuarial dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit* (PUC) seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2016) Imbalan Kerja. Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuarial yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method* dengan capaian usia normal.

Seluruh pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

• **Pensiun (lanjutan)**

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

• **Program Manfaat Karyawan Lainnya**

Perseroan juga memberikan imbalan pasca kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan / tabungan purna jabatan. program santunan meninggal dan catat. Uang pisah, Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

s. Provisi

Provisi diakui apabila Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sejak 1 Januari 2020 Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

u. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Grup secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Grup menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut. maka kelebihanannya diakui sebagai aset dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding sudah diputuskan kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Grup menggunakan metode liabilitas neraca (*balance sheet liability method*) pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi, aset atau liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam jumlah bersih.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal. sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan. kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

v. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (expense) melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Laba Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

x. Informasi Segmen

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- 2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

y. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Grup membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Sewa (lanjutan)

Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

c. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

d. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun-tahun mendatang dipaparkan di bawah ini.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lain-lain dengan menggunakan tingkat provisi yang berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan kerugian kredit historis masa lalu dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Grup menghitung pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

c. Pemulihan Dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan ekspektasi utilisasi dari aset dengan didukung rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan saat beban dicatat setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban usaha dan menurunkan aset tidak lancar yang tercatat. Penambahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap Grup menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset tidak lancar yang tercatat.

e. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Asumsi penting untuk penurunan nilai aset non keuangan sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Rencana strategis mencakup perkiraan dampak perubahan iklim bisnis di masa depan terhadap Grup sejauh ini dapat diperkirakan dengan andal.

f. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

g. Pajak Penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan.

Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

i. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia. termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas		
Rupiah	135.714.443	66.917.723
	135.714.443	66.917.723
Bank		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	32.574.876.968	13.665.873.246
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	578.397.545	283.249.078
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	381.522.255	213.860.262
PT Bank BJB	154.520.358	288.255.466
Jumlah Pihak Berelasi	33.689.317.126	14.451.238.052
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia (Persero). Tbk	124.609.189	124.267.085
Jumlah Pihak Ketiga	124.609.189	124.267.085
Jumlah	33.949.640.758	14.642.422.860

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perusahaan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/ pinjaman lainnya serta tidak ada yang dibatasi penggunaannya.

6. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak Berelasi</u>		
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	61.056.723.270	72.343.003.868
PT Sarana Bandar Nasional	698.527.513	118.800.000
Sub Jumlah	61.755.250.783	72.461.803.868
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Cakrawala Inti Persada	4.840.000.000	-
Koperasi Bina Sejahtera	1.179.605.657	-
PT Karya Retra	683.981.360	683.981.360
CV Yoga Pratama Jaya	447.076.326	797.076.326
RS Pelayaran Nasional Indonesia	318.426.380	347.285.895
PT Wahana Ria Cakrawala	237.691.740	565.807.140
PT Kukuh Mandiri	261.990.760	261.990.760
PT Kasuang Semesta Mandiri	164.298.240	164.298.240
Jumlah Dipindahkan	8.133.070.463	2.820.439.721

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Pindahan	8.133.070.463	2.820.439.721
PT Hoka Mandiri	112.500.000	270.307.652
Piutang Pajak	-	23.514.060.531
PT SGS	-	142.836.144
Lainnya	2.440.222.298	1.554.644.472
Sub Jumlah	10.685.792.761	28.302.288.520
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.300.368.133)	(677.236.722)
Jumlah Entitas Induk	70.140.675.411	100.086.855.666
<u>Entitas Anak</u>		
Sinar Jaya Wijaya	415.297.171	881.675.852
PT Prima Sejahtera Line	298.925.457	587.948.806
Sari Ampenan	232.639.748	227.522.400
Eddy Barokah	76.320.964	76.320.963
PT Pelayanan Trip	-	880.724.750
PT Nindya Karya (Persero)	-	580.023.280
PT Wira Cipta Perkasa	-	440.708.667
CV Lautan Rimba Raya	-	113.434.340
Lainnya	9.229.122	204.871.323
	1.032.412.462	3.993.230.381
Cadangan kerugian penurunan nilai	(264.771.495)	(181.541.748)
Jumlah Entitas Anak	767.640.967	3.811.688.633
Jumlah	70.908.316.378	103.898.544.299
Rincian Piutang Usaha berdasarkan umurnya:		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
0 - 30 hari	1.505.489.921	843.460.562
31 - 60 hari	2.029.154.304	417.823.373
61 - 90 hari	1.372.658.146	988.586.828
91 - 120 hari	915.129.024	688.599.780
> 120 hari	5.895.773.828	29.357.048.358
Jumlah	11.718.205.223	32.295.518.901

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo Awal	858.778.470	229.023.666
Dampak Penerapan PSAK 71	-	3.336.819
Pembentukan	1.706.361.158	626.417.985
Saldo Akhir	2.565.139.628	858.778.470

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dengan PT Pelita Indonesia Djaya bahwa tidak melakukan perhitungan provisi kerugian penurunan nilai piutang karena PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sudah memberikan jaminan bahwa atas piutang tersebut akan diperhitungkan dengan kewajiban PT Pelita Indonesia Djaya melalui proses kompensasi. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tak tertagihnya piutang.

Piutang Pajak berasal dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Perusahaan atas tahun pajak dari Januari 2018 sampai dengan Juli 2019 yang telah direstitusi Perusahaan dan mendapatkan persetujuan berdasarkan SKPLB No. 00012/407/19/093/20 tanggal 11 November 2020. Namun pengembalian kas baru diterima pada bulan Februari 2021.

7. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Deposito Jaminan	-	30.000.000
Piutang Lain-lain	19.452.439.907	3.652.565.256
Jumlah	19.452.439.907	3.682.565.256

a. Deposito Jaminan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Deposit	-	30.000.000
Jumlah	-	30.000.000

Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang telah dijamin kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas pemanfaatan gudang Jumbo Jamrud Selatan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

b. Piutang Lain-lain

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi</u>		
Piutang Pegawai	625.023.291	815.080.791
<u>Pihak ketiga</u>		
Koperasi	2.134.680.670	2.973.223.082
Lainnya	16.890.800.424	62.325.861
Sub Jumlah	19.650.504.385	3.850.629.734
 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	 (198.064.478)	 (198.064.478)
Jumlah Piutang Ketiga	19.452.439.907	3.652.565.256

Piutang lainnya kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan pembayaran pinjaman modal kerja untuk Koperasi Karyawan PID dan piutang lelang kendaraan bermotor kepada karyawan.

Piutang lain-lain pada sub lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan piutang atas Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan sedangkan per tanggal 31 Desember 2020 merupakan piutang atas hasil lelang kendaraan yang belum selesai pelunasannya oleh Pembeli serta piutang atas pelepasan PT PANI .

8. PERSEDIAAN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Persediaan terdiri dari:		
Permakanan	2.697.090.211	-
Bahan <i>Chemical</i>	1.818.527.166	3.552.398.632
Lainnya	340.000.000	-
	4.855.617.377	3.552.398.632

Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 merupakan persediaan permakanan dan persediaan *chemical* yang terdapat di Kantor Cabang Tanjung Priok, Surabaya dan Makassar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau pemulihan dan tidak terdapat persediaan usang.

Persediaan tidak diasuransikan dan manajemen berpendapat bahwa, tingkat resiko yang akan terjadi terhadap persediaan tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk diasuransikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Muka	12.952.525.489	25.369.193.216
Biaya Dibayar Dimuka	601.500.368	340.968.554
Jumlah	13.554.025.857	25.710.161.770

a. Uang Muka:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jasa pelayanan kapal	4.697.223.112	3.629.814.713
Permakanan	3.713.713.350	22.660.862.977
Administrasi dan umum	3.893.937.470	313.752.169
Jasa kebersihan di Kapal	647.651.557	2.268.473.705
Investasi aset tetap	-	126.104.365
Jumlah	12.952.525.489	25.369.193.216

b. Biaya Dibayar Dimuka:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Biaya Asuransi	557.055.924	339.468.554
Biaya Sewa	44.444.444	1.500.000
Jumlah	601.500.368	340.968.554

Uang muka jasa pelayanan kapal merupakan uang muka yang dibayarkan kepada Divisi Jasa Maintenance & IT, Pelayanan Jasa, Komersial untuk swakelola pekerjaan perbaikan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero). Uang muka tiket yang belum dipertanggung jawabkan.

Uang muka permakanan merupakan uang muka yang dibayarkan divisi komersial untuk membeli bahan makanan yang akan dikirim ke kapal-kapal PT Pelni (Persero).

Uang muka jasa kebersihan di kapal merupakan alat penunjang kebersihan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero).

Uang muka administrasi dan umum merupakan uang muka yang dibayarkan untuk pembayaran utang pajak atas pemeriksaan pajak tahun 2018 dan 2019 serta tunjangan pendidikan pegawai organik PT PID tahun 2021.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

10. ASET KONTRAK

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pihak Berelasi		
PT PELNI:		
Permakanan	24.045.507.060	27.402.418.744
Usaha Jasa	12.768.123.344	6.667.655.886
Usaha lainnya	5.075.463.164	11.964.727.426
	41.889.093.568	46.034.802.056
Pihak Ketiga		
Usaha lainnya	4.395.656.195	5.107.378.381
Jumlah	46.284.749.763	51.142.180.437

Merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas jasa pengadaan makanan diatas kapal Pelni, jasa *outsourcing*, pekerjaan perawatan dan perbaikan kapal.

Pendapatan yang masih harus diterima usaha lainnya merupakan pendapatan yang masih harus diterima atas pekerjaan CS Gedung, Janitor, TKBM dan Help Desk.

11. PROPERTI INVESTASI

	2021				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan:					
Tanah	-	13.189.174.709	-	2.105.188.905	15.294.363.614
Gedung	-	900.440.001	-	847.560.000	1.748.000.001
Jumlah	-	14.089.614.710	-	2.952.748.905	17.042.363.615

Pada tahun buku 2021, Grup telah melakukan perubahan kebijakan penyajian aset tanah dan bangunan untuk direntalkan, dari aset tetap ke properti investasi dan selanjutnya pengukurannya dicatat dengan menggunakan nilai wajar. Perubahan tersebut berlaku secara prospektif, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. (Lihat Catatan 3m)

Berdasarkan laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 00017/2.0069-07/PI/05/0523/1/II/2022, tanggal 27 Desember 2021, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Wisma Bahtera Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan masing-masing sebesar Rp13.507.590.000 dan Rp978.500.000, serta 00176/2.0126-00/PI/05/0156/1/XII-2021, tanggal 31 Desember 2021, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Maros, Sulawesi Selatan sebesar Rp2.514.648.615. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp14.089.614.710 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya. (Lihat Catatan 31a)

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP

	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:					
<u>Perolehan Langsung</u>					
Tanah	1.637.320.846	3.207.465.740	-	(1.130.808.538)	3.713.978.048
Gedung	16.650.192.236	830.007.831	-	(847.560.000)	16.632.640.067
Kendaraan	8.986.819.822	-	-	-	8.986.819.822
Inventaris					
Kantor	1.688.420.222	64.112.728	182.870.672	-	1.569.662.278
Kontainer	1.151.213.300	-	377.763.757	-	773.449.543
Perl. Produksi	1.640.523.713	-	-	-	1.640.523.713
Sub Jumlah	31.754.490.139	4.101.586.299	560.634.429	- 1.978.368.538	33.317.073.471
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>					
Kendaraan	31.167.381.903	2.484.263.604	-	-	33.651.645.507
Aset dalam Penyelesaian	5.894.936.943	-	-	(5.845.936.938)	49.000.005
Jumlah	68.816.808.985	6.585.849.903	560.634.429	(7.824.305.476)	67.017.718.983
Akumulasi					
Penyusutan dan Penurunan Nilai:					
<u>Perolehan Langsung</u>					
Gedung	1.116.144.969	428.202.517	-	-	1.544.347.486
Kendaraan	2.149.148.812	1.125.768.469	-	-	3.274.917.281
Inventaris					
Kantor	757.054.551	206.078.402	(83.612.979)	-	879.519.974
Kontainer	1.151.213.306	-	(377.763.757)	-	773.449.549
Perl, produksi	579.434.390	261.736.975	-	-	841.171.365
Jumlah	5.752.996.028	2.021.786.362	(461.376.736)	-	7.313.405.654
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>					
Kendaraan	15.812.186.989	4.300.185.270	(1.698.014.716)	-	18.414.357.543
Jumlah	21.565.183.017	6.321.971.633	(1.698.014.716)	-	25.727.763.198
Nilai Buku	47.251.625.968				41.289.955.785

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

	2020			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Tanah	1.637.320.846	-	-	1.637.320.846
Gedung	16.648.716.862	1.475.374	-	16.650.192.236
Kendaraan	8.690.819.822	296.000.000	-	8.986.819.822
Inventaris				
Kantor	1.438.496.172	249.924.050	-	1.688.420.222
Kontainer	1.151.213.300	-	-	1.151.213.300
Perl. Produksi	1.242.076.713	398.447.000	-	1.640.523.713
Sub Jumlah	30.808.643.715	945.846.424	-	31.754.490.139
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	23.323.920.603	7.843.461.300	-	31.167.381.903
Aset dalam Penyelesaian	262.899.396	5.632.037.547	-	5.894.936.943
Jumlah	54.395.463.714	14.421.345.271	-	68.816.808.985
Akumulasi				
Penyusutan dan Penurunan Nilai:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Gedung	744.879.455	371.265.514	-	1.116.144.969
Kendaraan	1.500.093.781	649.055.031	-	2.149.148.812
Inventaris				
Kantor	487.170.646	269.883.905	-	757.054.551
Kontainer	1.151.213.306	-	-	1.151.213.306
Perl, produksi	288.850.448	290.583.942	-	579.434.390
Jumlah	4.172.207.636	1.580.788.392	-	5.752.996.028
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	12.464.975.696	3.347.211.293	-	15.812.186.989
Jumlah	16.637.183.332	4.927.999.685	-	21.565.183.017
Nilai Buku	37.758.280.382			47.251.625.968

Tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya masih dalam proses hukum dan pengalihan dari pihak ketiga.

Seluruh aset tetap tidak diasuransikan dan manajemen berpendapat bahwa, tingkat risiko yang akan terjadi terhadap aset tetap tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk diasuransikan.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi ke Properti Investasi terdiri dari Jalan dan Bangunan Gudang Makassar sebesar Rp757.300.000, Tanah dan Hak atas Tanah Wisma Bahtera Tretes sebesar Rp1.101.183.538, Jalan dan Bangunan Wisma Bahtera Tretes sebesar Rp78.260.000 serta Tanah dan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perak Timur 114 masing - masing sebesar Rp29.625.000 dan Rp12.000.000 (Lihat Catatan 11)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal neraca.

Beban penyusutan dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Beban Pokok Usaha (<i>lihat catatan 29</i>)	4.219.053.542	3.272.676.758
Beban Umum dan Administrasi (<i>lihat catatan 30</i>)	2.102.918.090	1.655.322.929
Jumlah	6.321.971.633	4.927.999.687

13. ASET TAK BERWUJUD

	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
Biaya Perolehan:					
Perangkat Lunak	1.537.590.135	-	-	1.866.569.800	3.404.159.935
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:					
Perangkat Lunak	577.410.092	317.049.729	-		894.459.821
Nilai Buku	2.115.000.227	317.049.729	-	1.866.569.800	2.509.700.114
	2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan		Saldo Akhir
Biaya Perolehan:					
Perangkat Lunak	1.289.590.135	248.000.000		-	1.537.590.135
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:					
Perangkat Lunak	361.740.328	215.669.764		-	577.410.092
Nilai Buku	927.849.807				960.180.043

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset tidak berwujud pada tanggal neraca.

Beban amortisasi aset tak berwujud dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Beban Pokok Usaha (catatan 29)	48.279.865	46.790.683
Beban Umum dan Administrasi (catatan 30)	268.769.864	168.879.081
Jumlah	317.049.729	215.669.764

14. ASET HAK GUNA

	2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	
Biaya Perolehan:					
Gedung	719.065.881	-	-	719.065.881	
Alat Angkut	2.168.348.762	-	-	2.168.348.762	
Jumlah	2.887.414.643	-	-	2.887.414.643	
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:					
Gedung	360.284.210	163.082.572	-	523.366.782	
Alat Angkut	1.168.777.056	525.268.388	-	1.694.045.444	
Jumlah	1.529.061.266	688.350.960	-	2.217.412.226	
Nilai Buku	1.358.353.377			670.002.417	
	2020				
	Saldo Awal	Dampak PSAK 73	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:					
Gedung	-	340.351.905	378.713.976	-	719.065.881
Alat Angkut	-	2.168.348.762	-	-	2.168.348.762
Jumlah	-	2.508.700.667	378.713.976	-	2.887.414.643
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai:					
Gedung	-	360.284.210	-	-	360.284.210
Alat Angkut	-	1.168.777.056	-	-	1.168.777.056
Jumlah	-	1.529.061.266	-	-	1.529.061.266
Nilai Buku	-				1.358.353.377

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada potensi penurunan nilai aset hak guna pada tanggal neraca.

Beban amortisasi aset hak guna dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

	2021	2020
Beban Umum dan Administrasi (catatan 30)	823.003.468	1.529.061.266
Pendapatan Non Usaha (catatan 31a)	(134.652.508)	-
Jumlah	688.350.960	1.529.061.266

Aset hak guna merupakan objek sewa kendaraan alat angkut selama 3 (tiga) tahun sejak Desember 2018 hingga Desember 2021 dan sewa Gedung di Sumur Batu dan Kemayoran Jakarta Pusat dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak November 2020 hingga Desember 2023.

Biaya perolehan dicatat sebesar nilai dibayar dimuka pada saat melakukan perjanjian sewa dan nilai amortisasi dicatat sebesar perhitungan amortisasi dari awal masa sewa sampai dengan akhir masa sewa.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Deposito		
Pihak berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	2.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.300.000	57.300.000
Jumlah	57.300.000	2.057.300.000

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	12.737.470.435	4.195.797.344
	12.737.470.435	4.195.797.344

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.JKB/0045/KMK/2020 tanggal 01 Oktober 2020, berikut beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut:

- Fasilitas Kredit yang Diberikan:

Fasilitas Kredit Produktif Berbasis Asset, dengan jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

- Tujuan Kredit

Fasilitas kredit yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini semata-mata untuk tujuan penggunaan dalam rangka Pembiayaan Kebutuhan Produktif Usaha *Food and Beverages*, *Outsourcing Services*, *Car Rent*, *Wisata*, *Information Technology Service Management (ITSM)*, *Maintenance Services*, *Crewing* dan Usaha Penunjang Lainnya terutama untuk melayani Perseroan Terbatas Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni).

- Jangka waktu:

Persetujuan Bank untuk memberikakan Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit ini kepada Debitur hanya berlaku untuk jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian kredit, yaitu 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021.

Perjanjian Kredit ini telah dilakukan addendum I (kesatu) dengan Nomor Akta 01 tanggal 01 April 2021 dengan jangka waktu 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, terakhir telah diubah dengan addendum II (kedua) tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023.

- Suku bunga:

Debitur wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank sebesar 8,50% per tahun, yang dihitung dari saldo debit harian rekening debitur. Bunga harus dilunasi oleh Debitur pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya atau pada tanggal lainnya yang akan ditetapkan oleh Bank dengan ketentuan perhitungan bunga sebagai berikut:

- 1) Untuk pencairan kredit yang dilakukan sebelum akhir periode perhitungan bunga kredit, maka bunga kredit dihitung sejak tanggal pencairan kredit sampai dengan tanggal 14 (empat belas) pada bulan tersebut.
- 2) Untuk pencairan kredit yang dilakukan pada saat atau setelah akhir periode perhitungan bunga kredit, maka bunga kredit dihitung sejak tanggal pencairan kredit sampai dengan tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.

Bunga yang belum dilunasi oleh Debitur pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bank akan menambah Jumlah Terhutang.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

- Agunan

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitor dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut :

"Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1488/Sumur Batu, terbit tanggal 14 Mei 2003 berakhir tanggal 03 Desember 2024 atas nama Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya seluas 100 m2 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00020/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang terletak di Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok Q Nomor 5 Jl. Letjend Suprpto Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat".

- Kewajiban yang harus dipenuhi yang diatur dalam perjanjian kredit:

Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk :

- a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Debitor termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan, nilai nominal saham, mengadakan merger, akuisisi, menjual aset.
- b. Memindahtangankan barang agunan selain piutang dan persediaan.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang, atau menjaminkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain.
- d. Membagikan deviden.
- e. Melunasi hutang Debitor kepada pemilik saham.
- f. Mengambil bagian modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan Debitor.
- g. Pindah lokasi kantor atau tempat usaha atau mengganti nomor telepon Debitor atau key person tanpa seijin Bank. Apabila Debitor akan melakukan perubahan lokasi kantor atau lokasi tempat usaha atau nomor telepon, maka Debitor atau *key person* wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bank.
- h. Menyediakan dana cadangan minimal 1 (satu) kali kewajiban atau minimal Rp436.098.912 di rekening giro atau tabungan atas nama Debitor atau Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban bank dan wajib menyetor kembali sehingga nilai yang diblokir tetap minimal Rp436.098.912.
- i. Menjaga *Average Current Account Saving (CASA)* di Bank minimal 5% dari limit kredit.

Tidak ada pengingkaran kewajiban oleh Grup sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. UTANG USAHA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pihak ketiga:		
PT Telkom	6.447.402.085	2.358.700.000
PT Telenet	4.514.293.888	1.122.389.355
PT Sukanda Djaya	2.910.666.957	1.639.233.458
PT Amidis	2.270.567.784	645.964.940
PT Tisindo Jaya	2.122.130.503	-
PT Hoka Karya Mandiri	1.808.861.716	459.851.000
PT Enseval	1.011.747.847	248.558.990
PT Isat Telkom	768.650.000	470.150.000
PT Metta Karuna	745.136.516	136.155.938
PT Ferindo Sakti	737.325.434	401.252.984
PT Iti Marine & Oifield Utama	647.923.584	577.504.476
PT Selaras Makmur Pangan Jaya	453.241.800	-
PT Cipta karya Mandiri Insani	436.600.863	-
CV Dwi Putra Perkasa	323.075.000	-
PT Telkomsat	-	857.612.711
PT Asuransi Jasa Indonesia	-	489.837.698
PT Asuransi Central Asia	-	486.066.799
PT Tunas Cahaya Pratama	-	416.000.000
Kop Puskopal Kolinlamil	-	323.140.116
PT Eastern Indotech Multitama	-	309.723.197
PT Bilgit	-	300.000.000
PT Pertani	-	113.637.500
Lainnya (di bawah 300 juta)	3.873.795.011	1.116.801.147
Jumlah Utang Usaha	29.071.418.988	12.472.580.309

18. UTANG PAJAK

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. Pajak Dibayar Dimuka		
Entitas Induk		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
PPN Masukan	23.095.888.244	10.279.134.875
Pajak Penghasilan 28a	8.242.956.734	846.436.608
Jumlah Entitas Induk	31.338.844.978	11.125.571.483

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. UTANG PAJAK (lanjutan)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
b. Utang Pajak		
Entitas Induk		
Pasal 21	332.601.302	260.958.693
Pasal 25	-	141.180.497
Pasal 23	74.666.488	92.056.009
Pasal 4 ayat 2	3.923.020	52.087.901
Pajak Lainnya	3.886.701.430	42.818.727
Jumlah Entitas Induk	4.297.892.240	589.101.827
Entitas Anak		
PPH Pasal 29	63.008	-
Pasal 21	-	45.657.093
PPN Keluaran	-	44.141.517
Jumlah Entitas Anak	63.008	89.798.610
Jumlah	4.297.955.248	678.900.437
c. Beban (Manfaat) Pajak :		
Entitas Induk		
Tangguhan	(926.570.099)	(84.528.079)
Entitas Anak		
Kini	57.600.287	16.073.716
Jumlah taksiran pajak penghasilan	(868.969.812)	(68.454.363)
	2021	2020
d. Rekonsiliasi Fiskal		
Laba Sebelum Pajak		
Penghasilan Entitas Induk	4.253.096.457	30.121.515.146
Absorb (Laba) Rugi	(273.684.385)	(628.311.845)
Laba Sebelum Koreksi Fiskal	3.979.412.072	30.749.826.991
Koreksi Fiskal:		
Perbedaan Temporer:		
Beban Manfaat Karyawan	826.267.639	768.562.556
Beban Penyisihan Piutang	1.623.131.411	793.283.498
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.590.116.624	(48.264.286)
Jumlah - Dipindahkan	4.039.515.673	1.513.581.768

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. UTANG PAJAK (lanjutan)

	2021	2020
d. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan)		
Jumlah - Pindahan	4.039.515.673	1.513.581.768
Perbedaan Permanen:		
Sumbangan Duka	131.205.000	719.504.161
Rumah Tangga	353.374.054	712.925.345
Entertainment	252.275.145	567.038.836
Promosi Lainnya	184.533.952	148.705.000
Denda/Klaim	-	212.931.490
Beban Telekomunikasi	539.860.351	40.955.839
Beban Rapat Dinas	404.541.776	-
Beban Non Usaha Lainnya	-	850.587.178
Pendapatan Luar Usaha Lain-lain	(13.790.912.798)	-
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito	(225.147.104)	(343.803.048)
	(12.150.269.624)	2.908.844.801
Laba (Rugi) Fiskal	(4.131.341.879)	35.172.253.560
Taksiran pajak penghasilan	-	7.737.895.783
Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan Pasal 22	(2.780.963.821)	2.741.258.334
Pajak Penghasilan Pasal 23	(2.653.335.124)	2.043.659.529
Pajak Penghasilan Pasal 25	(1.962.221.182)	3.799.414.528
Lebih Bayar Pajak	(7.396.520.127)	(846.436.608)

e. Pajak Tangguhan

	2021				
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	Saldo Akhir
Penyisihan					
Piutang	192.566.264	393.709.998	-	-	586.276.262
Penyusutan					
Aset Tetap	668.928.749	351.081.220	-	-	1.020.009.969
Imbalan Kerja	1.269.663.219	181.778.881	(132.434.141)	-	1.319.007.959
Aset Pajak Tangguhan	2.131.158.232	926.570.099	(132.434.141)	-	2.925.294.190

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. UTANG PAJAK (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	2020			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	
Penyisihan				
Piutang	38.175.675	(232.616.725)	-	192.566.264
Penyusutan				
Aset Tetap	772.212.377	368.601.878	-	668.928.749
Imbalan Kerja	1.260.111.201	130.210.410	256.580.470	1.269.663.219
Aset Pajak				
Tangguhan	2.070.499.253	2.070.499.253	2.070.499.253	2.131.158.232

19. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Dibayar Usaha lainnya	38.218.147.155	28.372.373.457
Usaha permakanan	16.459.083.329	30.594.455.330
Usaha Jasa	5.405.131.353	6.331.378.669
Umum dan Administrasi	4.817.707.138	4.782.759.610
Jumlah	64.900.068.975	70.080.967.066

Dibayar usaha lainnya merupakan kewajiban pada pihak ketiga atas jasa perbaikan dan perawatan diatas kapal, penyediaan bahan makanan serta layanan jaringan diatas kapal, pengadaan alat medis penanggulangan covid - 19 dan pengadaan PERTASHOP.

Pada tahun 2021 Perusahaan menerima surat nomor 11.19/04/S-B/010/2021 mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020, yang menimbulkan kewajiban pada PT Pelita Indonesia Djaya sebesar Rp3.431.046.779 atas pembayaran upah dan THR petugas kebersihan lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam perjanjian Nomor TH.03.04-02/SS/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Pekerjaan Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Services*) di Kapal Penumpang PT Pelni (Persero). Kemudian atas pembayaran upah, THR dan cuti petugas kasur di atas kapal lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Perjanjian Nomor TH.1.22-03/SS/2020 Tanggal 22 Januari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Pengelolaan Kasur untuk Kapal Penumpang PT Pelni (Persero) sebesar Rp488.012.718. Perusahaan telah membayarkan secara bertahap atas selisih kurang bayar upah, THR dan cuti sebesar Rp1.240.907.544.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

19. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Kemudian upah, THR, cuti dan asuransi petugas hiburan diatas kapal lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam Perjanjian Nomor 02.06-05/SS/2020 Tanggal 06 Februari 2020 tentang Pekerjaan Jasa Pengelolaan Hiburan di Kapal Penumpang PT Peln (Persero) sebesar Rp528.281.174 serta PT PID segera menyetorkan iuran asuransi yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak ke PT Peln (Persero) yang terdiri dari Asuransi Kesehatan sebesar Rp425.036.814 dan Asuransi Ketenagakerjaan sebesar Rp253.554.996.

Pada tahun 2020 Perusahaan menerima surat nomor 06.03/04/S-B/040/2020 mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2019, yang menimbulkan kewajiban pada PT Pelita Indonesia Djaya sebesar Rp7.566.266.873 atas denda keterlambatan penyerahan pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian nahkoda dan anak buah kapal pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 687.516.339, serta kekurangan pembayaran upah sebesar Rp6.878.750.534 kepada petugas kebersihan dan kasur diatas kapal penumpang.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan telah melunasi denda keterlambatan penyerahan pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian nahkoda dan anak buah kapal kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Pada tahun 2020, Perusahaan telah membayarkan secara bertahap kepada petugas kebersihan dan Kasur di atas kapal penumpang sebesar Rp 1.343.168.607.

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Lain-lain	1.890.878.395	1.258.997.617
Liabilitas Kontrak	358.314.574	286.926.500
Jumlah	2.249.192.969	1.545.924.117

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan)

a. Utang Lain-lain

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Biaya Pegawai	846.683.204	19.510.256
Uang Titipan	662.385.162	184.336.800
Klaim Asuransi/THT Pegawai	25.580.514	25.580.514
BPJS Ketenagakerjaan	12.435.781	35.858.935
Koperasi	6.033.334	-
Iuran SP PELNI	1.971.000	1.845.000
Deviden	1.069.712	1.069.712
Uang Jaminan	-	328.115.400
Lainnya	334.719.688	662.681.000
Jumlah	1.890.878.395	1.258.997.617

b. Liabilitas Kontrak

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Usaha Jasa	261.949.831	192.426.500
Uang Titipan	75.000.000	75.000.000
Lainnya	21.364.743	19.500.000
Jumlah	358.314.574	286.926.500

Liabilitas kontrak merupakan pendapatan usaha jasa uang muka diterima dari pelanggan untuk kegiatan Kapal PHINISI dan uang muka diterima atas CS dan Janitor teknisi Cabang Surabaya.

Uang titipan merupakan pencairan dana atas tagihan *House Keeping* yang belum diambil oleh User/pengguna dana.

21. LIABILITAS JANGKA PANJANG

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sewa Pembiayaan	4.940.312.084	5.611.902.400
Liabilitas Sewa	579.059.091	1.365.347.826
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.519.371.175	6.977.250.226
Bagian Lancar Jatuh Tempo 1 Tahun :		
- Sewa Pembiayaan	(1.101.752.859)	(3.537.422.000)
- Liabilitas Sewa	(101.678.500)	(751.248.337)
Bagian Jatuh Tempo Lebih dari 1 Tahun	4.315.939.817	2.688.579.889

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

21. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

Utang sewa pembiayaan per tanggal 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari pembelian kendaraan bermotor/alat angkut yang akan disewakan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan kepada pihak ketiga lainnya. (lihat catatan 13).

Utang sewa pembiayaan merupakan pokok sewa pembiayaan 6 unit Toyota Innova Venturer 2.0 Q A/T, 15 Mitsubitsi Expander 1.5 GLS-L dan 1 unit Toyota Camry New Hybrid 2.5 L A/T.

Liabilitas kontrak sewa merupakan perjanjian sewa Grup yang terdiri dari sewa gedung dan alat angkut yang memiliki jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun sampai dengan tahun 2023.

22. UTANG PIHAK BERELASI

Saldo utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.907.280.187 dan Rp16.093.935.042.

Utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut terkait dengan pembayaran iuran kesehatan YKPP. Iuran dana pensiun dan iuran BPJS Kesehatan yang diberikan kepada karyawan PT PELNI (Persero) yang diperbantukan.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawannya sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/ 2003). Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Berdasarkan laporannya No. 1336/PSAK-TBA.AN/I-2022, tanggal 11 Januari 2022 dan No. 554/PSAK-TBA.AN/III-2021, tanggal 18 Maret 2021. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja untuk periode Januari sampai dengan Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 69 orang dan 57 orang Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah karyawan (orang)	69	57
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat Kematian	TMI - III (2019)	Indonesia - III (2011)
Tingkat Cacat	0,02% dari TMI IV (2019)	0.02% per tahun

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tingkat Pengunduran Diri:		
◦ Usia 18-30 Tahun	5% per tahun	5% per tahun
◦ Usia 31-40 Tahun	4% per tahun	4% per tahun
◦ Usia 41-44 Tahun	3% per tahun	3% per tahun
◦ Usia 45 - 52 Tahun	1% per tahun	1% per tahun
◦ Usia 53 - 55 Tahun	0% per tahun	0% per tahun
Kenaikan Gaji (Upah)	5% per tahun	5% per tahun
Tingkat Bunga Kewajiban	7.08% per tahun	7.11% per tahun
Tingkat Bunga pada Aset	0% per tahun	0% per tahun

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan dan laporan laba - rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai berikut:

	2021	2020
a. Beban imbalan pasca kerja		
Biaya Jasa Kini	473.625.464	393.553.463
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti (Keuntungan) Kerugian atas Kurtailmen & Setlemen	352.642.175	375.009.093
	-	-
Jumlah	826.267.639	768.562.556
	2021	2020
b. Mutasi Liabilitas diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan		
Nilai Kini Kewajiban Awal	5.771.196.449	5.040.444.803
Biaya Bunga	352.642.175	375.009.093
Biaya Jasa Kini (Keuntungan)/Kerugian	473.625.464	393.553.463
aktuarial-pada kewajiban	(1.301.395.038)	(37.810.910)
Nilai Kewajiban Pada Akhir Periode	5.296.069.050	5.771.196.449

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

	2021	2020
c. Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		
Nilai Kini Kewajiban Awal	5.296.069.050	5.771.196.449
Status Pendanaan	5.296.069.050	5.771.196.449
Kewajiban Transisi yang Belum Diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui	-	-
(Laba) Rugi Akturaria yang Belum Diakui	-	-
Nilai Kewajiban Pada Akhir Periode	5.296.069.050	5.771.196.449
	2021	2020
d. Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		
Kekayaan (Kewajiban) Awal Periode	5.771.196.449	5.040.444.803
Pembayaran (Pendapatan) Manfaat	-	-
Beban Tahun Berjalan	826.267.639	768.562.556
Rugi (Laba) Komprehensif Tahun Berjalan	(1.301.395.038)	(37.810.910)
Nilai Kewajiban Pada Akhir Periode	5.296.069.050	5.771.196.449

24. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh	Presentase Kepemilikan	Jumlah Nilai Saham
PT Pelni (Persero)	2.000	99,50%	2.000.000.000
YKPP	10	0,50%	10.000.000
Jumlah	2.010	100,00%	2.010.000.000

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 99.5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0.5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto. SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU- 43800.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 4 September 2009.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

25. SALDO LABA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. Ditentukan Penggunaannya :		
Saldo awal	131.974.755.011	81.732.995.380
Penambahan Cadangan Umum	22.468.147.443	50.241.759.631
Jumlah	154.442.902.454	131.974.755.011
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
b. Belum Ditentukan Penggunaannya :		
Saldo awal	20.525.452.883	57.279.364.340
Cadangan umum	(22.468.147.443)	(50.241.759.631)
Dividen	-	(8.866.192.876)
Penyesuaian PSAK	-	(114.106.393)
Laba tahun berjalan	5.160.100.449	22.468.147.443
Jumlah	3.217.405.889	20.525.452.883

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, No. 4, tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH., dan Surat Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya, No. 11.30/04/S-B/090/2021, tanggal 30 Nopember 2021, laba bersih PT Pelita Indonesia Djaya tahun buku 2020 digunakan sepenuhnya untuk Dana Cadangan PT Pelita Indonesia Djaya.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya, No. 3, tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kiki Hertanto SH., penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2019 sebesar Rp59.107.952.507 sebagai berikut: 15% sebagai dividen sebesar Rp8.866.192.876 dan 85% sebagai cadangan umum sebesar Rp50.241.759.631.

26. KOMPONEN EKUITAS LAIN

	2021	2020
Saldo Awal	(1.406.997.326)	(1.436.489.836)
Keuntungan Aktuarial - neto	469.539.226	29.492.510
Saldo Akhir	(937.458.100)	(1.406.997.326)

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal		
Modal disetor	5.000.000	150.000.000
Bagian laba tahun lalu	115.988.473	119.156.343
Penyesuaian PSAK 71	-	(1.480.436)
Dividen	-	(1.069.712)
Bagian laba tahun berjalan	5.585.396	(44.090.683)
Jumlah	126.573.868	222.515.512

Rincian kepentingan non pengendali sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Pelita Bandar Nasional		
Modal disetor	5.000.000	5.000.000
Akumulasi jumlah bagian laba	121.573.868	115.988.473
Sub Jumlah	126.573.868	120.988.473
PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya		
Modal disetor	-	150.000.000
Akumulasi jumlah bagian laba	-	(48.472.961)
Sub Jumlah	-	101.527.039
Jumlah	126.573.868	222.515.512

28. PENDAPATAN USAHA

	2021	2020
Bahan Permakanan	180.812.030.083	177.182.527.721
<i>Cleaning Services</i> Kapal dan Gedung	49.452.451.480	51.595.445.541
<i>Jasa Maintenance</i>	17.656.956.888	27.535.595.329
Pendapatan Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	2.801.855.683	22.144.900.306
Sistem Komunikasi Kapal (Siskomkap)	24.198.069.521	20.258.835.501
Pengamanan/Denkawal	20.155.851.405	20.603.543.765
<i>Frontliner & Manage Service</i>	18.686.321.327	17.464.233.416
Penyewaan Kendaraan	9.204.291.643	9.150.306.457
Hiburan Band	-	3.116.010.733
Jumlah - Dipindahkan	322.967.828.030	349.051.398.769

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

28. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

	2021	2020
Jumlah - Pindahan	322.967.828.030	349.051.398.769
<i>House Keeping/Kasur</i>	4.633.577.223	4.301.595.162
Janitor	3.025.628.430	3.068.339.476
Usaha Pelabuhan Muat (OPP)/ Pelabuhan Tujuan (OPT)	3.303.063.549	3.214.743.129
Wisma Tretes	109.458.800	106.055.396
Usaha Sampingan Lainnya	2.960.003.800	8.468.453.217
Jumlah	336.999.559.832	368.210.585.149

29. BEBAN POKOK USAHA

	2021	2020
Bahan Permakanan	159.883.099.914	146.348.615.175
<i>Cleaning Services</i> Kapal dan Gedung	40.067.837.094	35.002.136.893
<i>Jasa Maintenance</i>	15.439.985.437	24.043.796.477
Sistem Komunikasi Kapal (Siskomkap)	21.595.947.452	20.532.709.644
Pengamanan/Denkawal	20.588.040.131	15.015.410.907
<i>Frontliner & Manage Service</i>	24.453.153.364	14.642.525.663
Beban Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	1.990.665.800	17.980.512.552
Penyewaan Kendaraan	1.148.973.238	1.911.605.939
House Keeping/Kasur	5.572.612.656	3.899.341.064
Hiburan Band	449.272.485	1.557.015.546
Janitor	2.709.450.629	1.888.186.472
Usaha Pelabuhan Muat (OPP)/ Pelabuhan Tujuan (OPT)	1.390.959.027	1.216.028.195
Outsourcing Lainnya	978.872.375	894.398.654
Pengadaan Cover Kasur	802.504.848	973.198.035
Beban Penyusutan (catatan 12)	4.219.053.542	2.867.408.908
Beban Amortisasi (catatan 13)	48.279.865	35.244.302
Wisma Tretes	99.651.983	115.165.022
Usaha Sampingan Lainnya	1.171.232.106	6.933.439.477
Jumlah	302.609.591.947	295.856.738.925

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2021	2020
Pegawai Umum dan Administrasi	25.578.151.840	25.936.745.194
Penyusutan dan amortisasi (catatan 12 & 13)	3.194.691.422	2.363.170.444
Gaji, Premi dan Tunjangan Direksi/Komisaris	5.677.492.207	2.955.217.199
Jamuan dan Sumbangan	385.755.145	1.978.119.892
Profesional dan Manajemen	1.911.770.350	1.392.526.847
Administrasi Kantor	2.148.252.993	1.352.994.911
Pemeliharaan	3.403.410.216	2.279.889.229
Pemasaran	430.494.068	760.734.402
Air dan Listrik	314.129.021	403.522.295
Komunikasi	545.233.782	92.930.201
Sewa	326.407.818	74.534.535
Lainnya	1.843.701.895	1.936.915.019
Jumlah	45.759.490.756	41.527.300.168

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

	2021	2020
Pendapatan Non Usaha:		
Pendapatan Jasa Giro	292.180.598	389.124.990
Pendapatan Bunga Deposito	1.426.152	83.883.969
Jasa Administrasi	-	111.641
Kenaikan Nilai Wajar		
Properti Investasi (catatan 11)	14.089.614.710	-
Lainnya	1.959.977.576	115.376.562
	16.343.199.036	588.497.162
Beban Non Usaha:		
Beban Pajak Tahun Lalu	-	212.931.490
Beban Bunga	382.732.965	127.125.578
Beban Administrasi Bank	294.227.167	49.169.657
Lainnya	-	932.318.313
	676.960.132	1.321.545.038
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	15.666.238.904	(733.047.876)

Pendapatan Non Usaha lainnya terdiri dari Keuntungan Penjualan Aset Tetap sebesar Rp1.640.737.235 dan kelebihan pengakuan akumulasi penyusutan aset hak guna tahun 2020 sebesar Rp134.652.508.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

32. INFORMASI SEGMENT USAHA

2021				
Operasi Yang Dilanjutkan	Pendapatan Usaha	Beban Pokok Usaha	Beban Umum dan Administrasi	Laba (Rugi) Usaha
Usaha Permakanan	180.812.030.083	159.883.099.914	24.551.564.469	(3.622.634.300)
Usaha CS Kapal & Gedung	49.452.451.480	40.067.837.094	6.714.901.935	2.669.712.451
Usaha Jasa ITSM	24.198.069.521	21.644.227.317	3.285.735.267	(731.893.063)
Usaha Pengawasan dan Pengamanan	20.155.851.405	20.588.040.131	2.736.862.613	(3.169.051.339)
Usaha Front Liner & Manager Service	18.686.321.327	24.453.153.364	2.537.322.448	(8.304.154.485)
Jasa Maintenance	17.656.956.888	15.439.985.437	2.397.550.180	(180.578.729)
Usaha Kendaraan Dinas	9.204.291.643	5.366.233.780	1.249.804.892	2.588.252.971
Usaha Jasa House Keeping	4.633.577.223	5.572.612.656	629.170.359	(1.568.205.792)
Usaha Janitor	3.025.628.430	2.709.450.629	410.835.006	(94.657.205)
Pendapatan Non Jasa Pel. Kapal Lainnya	2.801.855.683	1.990.665.800	380.450.020	430.739.863
Usaha Sampingan Lainnya	2.276.726.532	1.986.161.623	309.145.349	(18.580.440)
Usaha Kapal Pinisi	683.277.268	966.447.706	92.778.815	(375.949.253)
Usaha Tretes	109.458.800	101.444.983	14.862.865	(6.849.048)
Usaha Jasa Hiburand Band	-	449.272.485	-	(449.272.485)
Usaha Anak PT.PBN	3.303.063.549	1.390.959.027	448.506.538	1.463.597.984
TOTAL	336.999.559.832	302.609.591.947	45.759.490.756	(11.369.522.871)

33. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK RERELASI

- a. Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi:

No.	Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi	Transaksi
1.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas Induk	Utang piutang, pendapatan dan beban
2.	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Asosiasi	Uang muka kerja usaha pemasangan aplikasi rental mobil dan jasa antar jemput pasien
3.	PT Pelita Bandar Nasional	Entitas Anak	Penyertaan utang piutang

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

34. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan:

	31 Desember 2021	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	33.949.640.758	33.949.640.758
Piutang Usaha	70.908.316.378	70.908.316.378
Aset Keuangan Lancar Lainnya	19.452.439.907	19.452.439.907
Uang Muka	12.952.525.489	12.952.525.489
Jumlah	137.262.922.532	137.262.922.532
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	29.071.418.988	29.071.418.988
Beban Akrua	64.900.068.975	64.900.068.975
Utang Pihak Berelasi	1.907.280.187	1.907.280.187
Liabilitas Kontrak Sewa Jangka Panjang	4.315.939.817	4.315.939.817
Bagian lancar dari Liabilitas Jangka Panjang	1.203.431.359	1.203.431.359
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	2.249.192.969	2.249.192.969
Jumlah	103.647.332.294	103.647.332.294
	31 Desember 2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	14.642.422.860	14.642.422.860
Piutang Usaha	103.898.544.299	103.898.544.299
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3.682.565.256	3.682.565.256
Uang Muka	29.339.976.483	29.339.976.483
Aset Kontrak	51.142.180.437	51.142.180.437
Jumlah	202.705.689.335	202.705.689.335
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	12.472.580.297	12.472.580.297
Beban Akrua	70.080.967.066	70.080.967.066
Utang Pihak Berelasi	16.093.935.042	16.093.935.042
Liabilitas Kontrak Sewa Jangka Panjang	614.099.489	614.099.489
Bagian lancar dari Liabilitas Jangka Panjang	4.195.797.343	4.195.797.343
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	5.083.346.117	5.083.346.117
Jumlah	108.540.725.354	108.540.725.354

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT

Keterangan 1	2021 2	2020 3	Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3
Kas dan Setara Kas (KS)	33.949.640.758	14.642.422.860	131,86
Piutang Usaha (PU)	70.908.316.378	103.898.544.299	(31,75)
Persediaan	4.855.617.377	3.552.398.632	36,69
Aset Lancar (AL)	109.713.574.513	122.093.365.791	(10,14)
Penyusutan dan Amortisasi (PA)	3.194.691.422	2.363.170.444	35,19
Jumlah Aset (JA)	284.838.251.139	271.142.277.070	5,05
Liabilitas Jk Pendek (KL)	114.459.537.974	93.262.839.610	22,73
Liabilitas Jk Panjang (KJP)	11.519.289.054	24.553.711.380	(53,09)
Jumlah Liabilitas (JK)	125.978.827.027	117.816.550.990	6,93
Modal Kerja Bersih (MKB)=(AL-KL)	(4.745.963.461)	28.830.526.181	(116,46)
Akumulasi Saldo Laba (RE)	161.950.256.133	152.500.207.894	6,20
Ekuitas (EK)	158.859.424.112	153.325.726.080	3,61
(Laba) Rugi Bersih (LRB)	5.165.685.845	22.424.056.760	(76,96)
Modal Sendiri (MS) = (EK - LRB)	153.693.738.267	130.901.669.320	17,41
Pajak Penghasilan (PJ)	868.969.812	(7.669.441.420)	(111,33)
Jumlah Pendapatan Usaha (JPU)	336.999.559.832	368.210.585.149	(8,48)
Laba Kotor (LK)	34.389.967.885	72.353.846.224	(52,47)
Bunga (BU)	382.732.965	127.125.578	201,07
EBIT=(LRB+BU+PJ)	6.417.388.622	17.117.785.784	(62,51)
Keterangan 1	2021 2	2020 3	Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar (AL/KL), %	95,85	130,91	(26,78)
Rasio Cepat (KS+PU)/KL, %	91,61	127,10	(27,92)
Rasio Kas (KS/KL), %	29,66	15,70	88,92
Rasio Leverage			
Rasio Liabilitas atas Aset (JK/JA), %	44,23	43,45	1,79
Rasio Liabilitas atas Ekuitas (JK/EK), %	79,30	76,84	3,20
Rasio Liabilitas Jk.Panjang thd Ekuitas (KJP/EK), %	72,05	60,83	0,18
Rasio Aktivitas			
Rasio Perputaran Persediaan (JPU/SD), Kali	6.940	10.365	(33,04)
Rasio Perputaran Aset (PU/JA), Kali	25	38	(35,03)
Rasio Penagihan Rata ² (PU/JPU x 365), Hari	77	103	(25,43)

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Keterangan 1	2021 2	2020 3	Deviasi (%) 4 = (2 - 3) / 3
Rasio Profitabilitas			
Rasio Imbalan Ekuitas (LRB/MS), %	3,36	17,13	(80,38)
Rasio Imbalan Investasi (EBIT+PA)/JA, %	3,37	7,18	(53,03)
Rasio Marjin Laba Kotor atas Penjl. (LK/JPU),%	10,20	19,65	(48,07)
Rasio Marjin Laba atas Penjl. (LRB/JPU),%	1,53	6,09	(74,83)
Rasio EBITDA atas Penjualan, %	2,85	5,29	(46,09)
Rasio Z-Score Model			
Z-Score Model			
$Z = (6,56 \times \text{MKB})/\text{JA} + (3,26 \times \text{RE})/\text{JA}$ $+ (6,72 \times \text{EBIT})/\text{JA} + (1,05 \times \text{EK})/\text{JK}$	3,22	4,32	25,50

- Jika hasilnya $Z < 1,1$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Pailit.
- Jika hasilnya $1,1 > Z < 2,6$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi *Gray Area*.
- Jika hasilnya $Z > 2,6$ mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Tidak Pailit.

1) Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya secara umum mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020. Hal ini tercermin dari rasio lancar turun 26,78%, yaitu dari semula 130,91% menjadi 95,85% dan rasio cepat turun 27,92%, yaitu dari semula 127,10% menjadi 91,61%, meskipun rasio kas meningkat 88,92%, yaitu dari semula 15,70% menjadi 29,66%.

Penurunan rasio likuiditas tahun 2021 dipengaruhi oleh penurunan aset lancar sebesar 10,14% dari semula Rp122.093.365.791 menjadi Rp109.713.574.513 dan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar 22,73% dari semula Rp93.262.839.609 menjadi Rp114.459.537.974, meskipun kas dan setara kas meningkat 131,86% dari semula Rp14.643.522.860 menjadi Rp296.902.800.7033.949.640.758.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

- 2) Rasio Leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Tingkat kemampuan Perusahaan tahun 2021 dalam memenuhi seluruh kewajibannya apabila dilakukan likuidasi pada saat ini secara umum mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Hal ini mendasar pada hasil perhitungan rasio total liabilitas terhadap aset meningkat 1,79% dari semula 43,45% menjadi 44,23%, rasio total liabilitas terhadap ekuitas meningkat 3,20% dari semula 76,84% menjadi 79,30% dan rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas meningkat 0,18% dari semula 60,83% menjadi 72,05%.

Penurunan tingkat kemampuan Perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah liabilitas sebesar 6,93% dari Rp117.816.550.990 menjadi Rp125.978.827.027 dan peningkatan liabilitas jangka pendek 22,73% dari Rp93.262.839.609 menjadi Rp114.459.537.974, meskipun liabilitas jangka panjang turun 53,09% dari semula Rp24.553.711.381 menjadi Rp11.519.289.054, jumlah aset meningkat 5,05% dari Rp271.142.277.070 menjadi Rp284.838.251.139 dan jumlah ekuitas meningkat 3,61% dari Rp153.325.736.080 menjadi Rp158.859.424.112.

- 3) Rasio Aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya.

Tingkat efektivitas perusahaan tahun 2021 cenderung efektif dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada, hal ini tercermin dari perputaran aset meningkat dari semula 38 kali menjadi 25 kali dan rasio penagihan rata-rata piutang meningkat dari 103 hari menjadi 77 hari, meskipun perputaran persediaan mengalami penurunan dari semula 10.365 kali menjadi 6.940 kali

Kondisi tersebut diatas dipengaruhi oleh penurunan piutang usaha 31,75% dari semula Rp103.898.544.299 menjadi Rp70.908.316.378, penurunan pendapatan usaha 8,48% dari semula Rp368.210.585.149 menjadi Rp336.999.559.832, dan peningkatan persediaan 36,69% dari semula Rp3.552.398.632 menjadi Rp4.855.617.377, meskipun jumlah aset meningkat 5,05% dari Rp271.142.277.070 menjadi Rp284.838.251.139.

- 4) Rasio Profitabilitas atau rasio kemampuan laba perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya mengalami penurunan, hal ini tercermin dari hasil imbalan (*return*) terhadap ekuitas turun 80,38% dari semula 17,13% menjadi 3,36%, rasio imbalan terhadap investasi juga mengalami turun 53,03% dari semula 7,18% menjadi 3,37%, margin laba kotor turun 48,07% dari semula 19,65% menjadi 10,20%, margin laba bersih atas penjualan turun 74,83% dari semula 6,09% menjadi 1,53%, dan rasio EBITDA terhadap Penjualan mengalami penurunan 46,09% dari semula 5,29% menjadi 2,85%.

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. CAPAIAN KINERJA DAN RASIO KEUANGAN PENTING - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

4) Rasio Profitabilitas (lanjutan)

Penurunan tingkat efektivitas penggunaan sumber daya pada tahun 2021 dipengaruhi peningkatan beban usaha mengalami peningkatan 2,28% dari Rp295.856.738.925 menjadi Rp302.609.591.947, beban umum dan administrasi meningkat sebesar 10,19% dari semula Rp41.527.300.168 menjadi Rp45.759.490.756, dan penurunan pendapatan usaha 8,48% dari semula Rp368.210.585.149 menjadi Rp336.999.559.832.

5) Rasio Z Score

Dari hasil perhitungan Z-score model tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 3,48 dan 4,32 maka sesuai hipotesis dengan perolehan angka $Z > 2.6$, bahwa mengindikasikan kelangsungan usaha dalam prediksi Tidak Pailit.

36. REKLASIFIKASI BEBERAPA AKUN PADA LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA SALDO AWAL 01 JANUARI 2020/31 DESEMBER 2019

	31 Desember 2020		
	Sebelum Reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Pinjaman Jangka Pendek	-	4.195.797.344	4.195.797.344
Liabilitas Jangka Panjang:			
- Sewa Pembiayaan	2.074.480.400	3.537.422.000	5.611.902.400
- Utang Bank yang Jatuh Tempo	4.195.797.344	(4.195.797.344)	-
- Liabilitas Sewa	-	1.365.347.826	1.365.347.826
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.270.277.744	706.972.482	6.977.250.226
Bagian lancar jatuh tempo 1 tahun:			
- Utang Bank yang Jatuh Tempo	(4.195.797.344)	4.195.797.344	-
- Sewa Pembiayaan	-	(3.537.422.000)	(3.537.422.000)
- Liabilitas Sewa	-	(751.248.337)	(751.248.337)
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun	2.074.480.400	614.099.489	2.688.579.889
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya:			
- Liabilitas Kontrak	3.537.422.000	(3.537.422.000)	-
Liabilitas Hak Guna:			
- Liabilitas Pokok Sewa Aset Hak Guna	1.365.347.826	(1.365.347.826)	-
- Bagian lancar jatuh tempo 1 tahun	(751.248.337)	751.248.337	-
- Liabilitas Pokok Sewa Aset Hak Guna Jangka Panjang	614.099.489	(614.099.489)	-
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun			
- Sewa Pembiayaan			2.074.480.400
- Liabilitas Sewa			614.099.489
Jumlah			2.688.579.889

**PT PELITA INDONESIA DJAYA
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2021, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020, dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

37. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur 6 peraturan: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai.

Grup sedang meninjau dampak yang mungkin timbul atas penerapan Undang-Undang tersebut terhadap laporan keuangan.

38. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI - TIDAK DIAUDIT

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona ("COVID-19") telah menyebar ke berbagai Negara termasuk Indonesia. Menanggapi pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa daerah yang mana berimbas pada kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan di beberapa aspek. Perusahaan terus melakukan penilaian atas dampak pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis dan operasional Perusahaan, dan berdasarkan penilaian pada saat laporan ini diterbitkan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan maupun menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan akan terus memantau perkembangan situasi terkini akibat pandemi COVID-19, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dampak tersebut terhadap bisnis dan operasi Perusahaan.

Rencana dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh manajemen dampak dari pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan mitra / pihak ketiga yang berkontrak dalam hal ini untuk kegiatan pengadaan bahan makanan, sehingga harga yang beli yg didapat tidak tinggi.
- b. Menjaga kepercayaan relasi bisnis, dengan memberikan layanan jasa terbaik, menjaga kualitas barang dan memastikan ketepatan waktu supply ke atas kapal.
- c. Menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis.
- d. Mengoptimalkan usaha untuk pekerjaan Non Captive.

Perkembangan pandemi COVID-19 dan respons pemerintah dalam penanggulangan pandemi tentunya masih berpotensi untuk menyebabkan ketidakpastian yang signifikan di masa mendatang. Dampak menengah maupun jangka panjang dari pandemi ini terhadap operasi dan kinerja keuangan Perusahaan sulit diperkirakan saat ini.

39. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2022.

INFORMASI TAMBAHAN

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des. 2021	31 Des. 2020 *)	1 Jan. 2020/ 31 Des. 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	27.671.628.788	11.130.129.627	35.825.452.222
Piutang Usaha	70.140.675.411	99.888.791.188	71.345.817.484
Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.300.368.133 dan Rp677.236.722			
Aset Keuangan Lancar Lainnya	19.419.939.907	2.989.787.322	1.790.430.768
Persediaan	4.855.617.377	3.552.398.632	5.084.216.218
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	13.389.013.530	27.935.831.314	13.489.819.950
Aset Kontrak	46.968.749.681	52.251.825.659	67.148.081.790
Pajak Dibayar Dimuka	31.338.844.978	11.125.571.482	25.910.010.616
Jumlah Aset Lancar	213.784.469.672	208.874.335.224	220.593.829.048
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan Pada Entitas Asosiasi	6.202.119.540	7.857.448.894	8.582.701.026
Properti Investasi	17.042.363.615	-	-
Aset Tetap	41.072.434.289	46.852.585.200	37.228.797.392
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp25.120.881.790 dan Rp20.959.540.209			
Aset Tak Berwujud, bersih	2.509.700.114	960.180.043	927.849.807
Aset Hak Guna, bersih	670.002.417	1.358.353.377	-
Aset Pajak Tangguhan	2.905.728.083	2.131.158.232	2.070.499.253
Jumlah Aset Tidak Lancar	70.402.348.058	59.159.725.746	48.809.847.478
JUMLAH ASET	284.186.817.730	268.034.060.970	269.403.676.526

*) Reklasifikasi.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des. 2021	31 Des. 2020 *)	1 Jan. 2020/ 31 Des. 2019
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman Jangka Pendek	12.737.470.435	4.195.797.343	-
Utang Usaha	29.071.418.988	11.447.727.771	9.294.661.198
Utang Pajak	4.297.892.240	589.101.827	6.477.931.412
Beban Akrua	64.745.155.579	69.621.331.120	76.130.770.548
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang			
- Sewa Pembiayaan	1.101.752.859	3.537.422.000	-
- Liabilitas Sewa	101.678.500	751.248.337	3.414.540.000
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	1.931.725.707	286.926.500	906.103.803
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	113.987.094.308	90.429.554.898	96.224.006.961
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Pihak Berelasi	1.854.864.312	16.041.519.167	26.691.567.878
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi:			
- Sewa Pembiayaan	3.838.559.225	2.074.480.400	1.861.787.000
- Liabilitas Sewa	477.380.592	614.099.489	-
Liabilitas Imbalan Kerja	5.296.069.050	5.771.196.449	5.040.444.803
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.466.873.179	24.501.295.505	33.593.799.681
JUMLAH LIABILITAS	125.453.967.487	114.930.850.403	129.817.806.642
EKUITAS			
Modal Saham	2.010.000.000	2.010.000.000	2.010.000.000
Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal Desember 2021 dan 2020.			
Cadangan Umum	154.442.902.453	131.974.755.011	81.732.995.380
Saldo Laba	3.217.405.889	20.525.452.882	57.279.364.340
Komponen Ekuitas Lainnya	(937.458.099)	(1.406.997.326)	(1.436.489.836)
JUMLAH EKUITAS	158.732.850.243	153.103.210.567	139.585.869.884
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	284.186.817.730	268.034.060.970	269.403.676.526

*) Reklasifikasi.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
Pendapatan Usaha	333.696.496.283	364.538.718.554
Beban Usaha	(301.218.632.920)	(294.337.698.953)
LABA KOTOR	32.477.863.363	70.201.019.601
Beban Administrasi dan Umum	(44.097.460.549)	(38.616.716.734)
LABA USAHA	(11.619.597.186)	31.584.302.867
Pendapatan (Beban) Non Usaha	15.872.693.643	(1.462.787.721)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.253.096.457	30.121.515.146
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan:		
Kini	-	(7.737.895.783)
Tangguhan	907.003.992	84.528.079
Jumlah	907.003.992	(7.653.367.704)
LABA TAHUN BERJALAN	5.160.100.449	22.468.147.442
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja :		
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	601.973.367	37.810.910
Efek pajak keuntungan (kerugian) Terkait	(132.434.141)	(8.318.400)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	469.539.226	29.492.510
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5.629.639.676	22.497.639.952
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2.567.214	11.178.183

Informasi Tambahan

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDIK SAJA

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Laba (Rugi)		Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
		Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Saldo per 31 Desember 2019	2.010.000.000	81.732.995.380	57.279.364.340	(1.436.489.836)	139.585.869.884
Efek Penyesuaian PSAK 71	-	-	(17.407.080)	-	(17.407.080)
Efek Penyesuaian PSAK 73	-	-	(96.699.313)	-	(96.699.313)
Saldo per 1 Januari 2020 (Dampak PSAK)	2.010.000.000	81.732.995.380	57.165.257.947	(1.436.489.836)	139.471.763.491
Cadangan Umum	-	50.241.759.631	(50.241.759.631)	-	-
Dividen	-	-	(8.866.192.876)	-	(8.866.192.876)
Laba Tahun Berjalan	-	-	22.468.147.442	-	22.468.147.442
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	29.492.510	29.492.510
Saldo per 31 Desember 2020	2.010.000.000	131.974.755.011	20.525.452.882	(1.406.997.326)	153.103.210.567
Cadangan Umum	-	22.468.147.442	(22.468.147.442)	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	5.160.100.449	-	5.160.100.449
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	469.539.226	469.539.226
Saldo per 31 Desember 2021	2.010.000.000	154.442.902.453	3.217.405.889	(937.458.100)	158.732.850.243

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Dengan Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020)
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	370.456.466.021	349.964.427.449
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(200.852.324.319)	(238.590.123.912)
Pembayaran Operasional	(109.133.646.343)	(101.617.322.092)
Pengeluaran Lain-lain	(29.209.061.671)	(801.171.013)
Pembayaran Pajak	(20.213.273.496)	(13.384.738.093)
Penerimaan Lain-lain	15.721.153.292	(925.584.418)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	26.769.313.484	(5.354.512.079)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(16.902.917.615)	(14.421.345.271)
Penambahan Aset Tak Berwujud	(1.866.569.800)	(248.000.000)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(18.769.487.415)	(14.669.345.271)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Bank	29.200.000.000	5.000.000.000
Pembayaran Utang Bank	(20.658.326.909)	(804.202.657)
Pembayaran Dividen	-	(8.867.262.588)
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh dan (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	8.541.673.091	(4.671.465.245)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	16.541.499.161	(24.695.322.595)
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	11.130.129.627	35.825.452.222
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	27.671.628.788	11.130.129.627

PT PELITA INDONESIA DJAYA (PIDC)

Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5
Jl. Letjen Suprpto, Kemayoran

 021 42883720 - 42883740

 pelniservices

 PT. Pelita Indonesia Djaya

 corporate@pidc.co.id

pt.pidc@gmail.com

www.pelniservices.com